



LAPS SJK
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan



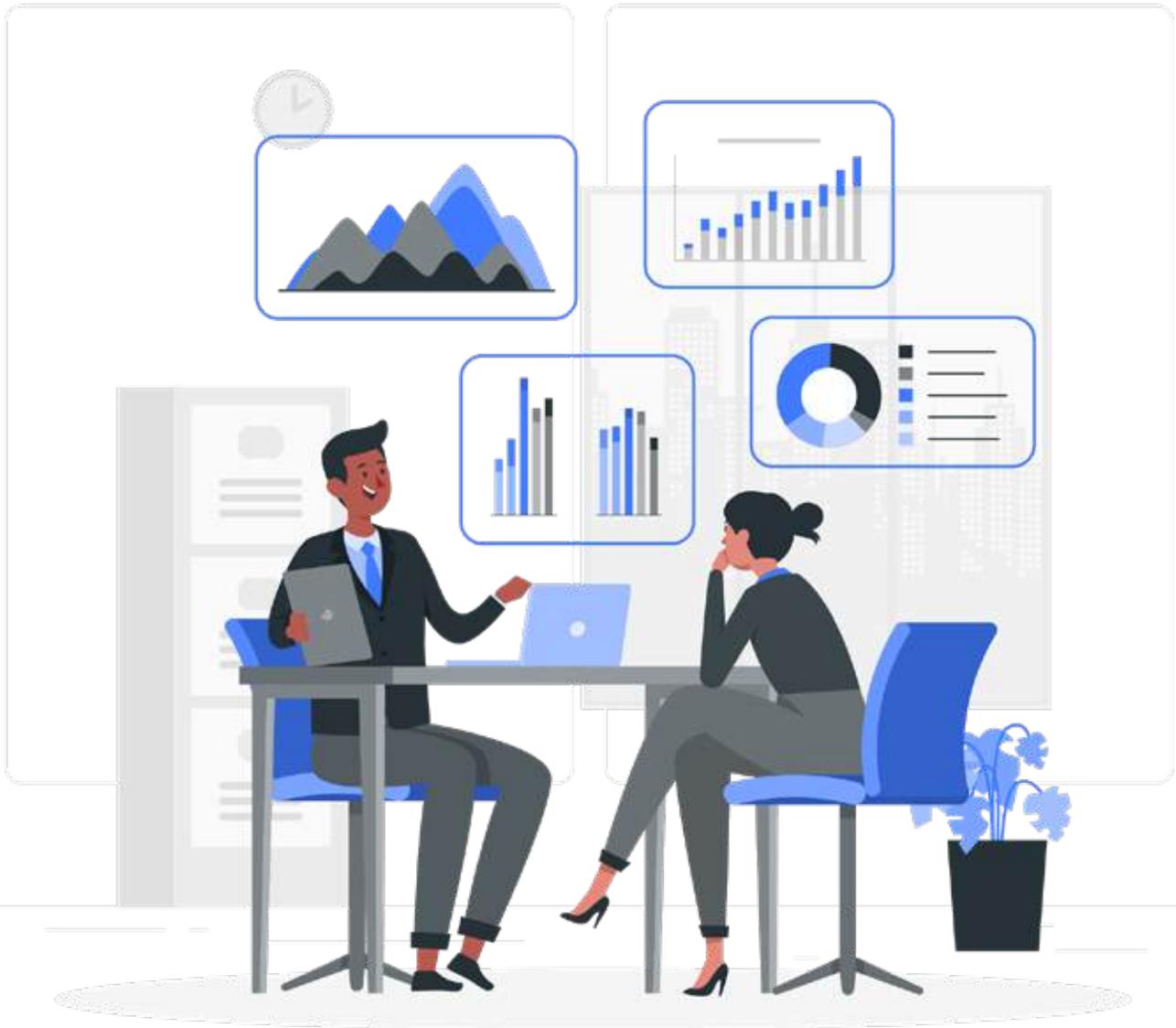
2022

LAPORAN
TAHUNAN



Embrace Sustainability

**Building Future
Together**



Embrace Sustainability

Building Future Together



Laporan Ketua Pengurus

Para Anggota LAPS SJK yang terhormat.

Sebagaimana yang telah Pengurus sampaikan dalam Laporan Tahunan 2021, kinerja penyelesaian sengketa tahun 2021 sangatlah rendah. Rendahnya kinerja ini dikarenakan adanya beberapa faktor internal maupun eksternal. Ketidakmampuan menyeimbangkan proses yang efisien dalam menangani kasus kecil/ritel (*small/ retail claims*) yang banyak masuk ke Lembaga serta ketidakcukupan sumber daya untuk memfasilitasi merupakan isu utama faktor internal. Sedangkan isu utama dari faktor eksternal adalah pemahaman masyarakat (konsumen) terhadap jenis sengketa atau pengaduan yang bisa difasilitasi oleh LAPS SJK. Jenis sengketa sesuai definisi POJK No. 61/2020 adalah perselisihan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“**PUJK**”) yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh PUJK dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena PUJK tidak memenuhi perjanjian dan/ atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.

Dengan dibukanya kanal pengaduan konsumen melalui <https://kontak157.ojk.go.id> untuk saluran pengaduan konsumen secara online pada awal Januari 2021, pengaduan konsumen yang masuk meliputi segala jenis permasalahan. Tidak seluruh pengaduan yang masuk sesuai definisi POJK seperti misal penipuan, perlakuan kurang menyenangkan dari debt collector, *error in persona* di pihak Termohon, dan lainnya. Setiap bulan rata-rata tiket pengaduan yang masuk +/- 100 (seratus) tiket dan terus meningkat di tahun 2022 hampir 150%-nya. Untuk mengatasi pengaduan yang tidak sesuai definisi

“Dibandingkan dengan tahun 2021, periode tahun 2022 merupakan tahun pemulihan dan kerja keras dari seluruh tim, dalam menyerap alokasi anggaran dengan baik. Namun kinerja penyelesaian sengketa yang sangat rendah di tahun 2021 masih terus membawa persoalan, karena sisa anggaran yang cukup besar yang harus diserap membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun”.

POJK, Pengurus memasang filter kategori untuk menolak jenis pengaduan yang tidak dapat difasilitasi supaya hanya pengaduan yang layak saja yang ditindaklanjuti. Dengan adanya strategi ini, tekanan beban kerja dapat dimitigasi. Walaupun demikian, target penyelesaian sengketa sebesar 300 (tiga ratus) kasus di tahun 2021 hanya dapat diselesaikan oleh mediator tetap LAPS SJK sebanyak 6 (enam) kasus dengan biaya sebesar Rp45 juta atau +/- 2,42% dari anggaran sebesar Rp. 1,8 miliar.

Memasuki tahun 2022, dengan kenaikan pengaduan yang masuk lebih dari 150%, maka target penyelesaian sengketa sesuai RKAT 2022 menjadi 40-48 sengketa per bulan atau minimal 480 sengketa setahun. Namun, sampai dengan periode triwulan 1/2022 (Januari-Maret), realisasi jumlah pengaduan yang difasilitasi masih sangat rendah (rata-rata 6 sengketa) atau hanya sebesar 15% dari target di atas, sehingga apabila tidak dilakukan *significant action* dan perubahan yang mendasar, maka Lembaga akan kembali mengulangi kesalahan yang sama di tahun 2021. Isu mengenai sumber daya sudah dapat diatasi dengan penambahan jumlah *headcounts* Divisi Penyelesaian Sengketa menjadi 12 (dua belas) orang sehingga dianggap cukup untuk menaikkan jumlah penyelesaian sengketa per bulannya. Oleh karena itu, melalui mekanisme rapat Pengurus tanggal 31 Maret 2022, diputuskan bahwa kendali penanganan penyelesaian sengketa *small/retail claims* diserahkan kepada Ketua Pengurus, dan Direktur Layanan Sengketa/Sekretaris menangani layanan mediasi dan arbitrase yang bersifat komersial.

Para Anggota LAPS SJK yang terhormat.

Proses mediasi merupakan serangkaian proses yang panjang dan *time consuming* yaitu dimulai dari proses verifikasi pengaduan kepada pihak konsumen dan PUJK, konfirmasi kesediaan mediasi dari PUJK, penunjukan mediator, penetapan jadwal mediasi dan terakhir tahap perundingan mediasi dengan time limit 30 hari kerja sejak mediator ditunjuk. Bagi pihak di luar LAPS SJK, proses ini akan mempersepsikan *Service Level Agreement* Lembaga yang kurang cepat.

Untuk mendapatkan gambaran proses penanganan layanan mediasi dapat disampaikan bahwa terdapat 2 tahapan yaitu : i) tahap I konsumen mengadukan secara online melalui kontak 157 APPK OJK. Pengaduan ini dimonitor oleh OJK. Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan respon dalam waktu 20 hari kerja (“HK”) sejak konsumen memasukkan pengaduannya, dan dapat diperpanjang 1x kali lagi selama 20 HK. Apabila konsumen dapat menerima tanggapan PUJK, maka pengaduan selesai dan ditutup dalam tahap I ini. Namun apabila Konsumen menolak tanggapan dimaksud, Konsumen memiliki opsi untuk melanjutkan ke Pengadilan atau melanjutkan ke LAPS SJK. Dalam hal memilih Pengadilan maka pengaduan di APPK ditutup. Apabila konsumen memilih LAPS SJK maka system akan meneruskan pengaduan konsumen dan tanggapan PUJK ke LAPS SJK.

“Kecepatan proses merupakan salah satu keunggulan dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK. Namun demikian, standar baku berdasarkan ketentuan dan best practice memaksa penanganan penyelesaian sengketa memerlukan waktu yang cukup Panjang”.



Pada tahap II ini, LAPS SJK akan melakukan klarifikasi dan atau verifikasi kepada kedua belah pihak, yaitu untuk meyakini bahwa pengaduan konsumen ini dapat memenuhi definisi sengketa sebagaimana diatur oleh OJK. LAPS SJK memiliki 9 (sembilan) jenis kategori sengketa/pengaduan yang tidak dapat difasilitasi. Sepanjang tidak memenuhi kriteria kategori penolakan tersebut, maka Lembaga akan mengirimkan surat konfirmasi kesediaan bermediasi kepada PUJK. Persetujuan PUJK untuk mediasi akan berlanjut kepada penunjukan mediator tetap dan sekretaris, yang selanjutnya akan ditetapkan jadwal perundingan mediasi. Selama tahun 2022, data konfirmasi kesediaan PUJK untuk bermediasi menunjukkan waktu yang cukup lama (lebih dari 35 hari), sehingga hal ini mempengaruhi jumlah antrian pengaduan yang harus difasilitasi. Konfirmasi kesediaan bermediasi ini merupakan suatu proses yang harus dilalui agar LAPS SJK memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang masuk. Klausula penyelesaian sengketa yang tercantum dalam perjanjian antara PUJK dengan Konsumen masih menggunakan forum peradilan umum, sehingga dengan adanya konfirmasi PUJK untuk bersedia bermediasi memberikan kewenangan absolut tersebut kepada Lembaga. Diharapkan kedepannya, baik PUJK dan Konsumen dapat membuat klausula penyelesaian sengketa dengan menggunakan forum LAPS SJK. Apabila hal ini dapat dilakukan maka klausula demikian dapat memotong 1 (satu) proses yang dapat memperpendek masa penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Para anggota LAPS SJK yang terhormat.

Pengurus menyadari bahwa jumlah pengaduan tidak akan pernah menurun. Penanganan pengaduan dari konsumen kecil atau retail (*small/retail claims*) merupakan kewajiban dari anggota untuk membiayai

proses penyelesaiannya. Namun demikian, kenaikan jumlah pengaduan tidak mudah untuk dapat diprediksi secara *exact*, sehingga penyusunan anggaran harus dapat mengasumsikan potensi kenaikan dan potensi realisasinya. Ketidakpastian tersebut akan mengakibatkan penetapan anggaran yang lemah. Oleh karena itu, Pengurus telah mengusulkan konsep *Effectivity Ratio* (ER) yang dihitung dari beberapa parameter dengan asumsi sebagai berikut :

1. Beban Biaya Penyelesaian Sengketa *Small/Retail Claims* yang tidak pasti harus dinyatakan dalam angka yang tetap (konstan) dalam waktu yang cukup panjang (3-5 tahun) sehingga anggota memiliki kepastian dalam jumlah iuran tahunannya;
2. Jumlah angka sengketa *small/retail claims* yang dapat diselesaikan di tahun mendatang harus lebih besar dari tahun lalu seiring dengan kenaikan pengaduan pada tahun berjalan;
3. Lembaga harus mampu menghasilkan tambahan penerimaan dari kasus komersial (*commercial cases*) yang dapat digunakan sebagai *buffer* dari kenaikan anggaran di tahun depan (termasuk penambahan SDM dan biaya-biaya lainnya yang mengikuti) tanpa harus meminta tambahan iuran dari anggotanya;
4. Jumlah Biaya Penyelesaian Sengketa *small/retail claims* dibagi dengan Biaya SDM + Biaya Administrasi Umum harus lebih besar dari 28%.

Konsep ini diyakini Pengurus dapat menghasilkan pengelolaan anggaran yang lebih profesional dan bertanggung jawab serta dapat diukur dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih pasti. Penetapan IKU tentunya dengan menggunakan pendekatan SMART (*Specific*,

Measurable, Attainable, Relevant dan Time Bound). Konsep ER ini telah dipresentasikan dalam Rapat Badan Pengawas di triwulan 3/2022 dan mendapat persetujuan secara bulat. Hasilnya sebagaimana dalam Laporan Keuangan Audited tahun 2022 akan dapat dihitung bahwa Biaya Penyelesaian *Small/Retail Claims* meningkat di atas anggaran tahunan, demikian juga dengan Biaya SDM dan Biaya Administrasi Umum juga meningkat. Dihitung berdasarkan persentase maka angka ER tahun 2022 ini adalah 34%.

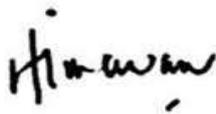
Para anggota LAPS SJK yang terhormat.

LAPS SJK saat ini baru berumur 2 (dua) tahun. Dengan fungsinya yang cukup penting bagi perlindungan konsumen, masih banyak pekerjaan rumah yang harus disiapkan dan diselesaikan oleh Pengurus. Dengan segala keterbatasan, Pengurus telah mencoba semaksimal mungkin dengan menetapkan skala prioritas hal hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sebagai Lembaga non profit dan Lembaga *quasi judicial*, Pengurus harus mampu menyeimbangkan kepentingan dari semua *stakeholders* utama yang meliputi kepentingan dari Konsumen, PUJK Anggota, Pegawai, Badan Pengawas maupun Otoritas.

Di tahun kedua ini, Pengurus menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengawas yang telah memberikan arahan dan bimbingan termasuk semua persetujuan dan endorsement atas konsep dasar dalam mengelola LAPS SJK secara profesional dan bertanggung jawab. Demikian juga kepada Otoritas Jasa Keuangan secara khusus kepada Departemen Perlindungan Hukum Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK yang telah mengawasi dengan baik dan memberikan teguran maupun rekomendasi atas hal hal yang harus diperbaiki ke depannya.

Terakhir, sebagai Ketua dan mewakili anggota Pengurus lainnya, kami mohon maaf apabila belum dapat memberikan kepuasan kepada semua stakeholders dan masih banyak kekurangan yang harus terus disempurnakan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya.

Jakarta, 31 Juli 2023



Himawan E Subianto
Ketua



Pengawas menilai bahwa selama tahun 2022, Pengurus telah dapat melakukan perbaikan yang cukup mendasar salah satunya terkait dengan pencapaian realisasi penyerapan biaya khususnya Biaya Penyelesaian Sengketa, penambahan sumber daya manusia serta telah menyiapkan konsep penilaian kinerja Lembaga melalui konsep Effectivity Ratio yang telah disetujui secara aklamasi oleh Pengawas dalam Rapat Pengawas Triwulan ke 3/2022.

Laporan Kepengawasan LAPS SJK

Para Anggota LAPS SJK dan pemangku kepentingan yang saya hormati.

Dalam Laporan Tahunan 2021, Pengawas telah memberikan pernyataan ketidakpuasan terhadap kinerja penyelesaian kinerja oleh Pengurus, dimana penyerapan anggaran biaya tersebut sangat rendah dari anggaran yang telah disetujui oleh seluruh anggota. Di dalam tahun 2022, Pengawas telah meminta Pengurus untuk melaporkan *update progress* penyelesaian sengketa secara triwulanan supaya kinerja penyelesaian sengketa khususnya pengaduan kecil/ritel (*small/retail claims*) dapat dimonitor dan diselesaikan dengan baik.

Dari statistik yang dilaporkan setiap triwulanan terdapat progress yang cukup signifikan dengan adanya pertumbuhan perundingan mediasi yang terus meningkat yang diikuti dengan penyerapan biaya honor mediator yang tinggi. Sehingga pada akhir tahun 2022, anggaran biaya yang tidak terserap di tahun 2021 dapat dimanfaatkan untuk menambah biaya honor mediator dengan total Rp. 2,2 miliar (atau 122,22 % di atas anggaran sebesar Rp. 1,8 miliar). Artinya terdapat Rp. 400 juta dari sisa biaya penyelesaian sengketa tahun 2021 (Rp. 1,8 miliar) digunakan untuk menyelesaikan perundingan mediasi di tahun 2022.

Pengurus juga telah memaparkan rencana aksi penyerapan sisa anggaran biaya penyelesaian sengketa sebesar Rp. 1,4 miliar untuk dapat digunakan di tahun 2023 dengan beberapa inisiatif yang dapat diterima oleh Pengawas. Selain hal tersebut, Pengurus telah memaparkan inisiatif strategif yang bersifat *forward looking* yaitu dengan menyajikan konsep *Effectivity Ratio* (ER), yaitu suatu ukuran rasio untuk menilai efektivitas Pengurus dalam mengelola Lembaga secara profesional dan obyektif.

Sejauh yang dapat diketahui bahwa untuk badan hukum perkumpulan yang bersifat non-profit, Pengawas belum melihat adanya suatu tolok ukur penilaian kinerja badan hukum perkumpulan, sehingga sulit untuk menilai apakah manajemen perkumpulan berhasil atau gagal. Perlu diketahui bahwa operasional LAPS SJK dibiayai oleh iuran dari anggota PUJK. Di sisi lain, Pengawas yakin bahwa jumlah sengketa yang akan diselesaikan Lembaga akan selalu bertambah jumlah dan kompleksitasnya. Sebagai konsekuensinya biaya operasional LAPS SJK akan ikut bertambah, dan akibatnya hal ini akan berpengaruh pada mekanisme penyusunan dan persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan karena mengandung ketidakpastian mengenai angka sengketa yang akan ditangani.

Para Anggota LAPS SJK dan pemangku kepentingan yang saya hormati.

LAPS SJK memiliki 1.350 anggota yang dari sisi *economic size* sangat besar gap-nya antara satu dan anggota lain, dari yang hanya puluhan miliar sampai dengan ribuan triliun. Besaran aset ini juga tidak linear dengan jumlah sengketa, karena PUJK yang asetnya kecil ternyata memiliki jumlah pengaduan yang banyak. Sehingga apabila iuran operasional tahunan LAPS SJK hanya didasarkan pada jumlah sengketa yang masuk per tahun, maka akan terjadi ketidakseimbangan proporsi iuran yang semakin lama semakin besar. Selama 2 tahun ini pun, kondisi ini telah terjadi.

Inisiatif Pengurus terkait penerapan *Effectivity Ratio* (“ER”), ini memberikan kenyamanan bagi anggota karena besaran iuran operasional per tahun dapat dikunci dalam jangka menengah sebesar jumlah iuran di tahun pertama. Konsep ER ini adalah hasil dari pembagian antara Biaya Penyelesaian Sengketa (BPS) dengan Biaya Sumber Daya Manusia (BSDM) + Biaya Administrasi Umum (BAU) yang hasil akhirnya adalah minimal 28% (lihat halaman 53). Semakin tinggi angka ER menunjukkan pengelolaan Lembaga semakin baik, karena BPS sebagai faktor penyebut akan selalu lebih besar dari faktor pembilang (BSDM+BAU). Pengurus selanjutnya menjelaskan bahwa kenaikan biaya yang terjadi itu nantinya akan dibiayai oleh penerimaan LAPS SJK dari penanganan kasus komersial yang masuk. Berdasarkan laporan Pengurus, realisasi penerimaan kasus komersial tahun 2022 telah melampaui target sebesar 179% (lihat hal 53). Oleh karena itu, ketika konsep ER ini secara aklamasi dapat disetujui Pengawas, karena sebagai representasi anggota, Pengawas memiliki keyakinan bahwa pada waktu tertentu nanti, apabila dikelola secara profesional dan transparan, Lembaga ini akan dapat beroperasi secara mandiri, dan dapat menekan efisiensi anggota dalam membiayai operasional LAPS SJK.

LAPS SJK telah dapat merealisasikan institutional campaign dengan menandatangani MoU dengan 15 (lima belas) Fakultas Hukum Universitas ternama di Indonesia. Salah satu manfaat dari MoU tersebut adalah Lembaga dapat merekrut akademisi sebagai mediator dan arbiter yang akan melengkapi komposisi mediator dan arbiter tetap LAPS SJK yang terdiri dari praktisi keuangan senior dan hakim agung. Dengan komposisi ini, diharapkan Lembaga akan dapat mengeluarkan putusan arbitrase yang berkualitas.



Para Anggota LAPS SJK dan pemangku kepentingan yang saya hormati.

Pengawas mengapresiasi langkah Pengurus dalam menjalin kerja sama dengan 15 (lima belas) Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta ternama di Indonesia. Dengan adanya konsep Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbud, mahasiswa dapat memilih program *internship* untuk menggantikan beberapa mata kuliah. MoU ini dapat berfungsi untuk mendorong sosialisasi yang lebih luas kepada para dosen; sedangkan untuk mahasiswa hukum mereka dapat belajar proses mediasi dan arbitrase secara praktek langsung. Selain hal tersebut, MoU ini dapat berpotensi mengundang kasus komersial untuk diajukan ke LAPS SJK. Para dosen pengampu mata kuliah arbitrase dapat melamar menjadi mediator dan arbiter LAPS SJK dan melengkapi komposisi majelis arbitrase yang terdiri dari praktisi keuangan senior dan hakim agung. Praktik ini telah diterapkan di beberapa negara dimana akademisi terlibat dalam mempromosikan Lembaga alternatif penyelesaian sengketa khususnya arbitrase. Keterlibatan para akademisi dalam webinar Mediator Talks atau Arbitrator Talks selama tahun 2022 cukup meningkatkan bobot webinar sehingga peserta tercatat lebih dari 200 orang.

Dengan pencapaian penerimaan kasus komersial di tahun 2022, pada tanggal 23 Desember 2022, Pengurus telah mencanangkan program utama "*Road to Rp. 1 Trillion Commercial Dispute Resolution Case*". Komitmen ini telah ditandatangani oleh seluruh Pengurus dan Pegawai LAPS SJK bersama dengan salah satu anggota perwakilan Pengawas. Program ini harus dapat direalisasikan karena sebagian penerimaan dari kasus komersial ini akan

dipergunakan untuk meningkatkan Biaya Penyelesaian Sengketa, Biaya SDM dan Biaya Administrasi & Umum. Sebagaimana yang telah disetujui bersama oleh Pengawas maupun OJK, bahwa pada waktu permohonan persetujuan RKAT tahun 2023, Pengurus berjanji dapat mempertahankan besaran iuran anggota tetap sama dengan besaran iuran pada tahun pertama (2021) dan tahun kedua (2022)

Para Anggota LAPS SJK dan pemangku kepentingan yang saya hormati.

Sebagai anggota Pengawas mewakili kepentingan anggota, kami berharap dapat melaksanakan fungsi pengawasan ini dengan baik, transparan dan profesional sesuai yang diharapkan oleh rezim perlindungan konsumen. Namun, kami menyadari bahwa terdapat faktor teknis yang relatif penting untuk di-*address* yaitu dinamika pergantian Ketua Umum Asosiasi yang mempengaruhi status keanggotaan pengawas karena faktor *ex-officio*. Sesuai ketentuan, status anggota Pengawas yang sudah tidak lagi menjadi Pengurus di asosiasi secara otomatis berakhir sebagai anggota Pengawas LAPS SJK. Pengurus baru asosiasi harus diajukan ke OJK untuk dilakukan Fit and Proper Test terlebih dahulu dan kemudian diangkat melalui RUA. Untuk itu, dalam kesempatan ini Pengawas seluruhnya harus menyadari prosedur ini supaya tata kelola Lembaga dapat dilaksanakan dengan baik.

Demikian, laporan pengawasan ini kami buat dengan itikad baik dan komitmen penuh untuk mendukung fungsi perlindungan konsumen melalui LAPS SJK. Pengawas berharap Pengurus LAPS SJK dapat bekerja dengan integritas yang tinggi yang dilandasi dengan kepatuhan terhadap semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2023

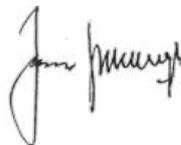
Pengawas
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan



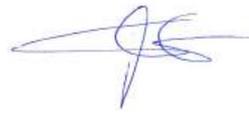
Suwandi Wiratno
Ketua



Fransiska Oei
Anggota



Joko Suyanto
Anggota



Lily Widjaja
Anggota



Budi Tampubolon
Anggota



Supriyatno
Anggota



Batara P. Sianturi
Anggota



Holilur Rohman
Anggota



Nur Hasan Kurniawan
Anggota



Adrian A. Gunardi
Anggota

Daftar Isi

2	Laporan Ketua Pengurus
---	---------------------------

6	Laporan Kepengawasan LAPS SJK
---	----------------------------------

10	Daftar Isi
----	------------



PROFIL LEMBAGA

- 14 Profil Singkat
- 16 Identitas Lembaga
- 17 Fungsi dan Tujuan LAPS SJK
- 18 Visi dan Misi
- 19 Nilai Dasar Lembaga (Core Values)
- 20 Struktur Keanggotaan & Badan Pengawas LAPS SJK
- 22 Struktur Organisasi
- 24 Jenis Layanan LAPS SJK
- 28 Daftar Mediator Arbiter dan Foto-foto Mediator Arbiter



PENYELESAIAN SENGKETA

- 34 Demografi Provinsi Dari Konsumen Peta Indonesia
- 36 Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan termasuk alasan penolakan
- 43 Kepatuhan Anggota Dalam Melaksanakan Kesepakatan/Putusan



KINERJA LEMBAGA 2023

- 50 Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2022
- 54 Kinerja Hubungan Kelembagaan (Institutional Campaign Performance)



TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

- 60 Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT)
- 61 Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA-LB)
- 61 Rapat Pengawas
- 62 Rapat Pengurus
- 63 Peraturan dan Acara LAPS SJK
- 63 Pelaporan kepada OJK
- 64 Penyusunan Kebijakan tahun 2022

65

LAMPIRAN

- 65 Laporan Audited Keuangan
- 89 Daftar Anggota



Profil Lembaga



Profil Singkat.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”) didirikan pada tanggal

22 September 2020

oleh seluruh Direksi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) dan SRO di Sektor Pasar Modal serta semua Ketua Umum Asosiasi Sektor Jasa Keuangan.



Dibentuknya LAPS SJK oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) bertujuan untuk menggantikan keberadaan 6 LAPS yang telah beroperasi sebelumnya, yakni BAPMI (2002), BMAI (2006), BMDP (2011 - *Market and Regulatory Driven*, dibentuk oleh POJK No. 1 tahun 2013 tentang PKSJK), LAPSPI; BMPPVI; BAMPPI (2015 - *Regulatory Driven*, dibentuk oleh OJK No. 1 tahun 2014 tentang LAPS).

Ketentuan mengenai LAPS Sektor Jasa Keuangan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Konsumen di sektor jasa keuangan atas penyelesaian Sengketa. Namun demikian dalam perkembangannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan masih memerlukan penyempurnaan untuk mewujudkan LAPS Sektor Jasa Keuangan yang lebih efektif dan efisien, serta menyikapi perkembangan teknologi, produk dan layanan jasa keuangan yang semakin kompleks dan lintas sektor jasa keuangan.

Keberadaan masing-masing Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ini didasari oleh kesepakatan dari masing-masing sektor keuangan yang bersangkutan dengan *Self Regulatory Organizations* (SRO's). Namun, selama beroperasinya 6 LAPS di sektor keuangan tersebut, OJK terus mencari bentuk LAPS sektor keuangan di Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menjadi LAPS terbaik. Keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ini sangatlah penting bagi perlindungan konsumen yang seringkali merasa dirugikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”) ketika menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

Dengan diterbitkannya POJK No. 61/POJK.07/2020 yang menggantikan POJK No. 1 tahun 2014 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, lahirlah suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa baru yang menggantikan keenam lembaga penyelesaian sengketa sebelumnya, yakni LAPS SJK berdasarkan hasil kesepakatan SRO's Pasar Modal dan 19 Asosiasi dari seluruh sektor keuangan yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK. Pendirian LAPS SJK terinspirasi pula dari adanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa di negara-negara lain, seperti Australia, Singapura, dan Malaysia, yang mana negara tersebut memiliki LAPS yang terkonsentrasi pada 1 (satu) lembaga atau *Single EDR Scheme*, khususnya untuk *small claims*-model LAPS di sektor keuangan negara tersebut.

Sebagai contoh, bentuk LAPS di Australia pada tahun 2008, LAPS sektor perbankan, sektor asuransi, dan sektor perusahaan pembiayaan digabung menjadi 1 lembaga yang dinamakan Financial Ombudsman Services (FOS). Berlanjut kembali pada tahun 2018, FOS kembali bergabung bersama 2 lembaga EDR lainnya yaitu Credit and Investment Ombudsman dan Superannuation Complaints Tribunal (untuk Dana Pensiun) menjadi The Australian Financial Complaints Authority. Demikian pula di Singapura, yakni FIDREC yang pada mulanya merupakan gabungan dari penanganan sengketa Consumer Mediation Unit (CMU) of the Association of Banks in Singapore dan sengketa asuransi yang dikelola oleh Insurance Dispute Resolution Organisation (IDRO), dan pada tahun 2003, kemudian FIDREC menangani juga sengketa pasar modal.

Terkonsentrasinya LAPS pada 1 lembaga saja mulai diimplementasi oleh Indonesia, dimana pada awalnya Indonesia sendiri memiliki 6 LAPS dan mulai 22 September 2020, terbentuklah 1 LAPS yang ditujukan bagi seluruh sektor keuangan di Indonesia, yakni Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Hadirnya LAPS SJK diharapkan dapat berperan untuk menangani sengketa lintas negara, dengan itu maka Pengurus LAPS SJK telah mengajukan nama internasional yang sudah disetujui oleh Pengawas/Pendiri pada

tanggal 9 November 2020, yakni *The Indonesia Financial Services Alternative Dispute Resolution Center*. Untuk memudahkan pengucapan nama internasional LAPS SJK, maka penamaan tersebut disingkat menjadi IFeRDIC (aiferdik), yang mana pengucapan “ferdik” mirip dengan pengucapan “verdict” yang berarti putusan. LAPS SJK saat ini menjadi satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Sektor Jasa Keuangan di Indonesia, yang akan menangani sengketa kecil (*small claims*) dan sekaligus sengketa komersial (*commercial disputes*).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada tanggal 22 Oktober 2020 Self Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan membentuk LAPS Sektor Jasa Keuangan (“**LAPS SJK**”) yang mana dapat menangani semua jenis perkara terkait dengan produk-produk jasa keuangan. LAPS SJK ini juga merupakan sebuah forum yang dapat dipilih oleh Konsumen dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan (baik dengan mediasi ataupun arbitrase), sehingga karakteristik dari kegiatan LAPS SJK adalah pemberian layanan penyelesaian sengketa yang andal dan dapat dipercaya. Pada buku ini akan dibahas secara lengkap mengenai pengorganisasian daripada LAPS SJK, dimana mencakup latar belakang pengembangan LAPS SJK, jenis layanan yang diberikan, model bisnis, serta rencana masa depan LAPS SJK.

Pembentukan LAPS SJK sebagai satu-satunya lembaga alternatif penyelesaian di sektor jasa keuangan yang memperoleh izin operasional OJK diharapkan akan menghasilkan standar kualitas layanan yang sama bagi seluruh Konsumen dan memudahkan Konsumen dalam menyelesaikan Sengketa, termasuk atas Sengketa yang muncul dari pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) sektor jasa keuangan. Selain itu, pembentukan LAPS Sektor Jasa Keuangan diharapkan dapat meminimalisasi beban biaya operasional LAPS Sektor Jasa Keuangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, namun tetap mempertahankan kualitas pelayanan.

Identitas Lembaga

Alamat Lembaga

Alamat LAPS SJK :
**Gedung Menara Karya,
 Lt. 25 Unit G-H
 Jl. HR. Rasuna Said
 Blok X-5 Kav 1-2
 Jakarta 12950**

Telepon :
021-2527700

Email :
info@lapssjk.id

Penempatan Logo

LAPS SJK memiliki Logo yang terdiri dari model vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk kegiatan “branding” dan untuk memberikan impresi kepada pihak ketiga atas eksistensi LAPS SJK. Selain itu, logo LAPS SJK memiliki filosofi tertentu yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang telah dicanangkan.

Mode Vertikal



Mode Horizontal



Filosofi Logo

Bentuk logo perkumpulan memiliki logo yang diinspirasi dari tangan yang menggenggam, dengan atap rumah yang menaungi, menunjukkan bahwa LAPS SJK adalah rumah perdamaian dan keadilan bagi penyelesaian sengketa.

Filosofi Warna Logo



Warna atap merah putih melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Warna kuning emas melambangkan prestasi, kesuksesan dan kemakmuran.



Warna biru melambangkan kecerdasan, rasa percaya diri, dapat dipercaya dan harmonis

Fungsi dan Tujuan LAPS SJK

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), LAPS SJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan. LAPS SJK merupakan garda terakhir dari rezim perlindungan konsumen dimana LAPS SJK diperlukan sebagai alat bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menyelesaikan sengketa dengan konsumen. LAPS SJK menawarkan layanan yang lebih murah, cepat, dan efektif (dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan) yang diharapkan akan mampu menjaga kepercayaan konsumen kepada LJK. Kepercayaan konsumen merupakan kunci penting bagi LJK untuk dapat berkembang secara stabil.

Untuk menjalankan fungsinya yaitu penyelesaian sengketa, LAPS SJK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1 Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen;
- 2 Memberikan konsultasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;
- 3 Melakukan penelitian dan pengembangan layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;
- 4 Membuat peraturan dalam rangka penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan;
- 5 Melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi perlindungan konsumen baik nasional maupun internasional; dan
- 6 Melakukan pengembangan kompetensi mediator dan arbiter yang terdaftar pada LAPS SJK.

Kepercayaan merupakan dasar dan kunci yang harus dimiliki oleh setiap industri keuangan. Sehingga, LAPS SJK hadir untuk menjaga kepercayaan konsumen kepada LJK di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan hadirnya LAPS SJK adalah :

- 1 Menjadi Lembaga yang menangani pengaduan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
- 2 Memperkuat perlindungan konsumen;
- 3 Meningkatkan kepercayaan terhadap PUJK dan produknya (*Market Confidence*); dan
- 4 Mendukung perkembangan Sektor Jasa Keuangan, Kesejahteraan Konsumen dan Masyarakat.

Visi dan Misi



Untuk mencapai Visi tersebut, dibutuhkan langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan demi keberhasilan tujuan LAPS SJK. LAPS SJK memiliki 5 langkah konkret yang menjadi Misi, yaitu :



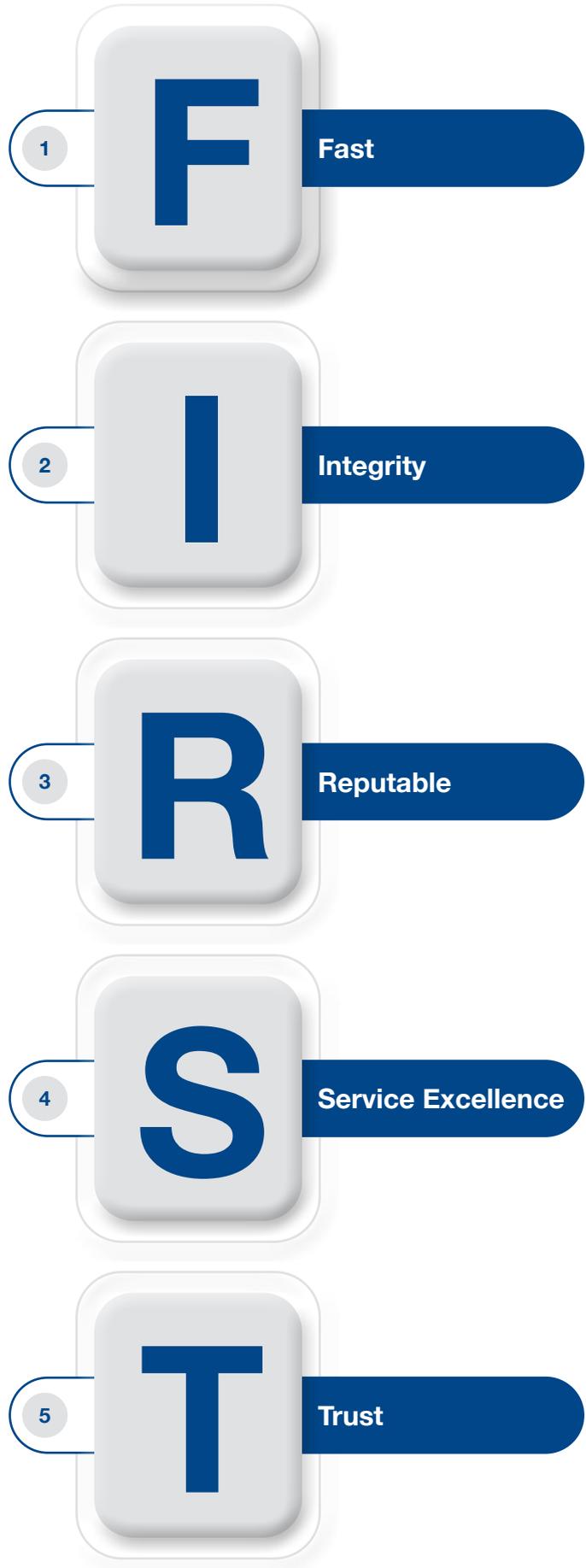
5

Nilai Dasar Lembaga (Core Values)



Dalam mencapai Visi dan Misi tersebut, setiap insan LAPS SJK wajib mengetahui, mengimplementasikan, dan menginternalisasikan Nilai Dasar Lembaga (*Core Values*) secara konsekuen, konsisten, dan bertanggung jawab sehingga membentuk suatu kebiasaan dan budaya kerja LAPS SJK yang selaras dengan *Core Values* Lembaga.

Core Values LAPS SJK terdiri dari 5 (lima) kata, yaitu *Fast*, *Integrity*, *Reputable*, *Service Excellence*, dan *Trust*, sehingga apabila disingkat dengan mengambil setiap huruf pertama dari 5 (lima) kata tersebut, akan terbentuk 1 (satu) kata yakni "**FIRST**". Kata "**FIRST**" ini diharapkan dapat menjadikan LAPS SJK menjadi pilihan utama bagi Konsumen dan PUJK dalam menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan.



Struktur Keanggotaan & Badan Pengawas LAPS SJK



19

Badan Pengawas LAPS SJK



KETUA

APPI

Suwandi Wiratno



PERBANAS

Fransiska Oei



PERBARINDO

Joko Suyanto



ASBISINDO

Hery Gunardi



ASBANDA

Supriyatno



PERBINA

Batara Sianturi



APEI

Lily Widjaja



AAJI

Budi Tampubulon



PDPLK

Nur Hasan K.



PPGI

Holilur Rohman



AFPI

Andrian Gunadi



HIMBARA *

Mucharom



BEI *

Iman Rachman



ADPI *

Ali Farmadi



AAUI *

Budi Herawan



AASI *

Rudi Kamdani



APPARINDO *

Yulius Bhayangkara



AMVESINDO *

Mardianto Eddi Danasuputro



ASIPPINDO *

Ivan Soeparno

- * 1. Pengawas Sudah mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan namun belum diangkat dalam Rapat Umum Anggota
- 2. Pengawas belum mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan OJK dan belum diangkat dalam Rapat Umum Anggota

Keterangan

Struktur Organisasi LAPS SJK

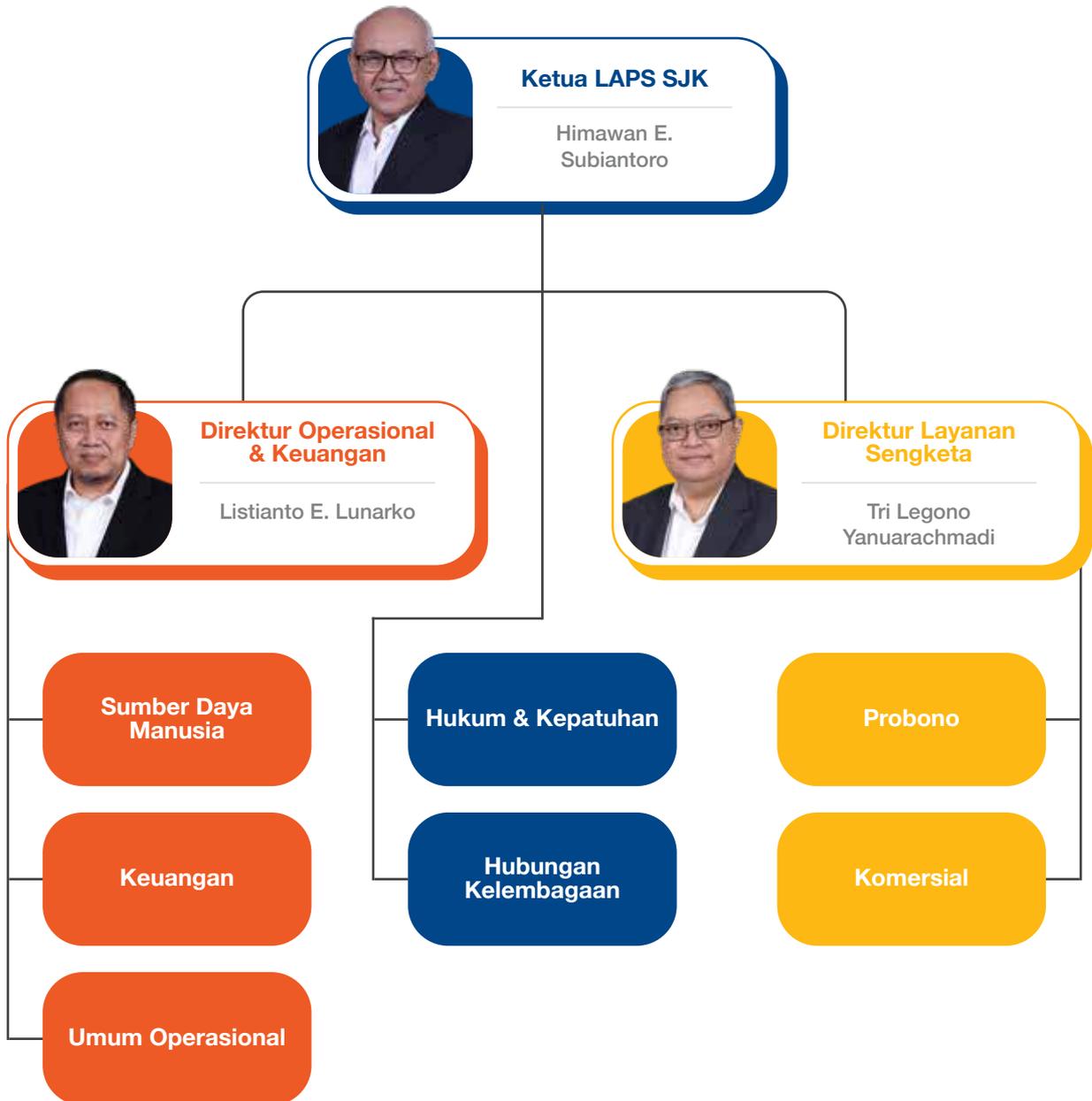




Foto Pengurus dan Pegawai



Jenis Layanan LAPS SJK

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PUJK, LAPS SJK sekurang-kurangnya menyediakan layanan mediasi dan arbitrase yang dilaksanakan berdasarkan prinsip independen, adil, efektif dan efisien, serta mudah diakses. Salah satu implementasi dari “prinsip mudah diakses” adalah disediakan prosedur penyelesaian sengketa di LAPS SJK secara daring (Online Dispute Resolution) sehingga memberikan kemudahan akses bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya secara virtual.

Adapun layanan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Mediasi LAPS SJK dilakukan melalui proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator LAPS SJK guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa cara memutus/memaksakan kehendak sehingga dapat tercapai kesepakatan perdamaian (*settlement agreement*) yang *win-win-solution*. Para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui mediasi di LAPS SJK harus terlebih dahulu memiliki kesepakatan untuk bermediasi di LAPS SJK melalui perjanjian mediasi.

Sementara itu, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dilakukan melalui pemeriksaan oleh arbiter tunggal/majelis arbitrase untuk memberikan putusan arbitrase sesuai prosedur acara yang ditentukan oleh LAPS SJK.

Jenis Layanan Berdasarkan Jenis Penyelesaian



01.

Mediasi



Mediasi berguna untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa cara memutus/ memaksakan kehendak sehingga dapat tercapai kesepakatan perdamaian (*settlement agreement*) yang win-win-solution. Layanan Mediasi diperuntukkan bagi sengketa yang dikategorikan sebagai *small claims* sehingga tidak dikenakan biaya penanganan sengketa (Pro Bono). Sehingga biaya penyelesaian sengketa ini menjadi beban Lembaga yang didapat terutama dari iuran Anggota.

Dalam layanan mediasi, terdapat prosedur yang harus ditempuh sebagai berikut:

Prosedur mediasi yang diatur dalam PerLAPS SJK 1/2021 harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

> Jangka waktu

 30 hari

Mediasi harus dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya penunjukan mediator. Jangka waktu ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak dan mediator namun dengan ketentuan bahwa perpanjangan tersebut tidak boleh lebih lama dari jangka waktu pertama.

> Bahasa

 Indonesia

Mediasi harus dilaksanakan dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersangkutan dan dengan ketentuan telah disetujui oleh pengurus LAPS SJK dan mediator. Atas kesepakatan dan biaya para pihak yang bersangkutan, setiap dokumen yang disampaikan oleh para pihak dalam bahasa mediasi yang berbeda akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

> Tempat**Kantor LAPS SJK/Tempat lain**

Tempat mediasi adalah kantor LAPS SJK atau tempat lain yang ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak dan disetujui oleh pengurus dan mediator. Apabila mediasi diselenggarakan secara online, maka tempat mediasi tersebut dianggap sebagai kantor sekretariat LAPS SJK.

> Perundingan, kaukus, dan dengar pendapat

Surat panggilan yang disampaikan kepada para pihak yang dimohon kehadirannya pada saat dimulainya perundingan harus disampaikan oleh sekretaris LAPS SJK atas nama mediator dalam waktu tujuh hari sejak mediator menerima penunjukan. Para pihak harus menghadiri semua pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator, dimana para pihak tersebut dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus. Namun, mediator dapat membatasi kehadiran para kuasa hukum tersebut.

Perundingan, kaukus, dan dengar pendapat juga dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka atau melalui teknologi informasi (seperti telepon, telekonferensi, dan/atau video konferensi).

02.

Arbitrase



Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para Pihak yang bersengketa, melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase untuk memberikan Putusan Arbitrase sesuai prosedur acara yang ditentukan oleh LAPS SJK. Layanan Arbitrase diperuntukkan bagi sengketa yang dikategorikan sebagai *commercial dispute*, sehingga Layanan ini dikenakan biaya penanganan sengketa. Oleh karena itu, LAPS SJK dapat memiliki potensi sumber pendapatan tambahan untuk operasional lembaga.

03.

Pendapat Mengikat



Pendapat Mengikat adalah suatu pendapat yang bersifat mengikat yang diberikan oleh LAPS SJK terhadap suatu Beda Pendapat sesuai dengan Peraturan dan Acara ini, dimana beda pendapat adalah perbedaan pendapat di antara Para Pihak dalam suatu perjanjian atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian, yaitu mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya:

1. Mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas;
2. Penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain.

Berdasarkan Nilai Sengketa :

1. Retail and Small Claims
2. Non-Retail and Small Claims

Berdasarkan Ragam Pihak :

1. Konsumen vs PUJK
2. PUJK vs konsumen
3. PUJK vs PUJK
4. Pihak-pihak lain



100⁺⁺

**Daftar Mediator
dan Arbiter tetap**





Kinerja Penyelesaian Sengketa



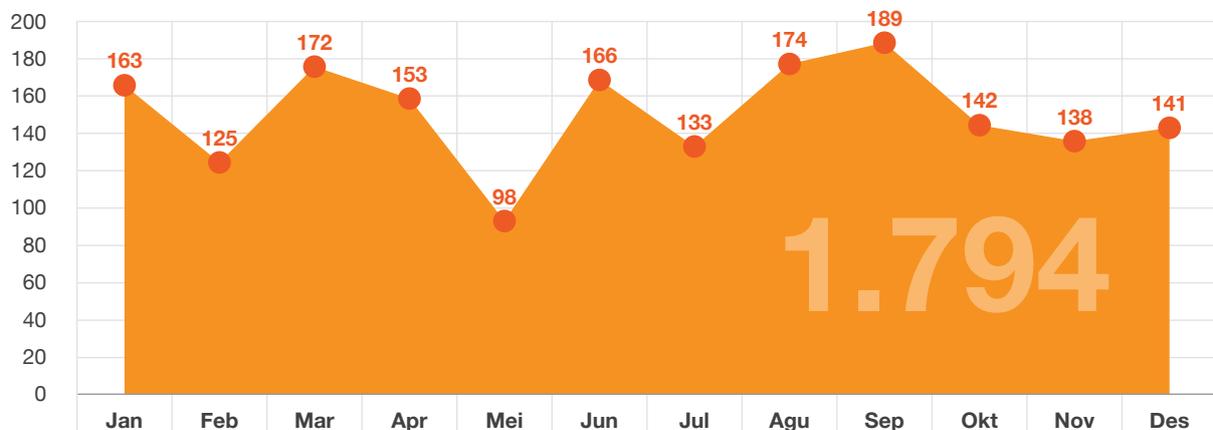
Jumlah pengaduan yang diterima Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) selama periode tahun 2022 adalah 1794 (seribu tujuh ratus sembilan puluh empat), atau tumbuh sebesar 32% secara *year on year*. Pengaduan ini berasal dari Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK). Jumlah pengaduan dari APPK mencapai 1725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) sementara pengaduan dari Non APPK berjumlah 69 (enam puluh sembilan).

1.794  **32%**
Pengaduan

1.725 Aplikasi Portal Perlindungan
Konsumen (APPK)
69 Non APPK

Pengaduan yang Masuk di Tahun 2022

(Month to Month)



Selama periode tahun 2022, terdapat 334 (tiga ratus tiga puluh empat) pengaduan pro bono yang telah diselesaikan melalui mediasi. Sementara itu, pengaduan komersial yang diselesaikan melalui mediasi komersial adalah 5 pengaduan dan 3 pengaduan yang telah selesai atau diputus melalui arbitrase.

●● Pengaduan Pro bono

334  **diselesaikan melalui mediasi**

Sebagai bagian dari Rezim Perlindungan Konsumen dan ujung tombak upaya Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, LAPS SJK berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan melalui layanan penyelesaian sengketa yaitu dengan mediasi dan arbitrase.

Beberapa upaya memaksimalkan pelayanan telah dilakukan oleh LAPS SJK pada tahun 2022, yakni sebagai berikut:

- 1 Percepatan verifikasi melalui APPK menjadi 1 (satu) hari verifikasi;
- 2 Pembentukan SK Pengurus mengenai Standar Waktu Penanganan Pengaduan dan Layanan Mediasi Perkara Retail & Small Claims;
- 3 Penguatan personel Verifikasi & Sekretaris Mediasi LAPS SJK;
- 4 Sosialisasi dan pembekalan terkait Independensi dan Imparsialitas layanan Mediator & Arbitrer; dan
- 5 Optimalisasi penjadwalan Mediasi LAPS SJK.

Berdasarkan sektor jasa keuangan, pengaduan dari sektor perbankan masih mendominasi jumlah pengaduan yang masuk di LAPS SJK. Secara statistik, dari 1.794 pengaduan pada tahun 2022, 4 (empat) sektor dengan pengaduan terbanyak adalah Perbankan dengan 822 pengaduan, *Fintech* dengan 358 Pengaduan, Pembiayaan dengan 302 pengaduan, dan Perasuransian dengan 266 Pengaduan.



Sektor dengan pengaduan terbanyak adalah



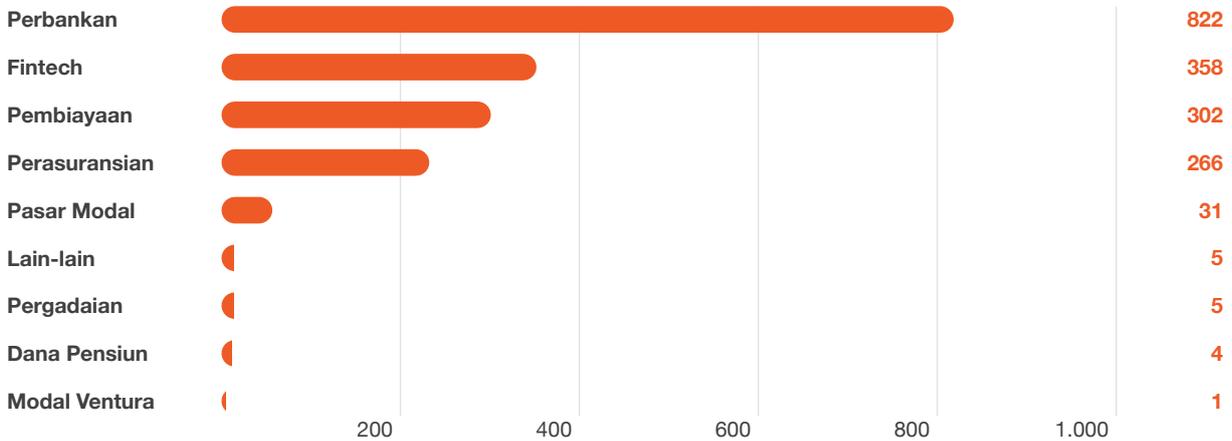
Perbankan
822
1 Pengaduan

Fintech
358
2 Pengaduan

Pembiayaan
302
3 Pengaduan

Perasuransian
266
4 Pengaduan

Grafik Pengaduan berdasarkan Sektor Jasa Keuangan



Adapun berdasarkan segi produk yang diadukan, pengaduan produk yang mendominasi adalah produk *fintech* (pinjaman multiguna), produk perbankan berupa kartu kredit/kartu pembiayaan dan tabungan, dan produk perasuransian PAYDI/Unit Link. Sementara berdasarkan jenis permasalahan, pengaduan diajukan karena persoalan klaim, permintaan restrukturisasi/relaksasi, dan *fraud* eksternal.

10 Besar Pengaduan berdasarkan Produk Jasa Keuangan

1 Januari - 31 Desember 2022







Demografi Provinsi Dari Konsumen Peta Indonesia

34

Kalimantan
Utara

1

18

Kalimantan
Timur

13

20

Sulawesi
Tengah

9

15

Sulawesi
Utara

16

29

Gorontalo

3

28

Papua Barat

4

26

Maluku

5

25

Sulawesi
Tenggara

7

19

Nusa
Tenggara
Timur

11

8

Sulawesi
Selatan

39

33

Sulawesi
Barat

1

31

Luar Negeri

1

Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan termasuk alasan penolakan

1 Januari - 31 Desember 2022

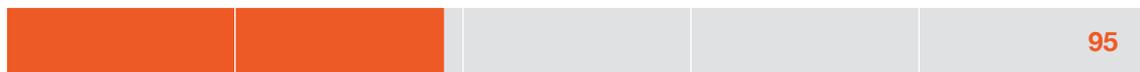
Kategori 1



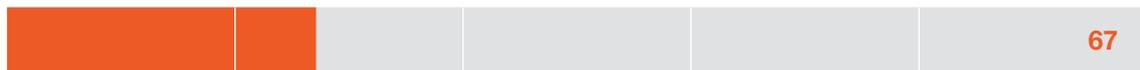
Kategori 8



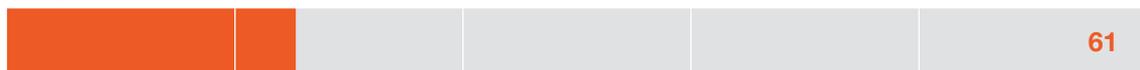
Kategori 4



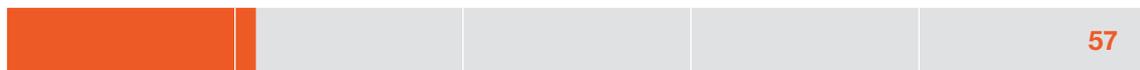
Kategori 2



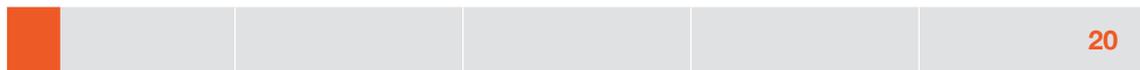
Kategori 7



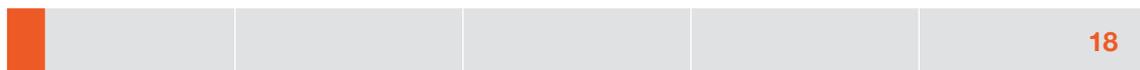
Kategori 5



Kategori 6



Kategori 9



Kategori 3



Keterangan

Kategori 1 : Berindikasi pidana

Kategori 2 : Berindikasi pelanggaran Market Conduct

Kategori 3 : Bersifat massal/massive yang tidak dapat diselesaikan secara parsial

Kategori 4 : Belum diselesaikan melalui proses IDR

Kategori 5 : Sedang diperiksa/ sudah diputus oleh instansi yang berwenang lainnya

Kategori 6 : Tidak ada kesepakatan menunjukan LAPS SJK sebagai forum penyelesaian Sengketa

Kategori 7 : Menyangkut pihak ketiga diluar SJK

Kategori 8 : Pengaduan menyangkut kebijakan atau standar industri yang diterapkan oleh semua PUJK sektor yang sama

Kategori 9 : Pengaduan tidak terkonfirmasi (tidak ada no kontak/alamat email konsumen, tidak ada tanggapan)

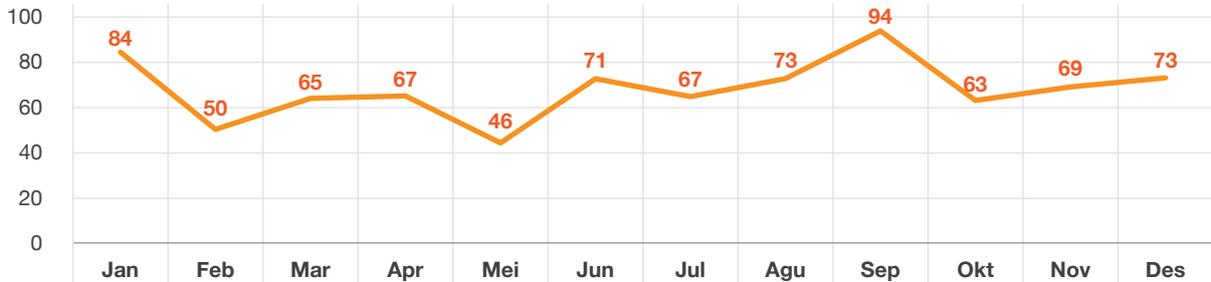
1

Perbankan

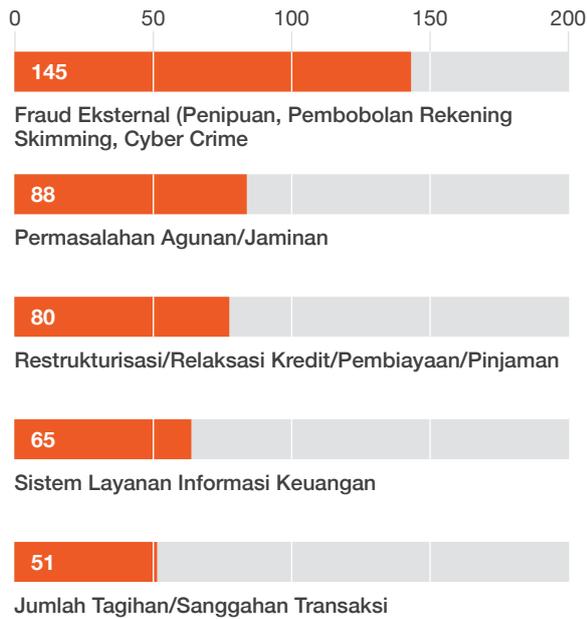
822

Pengaduan

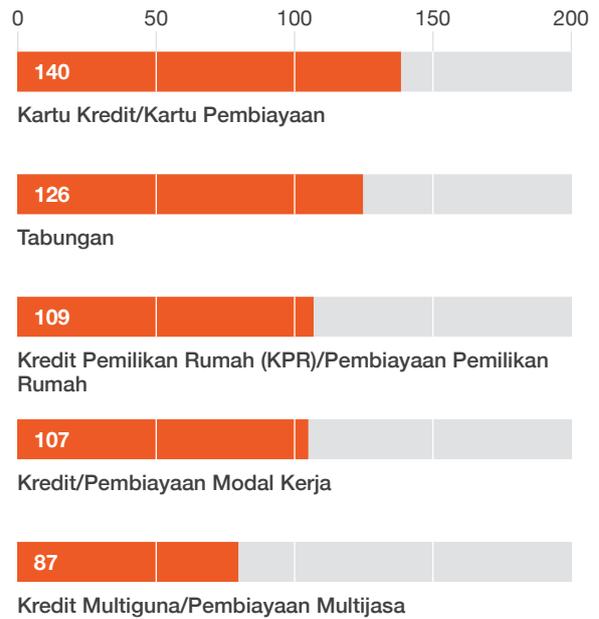
Grafik Pengaduan Perbulan Sektor Perbankan



5 Jenis Permasalahan Perbankan



5 Besar Jenis Produk Perbankan yang diadukan



5 Besar Domisili Provinsi Pengaduan dari Sektor Perbankan



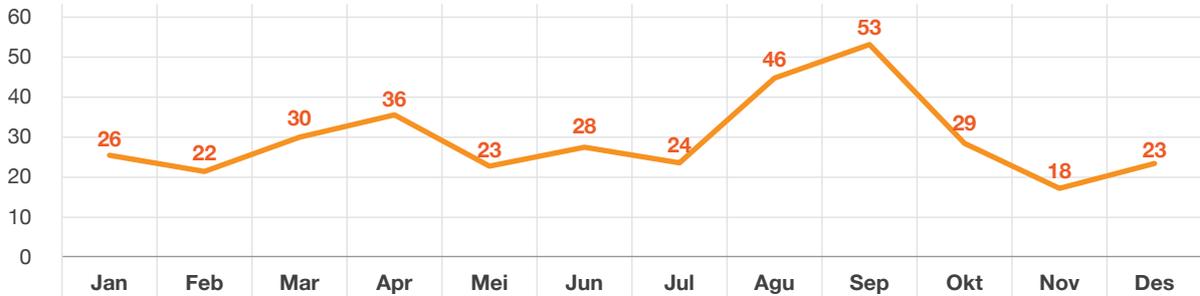
2

Fintech P2P Lending

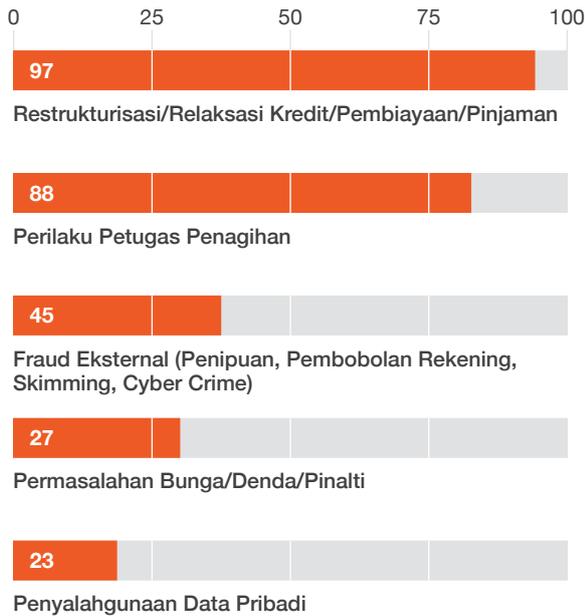
358

Pengaduan

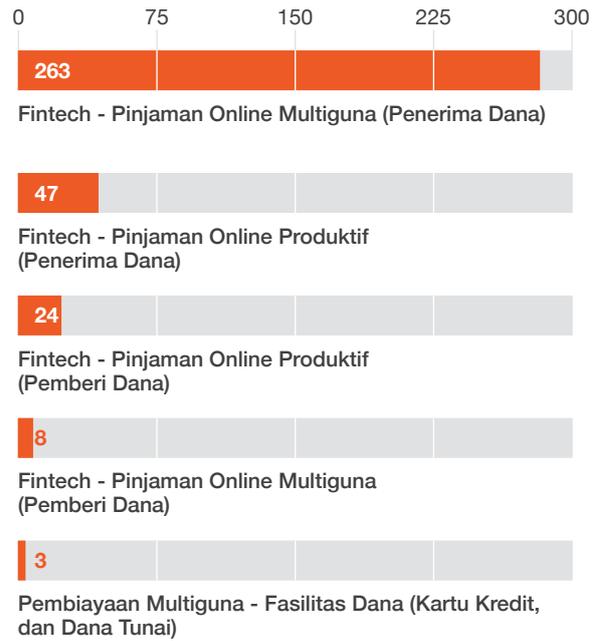
Grafik Pengaduan Perbulan Sektor Fintech



5 Jenis Permasalahan Sektor Fintech



5 Besar Jenis Produk Sektor Fintech



5 Besar Domisili Provinsi Pengaduan dari Sektor Perbankan

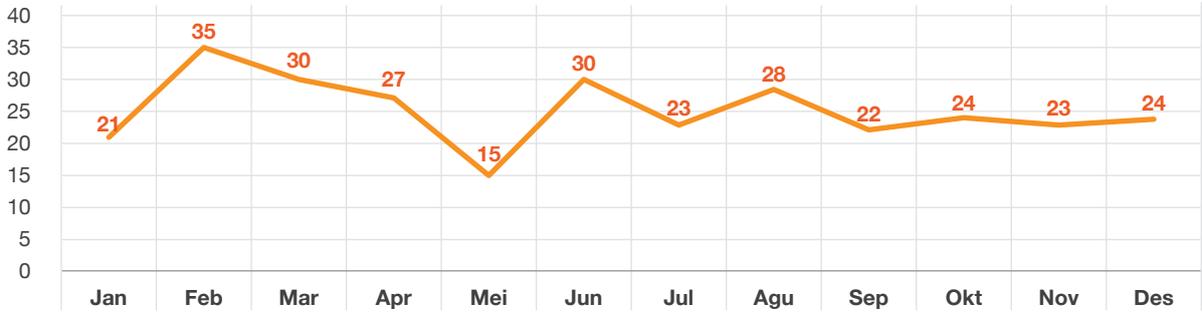


3

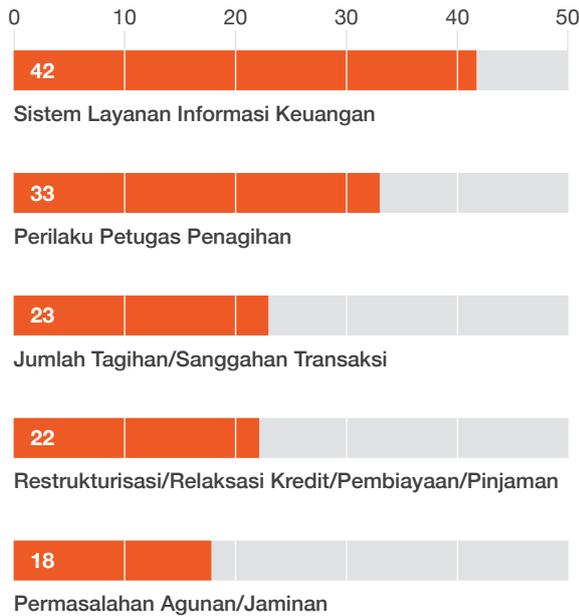
Pembiayaan

302 Pengaduan

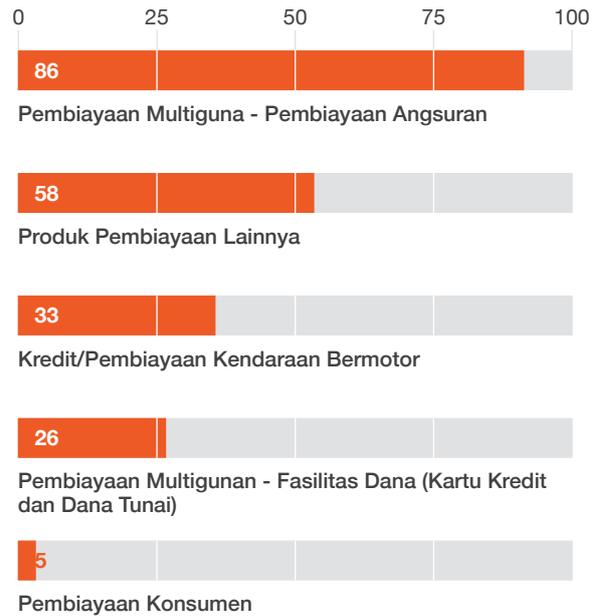
Grafik Pengaduan Perbulan Sektor Pembiayaan



5 Besar Jenis Permasalahan Sektor Pembiayaan



5 Besar Jenis Produk Sektor Pembiayaan



5 Besar Domisili Provinsi Pengaduan dari Sektor Perbankan



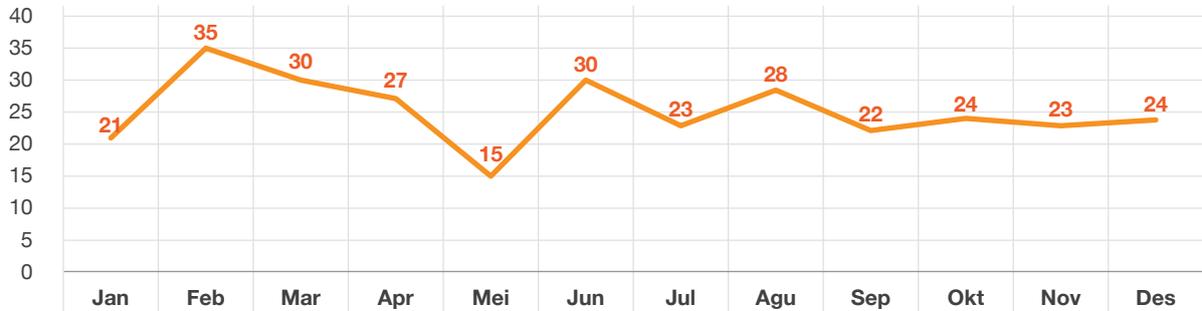
4

Asuransi

266

Pengaduan

Grafik Pengaduan Perbulan Sektor Asuransi



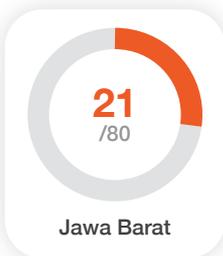
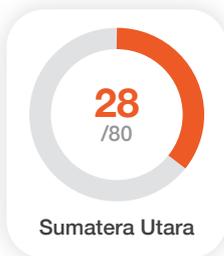
5 Jenis Permasalahan Sektor Asuransi



5 Besar Jenis Produk Sektor Asuransi



5 Besar Domisili Provinsi Pengaduan dari Sektor Asuransi



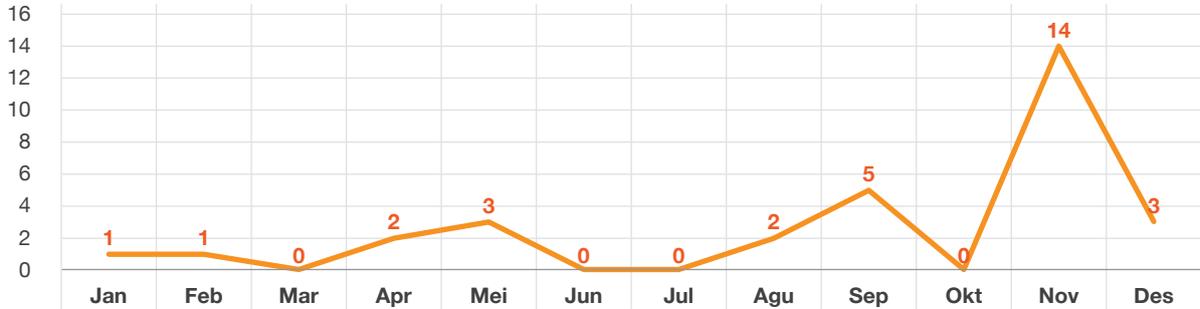
5

Pasar Modal

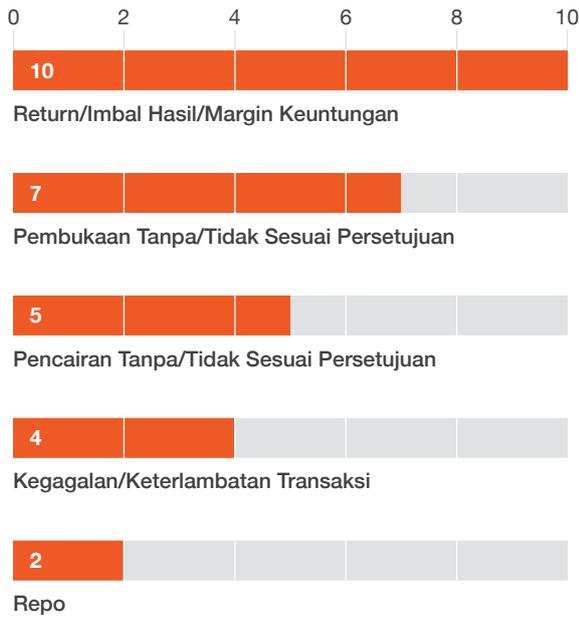
31

Pengaduan

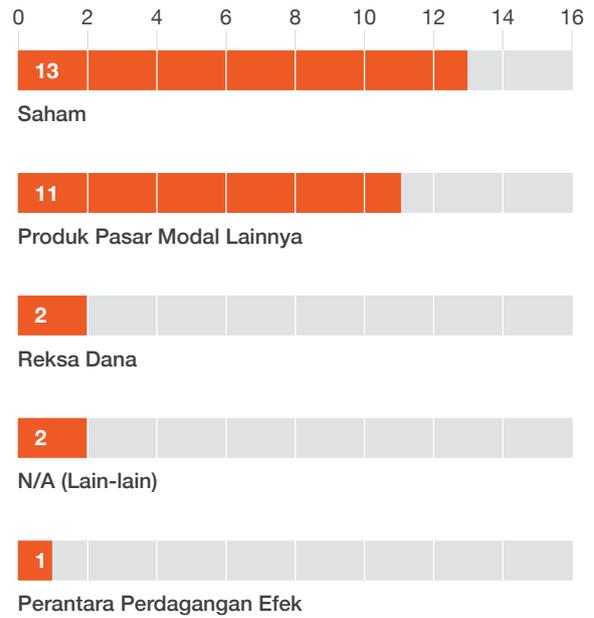
Grafik Pengaduan Perbulan Sektor Pasar Modal



5 Besar Jenis Permasalahan Terbanyak Sektor Pasar Modal



5 Besar Jenis Produk Terbanyak Sektor Pasar Modal



5 Besar Domisili Provinsi Pengaduan dari Sektor Pasar Modal



5

Dana Pensiun & Pergadaian

Pengaduan

Grafik Pengaduan Perbulan Sektor Dana Pensiun



Jenis Permasalahan Sektor Dana Pensiun



Persoalan Klaim

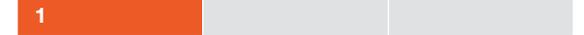


Perubahan/Pemutusan Akad/Perjanjian/Kontrak

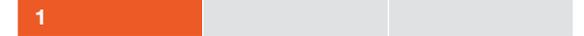
Jenis Produk Sektor Dana Pensiun



Dana Pensiun Lembaga Keuangan - Manfaat Pensiun



Dana Pensiun Pemberi Kerja - Manfaat Pensiun



Dana Pensiun Pemberi Kerja - Manfaat Lain - Dana Kompensasi Pascakerja

Domisili Provinsi Pengaduan dari Sektor Dana Pensiun



DKI Jakarta



Jawa Barat



Jawa Timur

Grafik Pengaduan Perbulan Sektor Pergadaian



Jenis Permasalahan Sektor Pergadaian



Persoalan Klaim



Permintaan Pengembalian Dana



Permasalahan Bunga/Denda/Pinalti



Permasalahan Agunan/Jaminan



Keberatan Lelang

Jenis Produk Sektor Pergadaian



Pergadaian - Pinjaman Gadai



Pinjaman Mikro

Domisili Provinsi Pengaduan dari Sektor Pergadaian



NTB



Sumut



Kalsel



DKI Jakarta

Kepatuhan Anggota Dalam Melaksanakan Kesepakatan/Putusan

Dari hasil *monitoring* selama periode tahun 2022, berikut merupakan daftar kepatuhan Anggota dalam melaksanakan hasil kesepakatan Mediasi dan putusan Arbitrase.

Hasil *Monitoring* Kesepakatan Perdamaian Mediasi:

No.	Nomor Register Perkara	Tanggal Kesepakatan Penyelesaian	Sektor	Hasil Mediasi	Hasil Monitoring
1	022/MED-013/LAPSSJK.03/XII/2021	11 Juli 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
2	026/MED-016/LAPSSJK.01/I/2022	14 Februari 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
3	029/MED-019/LAPSSJK.03/I/2022	17 Februari 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
4	032/MED-022/LAPSSJK.03/I/2022	7 Maret 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
5	033/MED-023/LAPSSJK.04/II/2022	15 Maret 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
6	034/MED-024/LAPSSJK.04/II/2022	8 Maret 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
7	035/MED-025/LAPSSJK.04/II/2022	11 Maret 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
8	036/MED-026/LAPSSJK.03/II/2022	24 Maret 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
9	045/MED-035/LAPSSJK.04/II/2022	23 Maret 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
10	046/MED-036/LAPSSJK.01/II/2022	5 Juli 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
11	049/MED-039/LAPSSJK.03/III/2022	22 April 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
12	057/MED-047/LAPSSJK.01/III/2022	6 Juli 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
13	061/MED-051/LAPSSJK.03/III/2022	18 April 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
14	062/MED-052/LAPSSJK.01/III/2022	27 Mei 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
15	078/MED-68/LAPSSJK.04/IV/2022	8 Juni 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
16	080/MED-70/LAPSSJK.04/IV/2022	20 Juni 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
17	082/MED-72/LAPSSJK.01/IV/2022	18 Mei 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
18	084/MED-74/LAPSSJK.01/IV/2022	26 Juli 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
19	089/MED-79/LAPSSJK.08/IV/2022	26 Juli 2022	Penjaminan	Damai	Sudah dilaksanakan
20	092/MED-82/LAPSSJK.03/IV/2022	19 Mei 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
21	093/MED-83/LAPSSJK.03/IV/2022	24 Juni 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
22	095/MED-85/LAPSSJK.04/IV/2022	27 Mei 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
23	102/MED-92/LAPSSJK.01/IV/2022	30 Mei 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
24	105/MED-95/LAPSSJK.04/IV/2022	25 Mei 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
25	106/MED-96/LAPSSJK.01/IV/2022	30 Mei 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
26	107/MED-97/LAPSSJK.01/IV/2022	17 Mei 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
27	111/MED-101/LAPSSJK.03/IV/2022	7 Juni 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
28	113/MED-103/LAPSSJK.04/IV/2022	12 Agustus 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
29	117/Med-107/LAPSSJK.01/IV/2022	18 Mei 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan

No.	Nomor Register Perkara	Tanggal Kesepakatan Penyelesaian	Sektor	Hasil Mediasi	Hasil Monitoring
30	146/MED-109/LAPSSJK.01/IV/2022	16 Juni 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
31	147/MED-110/LAPSSJK.01/IV/2022	3 Juni 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
32	148/MED-111/LAPSSJK.03/V/2022	17 Juni 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
33	150/MED-113/LAPSSJK.04/V/2022	13 Juli 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
34	153/MED-116/LAPSSJK.04/V/2022	27 Juni 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
35	156/MED-116/LAPSSJK.04/V/2022	25 Agustus 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
36	157/MED-117/LAPSSJK.01/V/2022	20 Juli 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
37	160/MED-119/LAPSSJK.01/V/2022	14 Juli 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
38	162/MED-121/LAPSSJK.01/V/2022	24 Juni 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
39	165/MED-124/LAPSSJK.09/V/2022	22 Juni 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
40	170/MED-129/LAPSSJK.01/V/2022	12 Juli 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
41	171/MED-130/LAPSSJK.04/V/2022	20 Juni 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
42	174/MED-133/LAPSSJK.04/VI/2022	29 Agustus 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
43	176/MED-134/LAPSSJK.01/VI/2022	22 Juni 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
44	177/MED-135/LAPSSJK.01/VI/2022	1 Agustus 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
45	178/MED-136/LAPSSJK.01/VII/2022	07 September 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
46	180/MED-137/LAPSSJK.01/VII/2022	14 Juli 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
47	181/MED-138/LAPSSJK.03/VII/2022	21 Juli 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
48	182/MED-139/LAPSSJK.01/VII/2022	15 Juli 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
49	184/MED-141/LAPSSJK.04/VII/2022	1 Agustus 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
50	185/MED-142/LAPSSJK.01/VII/2022	15 Juli 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
51	188/MED-145/LAPSSJK.04/VII/2022	3 Agustus 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
52	189/MED-146/LAPSSJK.03/VII/2022	23 Agustus 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
53	192/MED-149/LAPSSJK.04/VII/2022	15 Juli 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
54	193/MED-150/LAPSSJK.01/VII/2022	15 Juli 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
55	194/MED-151/LAPSSJK.03/VII/2022	20 Juli 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
56	196/MED-153/LAPSSJK.01/VII/2022	22 Juli 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
57	197/MED-154/LAPSSJK.04/VII/2022	4 Agustus 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
58	200/MED-157/LAPSSJK.03/VII/2022	19 Agustus 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
59	209/MED-166/LAPSSJK.09/VII/2022	19 Agustus 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
60	211/MED-168/LAPSSJK.03/VII/2022	4 Oktober 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
61	218/MED-175/LAPSSJK.09/VII/2022	9 Agustus 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
62	220/MED-177/LAPSSJK.04/VII/2022	5 Agustus 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
63	224/MED-181/LAPSSJK.04/VII/2022	25 Agustus 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
64	225/MED-182/LAPSSJK.04/VII/2022	16 September 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
65	227/MED-184/LAPSSJK.01/VII/2022	10 Agustus 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
66	228/MED-185/LAPSSJK.04/VIII/2022	05 September 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan

No.	Nomor Register Perkara	Tanggal Kesepakatan Penyelesaian	Sektor	Hasil Mediasi	Hasil Monitoring
67	231/FAS-188/LAPSSJK.01/VIII/2022	11 Agustus 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
68	233/MED-190/LAPSSJK.01/VIII/2022	11 Agustus 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
69	235/MED-192/LAPSSJK.03/VIII/2022	20 September 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
70	236/MED-193/LAPSSJK.04/VIII/2022	23 September 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
71	237/MED-194/LAPSSJK.04/VIII/2022	19 Agustus 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
72	242/MED-199/LAPSSJK.03/VIII/2022	29 Agustus 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
73	243/MED-200/LAPSSJK.01/VIII/2022	31 Agustus 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
74	244/MED-201/LAPSSJK.03/VIII/2022	01 September 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
75	248/MED-205/LAPSSJK.01/VIII/2022	26 Agustus 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
76	249/FAS-206/LAPSSJK.04/VIII/2022	31 Agustus 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
77	252/FAS-208/LAPSSJK.04/VIII/2022	25 Agustus 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
78	255/MED-211/LAPSSJK.03/VIII/2022	08 September 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
79	263/FAS-217/LAPSSJK.09/VIII/2022	02 September 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
80	264/MED-218/LAPSSJK.03/VIII/2022	16 November 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
81	265/MED-219/LAPSSJK.01/VIII/2022	7 Oktober 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
82	267/MED-221/LAPSSJK.01/VIII/2022	26 September 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
83	268/MED-222/LAPSSJK.01/VIII/2022	13 September 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
84	269/MED-223/LAPSSJK.09/VIII/2022	09 September 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
85	270/MED-224/LAPSSJK.09/VIII/2022	09 September 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
86	274/MED-228/LAPSSJK.09/IX/2022	26 September 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
87	276/MED-230/LAPSSJK.01/IX/2022	21 September 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
88	279/MED-233/LAPSSJK.03/IX/2022	29 September 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
89	285/MED-239/LAPSSJK.09/IX/2022	16 September 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
90	290/MED-244/LAPSSJK.03/IX/2022	13 September 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
91	292/MED-246/LAPSSJK.01/IX/2022	15 September 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
92	293/MED-247/LAPSSJK.01/IX/2022	20 September 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
93	294/MED-248/LAPSSJK.01/IX/2022	30 September 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
94	298/MED-252/LAPSSJK.03/IX/2022	28 September 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
95	304/MED-258/LAPSSJK.03/IX/2022	5 Desember 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
96	305/MED-259/LAPSSJK.01/IX/2022	11 Oktober 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
97	307/MED-261/LAPSSJK.01/IX/2022	22 September 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
98	308/MED-262/LAPSSJK.09/IX/2022	28 September 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
99	311/MED-265/LAPSSJK.09/IX/2022	19 Oktober 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
100	314/MED-268/LAPSSJK.03/IX/2022	16 November 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
101	316/MED-270/LAPSSJK.01/IX/2022	5 Oktober 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
102	319/MED-273/LAPSSJK.01/IX/2022	09 November 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
103	320/MED-274/LAPSSJK.04/IX/2022	31 Oktober 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan

No.	Nomor Register Perkara	Tanggal Kesepakatan Penyelesaian	Sektor	Hasil Mediasi	Hasil Monitoring
104	321/MED-275/LAPSSJK.04/IX/2022	10 Oktober 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
105	322/MED-276/LAPSSJK.04/IX/2022	7 Oktober 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
106	323/MED-277/LAPSSJK.03/IX/2022	24 Oktober 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
107	324/MED-278/LAPSSJK.03/IX/2022	5 Oktober 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
108	326/MED-280/LAPSSJK.04/IX/2022	7 Oktober 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
109	330/MED-284/LAPSSJK.01/IX/2022	02 November 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
110	335/MED-289/LAPSSJK.03/X/2022	10 Oktober 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
111	336/MED-290/LAPSSJK.03/X/2022	10 Oktober 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
112	337/MED-291/LAPSSJK.03/X/2022	12 Oktober 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
113	339/MED-293/LAPSSJK.04/X/2022	27 Oktober 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
114	345/MED-299/LAPSSJK.09/X/2022	17 Oktober 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
115	346/MED-300/LAPSSJK.01/X/2022	19 Oktober 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
116	352/MED-306/LAPSSJK.04/X/2022	16 November 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
117	354/MED-308/LAPSSJK.09/X/2022	20 Oktober 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
118	355/MED-309/LAPSSJK.09/X/2022	21 Oktober 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
119	356/MED-310/LAPSSJK.09/X/2022	24 Oktober 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
120	357/MED-311/LAPSSJK.09/X/2022	01 November 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
121	358/MED-312/LAPSSJK.01/X/2022	20 Oktober 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
122	361/MED-315/LAPSSJK.01/X/2022	03 November 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
123	364/MED-318/LAPSSJK.01/X/2022	03 November 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
124	365/MED-319/LAPSSJK.01/X/2022	31 Oktober 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
125	367/MED-321/LAPSSJK.01/X/2022	09 November 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
126	368/MED-322/LAPSSJK.01/X/2022	15 November 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
127	370/MED-324/LAPSSJK.04/X/2022	17 November 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
128	371/MED-325/LAPSSJK.04/X/2022	09 November 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
129	372/MED-326/LAPSSJK.04/X/2022	17 November 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
130	375/MED-329/LAPSSJK.03/X/2022	25 November 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
131	376/MED-330/LAPSSJK.09/X/2022	18 November 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
132	377/MED-331/LAPSSJK.03/X/2022	17 November 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
133	379/MED-333/LAPSSJK.04/XI/2022	15 November 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
134	381/MED-335/LAPSSJK.09/XI/2022	17 November 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
135	382/MED-336/LAPSSJK.01/XI/2022	29 November 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
136	384/MED-337/LAPSSJK.04/XI/2022	30 November 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
137	387/MED-340/LAPSSJK.09/XI/2022	1 Desember 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
138	388/MED-341/LAPSSJK.09/XI/2022	28 November 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
139	389/MED-342/LAPSSJK.03/XI/2022	24 November 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
140	390/MED-343/LAPSSJK.09/XI/2022	22 November 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan

No.	Nomor Register Perkara	Tanggal Kesepakatan Penyelesaian	Sektor	Hasil Mediasi	Hasil Monitoring
141	391/MED-344/LAPSSJK.09/XI/2022	25 November 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
142	392/MED-345/LAPSSJK.01/XI/2022	22 November 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
143	394/MED-347/LAPSSJK.03/XI/2022	23 November 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
144	395/MED-348/LAPSSJK.04/XI/2022	19 Desember 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
145	398/MED-351/LAPSSJK.04/XI/2022	9 Desember 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
146	400/MED-353/LAPSSJK.03/XI/2022	5 Desember 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
147	401/MED-354/LAPSSJK.09/XI/2022	28 November 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
148	405/MED-358/LAPSSJK.03/XI/2022	30 November 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
149	406/MED-359/LAPSSJK.01/XI/2022	20 Desember 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
150	416/MED-369/LAPSSJK.09/XI/2022	15 Desember 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
151	417/MED-370/LAPSSJK.03/XI/2022	20 Desember 2022	Fintech	Damai	Sudah dilaksanakan
152	419/MED-372/LAPSSJK.01/XI/2022	15 Desember 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
153	420/MED-373/LAPSSJK.01/XI/2022	6 Desember 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan
154	421/MED-374/LAPSSJK.01/XI/2022	16 Desember 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
155	423/MED-376/LAPSSJK.09/XII/2022	20 Desember 2022	Asuransi	Damai	Sudah dilaksanakan
156	426/MED-379/LAPSSJK.01/XII/2022	20 Desember 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
157	430/MED-381/LAPSSJK.04/XII/2022	27 Desember 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
158	431/MED-382/LAPSSJK.01/XII/2022	21 Desember 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
159	433/MED-384/LAPSSJK.01/XII/2022	28 Desember 2022	Perbankan	Damai	Sudah dilaksanakan
160	442/MED-392/LAPSSJK.01/XII/2022	22 Desember 2022	Pembiayaan	Damai	Sudah dilaksanakan

Hasil Monitoring Putusan Arbitrase:

No.	Nomor Register Perkara	Tanggal Putusan	Sektor	Hasil Kesepakatan	Hasil Monitoring
1	021/ARB-001/LAPSSJK.03/XII/2021	30 Mei 2022	Asuransi	Putusan	Sudah dilaksanakan
2	023/ARB-002/LAPSSJK.02/XII/2021	22 Agustus 2022	Pasar Modal	Putusan	Sudah dilaksanakan
3	070/ARB-003/LAPSSJK.02/IV/2022	5 Oktober 2022	Pasar Modal	Putusan	Sudah dilaksanakan



Kinerja Lembaga 2022



01.

Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2022

A. Penerimaan (Iuran Anggota)

Laporan Realisasi Vs RKAT 2022 (Audited)							Posisi 31 Desember 2022		
Mata Uang: Indonesian Rupiah									
KET.	RKAT 2021	Realisasi 2021 (Audited)		Kekurangan (Kelebihan) Dana 2021	RKAT 2022	Realisasi 2022 (Audited)		Kekurangan (Kelebihan) Dana	
		Rp.	%			Rp.	%	2021	2022
	1	2	(3 = 2 : 1)	(4 = 1 - 2)	5	6	(7 = 6 : 5)	12	13
Penerimaan									
a. Iuran Pendirian	1,691,250,000	1,627,359,960	96.22%	63,890,040	-	-	0.00%	63,890,040	-
b. Iuran Tahunan	8,840,848,000	8,735,421,622	98.81%	105,426,378	8,840,848,000	8,833,250,399	99.91%	57,816,278	66,435,035
Jumlah	10,532,098,000	10,362,781,582	98.39%	169,316,418	8,840,848,000	8,833,250,399	99.91%	121,706,318	66,435,035

Keterangan:

- Kekurangan penerimaan iuran tahun 2021 sebesar Rp121.706.318,- yang terdiri dari:
 - Piutang iuran sebesar Rp92.940.400,-
 - Adjustment selisih distribusi iuran tahun 2021 sebesar Rp28.765.918,-.
- Realisasi penerimaan iuran anggota tahun 2022 sebesar Rp8.833.250.399,- atau sebesar 99,91% dari anggaran tahun 2022 yang terdiri dari:
 - Penerimaan iuran anggota tahun 2022 sebesar Rp8.785.640.299,-
 - Penerimaan piutang iuran tahun 2021 sebesar Rp47.610.100,-

Rekapitulasi Kepatuhan Anggota Pembayaran Iuran Anggota								
No	Perusahaan	Iuran Keanggotaan		Pembayaran		% Iuran Tahunan	Iuran Belum Bayar	
		Total Anggota	Iuran Tahunan	Total Anggota	Iuran Tahunan		Total Anggota	Iuran Tahunan
1	Perbankan	132	3.634.000.000	130	3.603.889.200	99,17%	2	30.000.000
2	Pasar Modal	207	1.584.806.036	206	1.583.806.036	99,94%	1	1.000.000
3	Asuransi	367	2.072.225.266	361	2.069.640.231	99,88%	6	2.585.035
4	Pembiayaan	155	1.269.500.000	153	1.251.300.000	98,57%	2	18.200.000
5	Pergadaian	92	71.525.000	88	68.675.000	96,30%	4	2.650.000
6	Modal Ventura	38	91.500.000	32	79.500.000	86,89%	6	12.000.000
7	Dana Pensiun	213	76.303.851	213	76.303.851	100,00%	0	-
8	Penjaminan	22	32.101.241	22	32.101.241	100,00%	0	-
9	Fintech	102	20.224.739	102	20.224.739	100,00%	0	-
	Total	1.328	8.852.186.133	1307	8.785.640.299	99,91%	21	66.435.035

Hal ini menunjukkan kepatuhan anggota dalam membayar iuran sangat tinggi dan tentu saja kondisi seperti ini sangat baik untuk LAPS SJK. Adapun anggota yang belum membayar iuran di tahun 2021 dan 2022 adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang sedang dalam pembekuan kegiatan usaha atau sudah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Penggunaan (Iuran Anggota)

Laporan Realisasi Vs RKAT 2022 (Audited)

Posisi 31 Desember 2022

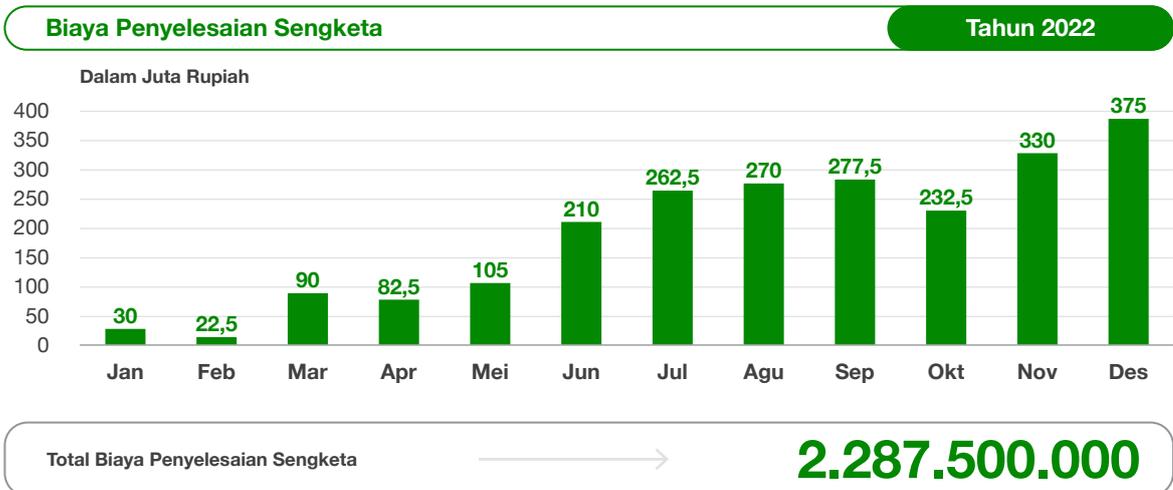
Mata Uang : Indonesian Rupiah

KET.	RKAT 2021	Realisasi 2021 (Audited)		Kelebihan (Kekurangan) Dana 2021	RKAT 2022	Realisasi 2022 Audited		Kelebihan (Kekurangan) Dana	
		Rp.	%			Rp.	%	2021	2022
	1	2	(3 = 2 : 1)	(4 = 1 - 2)	5	6	(7 = 6 : 5)	12	13
Penggunaan									
a. Pendirian Kantor	1,691,250,000	992,000,000	58.65%	699,250,000	-	814,781,000	100.00%	-	-
b. Biaya Program									
Biaya PS	1,854,250,000	45,000,000	2.43%	1,809,250,000	1,854,250,000	2,287,500,000	123.37%	1,376,000,000	-
c. Biaya Non Program									
Biaya SDM	5,049,448,000	2,708,912,131	53.65%	2,340,535,869	5,295,460,000	4,055,291,302	76.58%	2,305,899,782	1,028,792,785
Biaya AU	1,687,150,000	787,491,633	46.68%	899,658,367	1,722,000,000	2,620,944,503	152.20%	713,864	-
Biaya RUA	250,000,000	46,681,700	18.67%	203,318,300	250,000,000	197,408,967	78.96%	171,594,235	52,591,033
Jumlah	10,532,098,000	4,580,085,464	43.49%	5,952,012,536	9,121,710,000	9,975,925,772	109.36%	3,854,207,881	1,081,383,818

Keterangan:

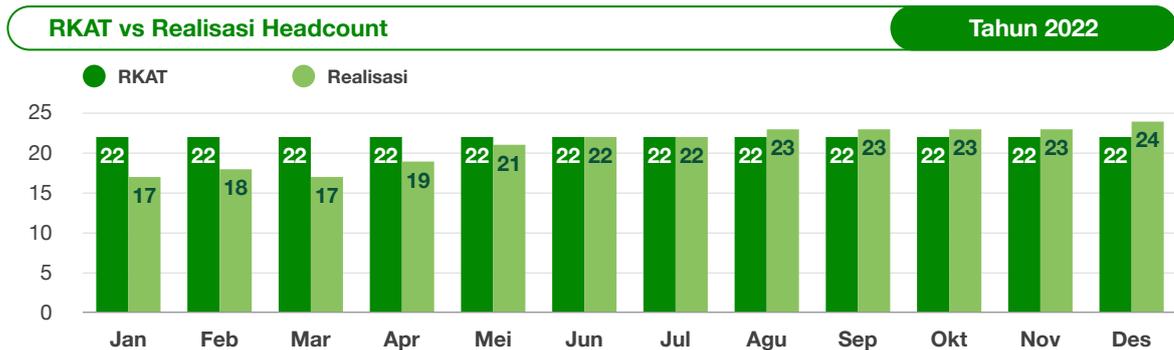
- Optimalisasi kelebihan dana tahun 2021 pada periode 2022 adalah sebagai berikut:
 - Biaya Penyelesaian Sengketa sebesar Rp433.250.000,-
 - Biaya Rapat Umum Anggota sebesar Rp31.724.065,-
 - Biaya Sumber Daya Manusia sebesar Rp34.636.087,-
 - Biaya Administrasi dan Umum sebesar Rp898.944.503,-
- Realisasi Penggunaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - Biaya Penyelesaian Sengketa sebesar Rp2.287.500.000,- yang terdiri dari:
 - Biaya Penyelesaian Sengketa tahun 2022 sebesar Rp1.854.250.000,- atau sebesar 100% dari anggaran Biaya Penyelesaian Sengketa tahun 2022.
 - Optimalisasi Biaya Penyelesaian Sengketa tahun 2021 sebesar Rp433.250.000,-

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja LAPS SJK dalam menangani penyelesaian sengketa pro bono sudah meningkat jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini didukung oleh jumlah SDM di Divisi Penyelesaian sengketa sudah cukup memadai sesuai dengan *Man Power Planning* LAPS SJK. Berikut adalah grafik Biaya Penyelesaian Sengketa (*Pro Bono*) tahun 2022:



- b. Biaya Sumber Daya Manusia sebesar Rp4.055.291.302 atau sebesar 76,58% dari anggaran Biaya Sumber Daya Manusia tahun 2022 yang terdiri dari:
 - Biaya Sumber Daya Manusia tahun 2022 sebesar Rp4.020.655.215,- dan di dalam kelebihan dana tahun 2022 terdapat cadangan Imbalan Masa Kerja sebesar Rp450.809.453,- yang akan dikeluarkan pada saat pengurus dan pegawai pensiun dan/atau mengundurkan diri setelah masa kerja tertentu.
 - Optimalisasi Biaya Sumber Daya Manusia tahun 2021 sebesar Rp34.636.087,- yang digunakan untuk penambahan 2 (dua) *headcounts* yaitu admin penyelesaian sengketa dan staf penyelesaian sengketa.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja LAPS SJK sudah cukup optimal dalam melakukan rekrutmen SDM di tahun 2022, serta efektif dan efisien dalam menggunakan Anggaran Biaya Sumber Daya Manusia dimana *Man Power Planning* Tahun 2022 hanya 22 SDM namun realisasi tahun 2022 sebanyak 24 SDM. Berikut adalah realisasi rekrutmen SDM tahun 2022:



- c. Biaya Administrasi dan Umum sebesar Rp2.620.944.503,- atau sebesar 152,20% dari anggaran Biaya Administrasi dan Umum tahun 2022 yang terdiri dari:
 - Biaya Administrasi dan Umum sebesar Rp1.698.377.334,- atau sebesar 100% dari penerimaan iuran anggota untuk Biaya Administrasi dan Umum.
 - Optimalisasi kelebihan dana tahun 2021 sebesar Rp898.944.503,- yang digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana LAPS SJK, antara lain: peningkatan prasarana ruang sidang arbitrase, penambahan ruang kerja pegawai, pengadaan kendaraan bermotor, penyelenggaraan *mid year challenge session*, FGD evaluasi peraturan LAPS SJK, *capacity building*, *management review & setting new target 2023* dan biaya operasional LAPS SJK.
 - Pengalihan anggaran (*budget switching*) dari penerimaan lainnya tahun 2022 sebesar Rp23.622.666 untuk biaya operasional LAPS SJK.

Meningkatnya Biaya Administrasi dan Umum sejalan dengan: (1) meningkatnya seluruh kegiatan LAPS SJK terutama dalam hal jumlah penyelesaian sengketa baik pro bono maupun komersial; (2) meningkatnya SDM LAPS SJK; (3) meningkatnya kerjasama LAPS SJK dengan Lembaga sejenis dan Lembaga terkait.

- d. Biaya Rapat Umum Anggota sebesar Rp197.408.967,00 atau sebesar 78,96% dari anggaran Biaya Rapat Umum Anggota sebesar Rp250.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran Biaya Rapat Umum Anggota kinerja LAPS SJK efektif dan efisien dimana realisasi tersebut digunakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) pada tahun 2022.

C. Penerimaan Lainnya

Laporan Realisasi Vs RKAT 2022 (Audited)					Posisi 31 Desember 2022			
Mata Uang : Indonesian Rupiah								
KET.	RKAT 2021	Realisasi 2021 (Audited)		Kelebihan (Kekurangan) Dana 2021	RKAT 2022	Realisasi 2022 (Audited)		Kelebihan (Kekurangan) Dana 2022
		Rp.	%			Rp.	%	
	1	2	(3 = 2 : 1)	(4 = 2 - 1)	5	6	(7 = 6 : 5)	(8 = 6 - 5)
Penerimaan								
a. Penerimaan kasus komersial	-	31,163,576	100%	31,163,576	1,275,592,000	2,278,707,707	179%	1,003,115,707
b. Penerimaan webinar	-	-	0%	-	-	119,068,000	100%	119,068,000
c. Penerimaan non operasional	-	65,587,470	100%	65,587,470	-	145,451,543	100%	145,451,543
Jumlah		96,751,046	100%	96,751,046	1,275,592,000	2,543,227,250	199.38%	1,267,635,250
Penggunaan								
a. Biaya honorarium kasus komersial	-	18,314,504	100%	18,314,504	892,914,000	1,556,338,624	174%	663,424,624
b. Biaya penyelenggaraan webinar	-	-	0%	-	-	37,052,726	100%	37,052,726
c. Biaya non operasional	-	14,801,149	100%	14,801,149	-	12,767,138	100%	12,767,138
Jumlah		33,115,653	100%	33,115,653	892,914,000	1,606,158,488	179.88%	713,244,488
Kelebihan dana		63,635,393				937,068,762		
Optimalisasi								
a. Biaya penyelesaian sengketa		-		-		-		-
b. Biaya sumber daya manusia		-		-		-		-
c. Biaya administrasi dan umum		-		-		23,622,666		-
d. Biaya rapat umum anggota		-		-		-		-
Jumlah		-		-		23,622,666		-
Sisa kelebihan dana		63,635,393				913,446,096		

Keterangan:

Realisasi Penerimaan Lainnya sebesar Rp2.543.227.250,01 di tahun 2022 atau sebesar 199,38% dari target Penerimaan Lainnya tahun 2022 sebesar Rp1.275.592.000,00. Realisasi Biaya Lainnya sebesar Rp1.606.158.488,31 atau sebesar 179,88% dari target Biaya Lainnya tahun 2022 sebesar Rp1.606.158.488,- sehingga LAPS SJK mampu menghasilkan *net income* dari Penerimaan Lainnya sebesar Rp937.068.761,70. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja LAPS SJK dalam menangani penyelesaian sengketa komersial meningkat dan kepercayaan (*trust*) PUJK menyelesaikan sengketa di LAPS SJK mulai tumbuh, selain itu LAPS SJK mampu menghasilkan penerimaan lainnya dari penyelenggaraan 3 (tiga) kegiatan webinar (“Mediator Talk & Arbitrator Talk”) dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di tahun 2022.

Penerimaan lainnya mendukung pendekatan *pro-growth* LAPS SJK, dimana penerimaan lainnya dapat dialokasikan untuk menutup kekurangan iuran tahunan (yang bersifat *fix cost*) dan juga dapat dialokasikan untuk pengembangan LAPS SJK antara lain:

1. Biaya Penyelesaian Sengketa yang bersifat *variable cost* atau jumlahnya tidak dapat diprediksi dan cenderung memiliki *trend* naik setiap tahunnya;
2. Biaya Sumber Daya Manusia seperti penambahan *headcounts* untuk mengatasi kelebihan beban kerja, Pendidikan dan pelatihan, meng-cover kenaikan inflasi dan meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai dengan pemberian apresiasi kinerja;
3. Biaya Administrasi dan Umum yang merupakan biaya pendukung seluruh kegiatan LAPS SJK termasuk sarana dan prasarana (pengembangan jaringan kantor, pengembangan teknologi informasi (TI), dsb.

D. Effectivity Ratio

Performance (kinerja) LAPS SJK dinilai menggunakan Effectivity Ratio, yang didapat dari biaya program (biaya untuk menyelesaikan sengketa pro bono melalui mediasi dengan Mediator terdaftar) dibandingkan dengan biaya non program (biaya sumber daya manusia dan biaya administrasi & umum). Perbandingan tersebut akan menghasilkan persentase (%) tertentu yang akan menjadi acuan untuk mengukur efektivitas Lembaga menjalankan fungsi utamanya. Pemilihan effectivity ratio didasarkan pada kewajiban LAPS SJK untuk meng-handle penyelesaian sengketa probono yang terus menaik (*variable*) yang sumber pendanaannya dari iuran penyelesaian sengketa yang bersifat tetap (*fix*), sehingga untuk menjaga rasio ini Pengurus LAPS SJK harus mampu meningkatkan pendapatan kasus komersial dan pendapatan lain yang sah guna menopang kekurangan pendanaan dari iuran anggota. Berikut adalah effectivity ratio tahun 2021 dan 2022:

2021	1%	2022	34%
------	----	------	-----

02.

Kinerja Hubungan Kelembagaan (Institutional Campaign Performance)

Tahun 2022, LAPS SJK telah berhasil merealisasikan kinerja pada institutional campaign dengan tiga strategi yang dilakukan yaitu kerjasama kelembagaan, penyelenggaraan event webinar mediator talks dan arbiter talks serta marketing komunikasi melalui media massa dan media sosial.

A Kerjasama Hubungan Kelembagaan

Periode 2022, LAPS SJK telah menjalin kerjasama yang erat dengan 15 (lima belas) Fakultas Hukum Penandatanganan kerjasama dengan 15 (lima belas) Fakultas Hukum Universitas ternama di Indonesia, yaitu:

- | | |
|--|---|
| 1. Universitas Indonesia (UI) | 9. Universitas Sumatera Utara (USU) |
| 2. Universitas Gadjah Mada (UGM) | 10. Universitas Airlangga (UNAIR) |
| 3. Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) | 11. Universitas Kristen Indonesia (UKI) |
| 4. Universitas Diponegoro (UNDIP) | 12. Universitas Padjadjaran (UNPAD) |
| 5. Universitas Pelita Harapan (UPH) | 13. Universitas Sriwijaya (UNSRI) |
| 6. Universitas Brawijaya (UB) | 14. Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) dan |
| 7. Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) | 15. Universitas Hasanuddin (UNHAS) |
| 8. Universitas Islam Indonesia (UII) | |

Tujuan utama dari kerjasama ini adalah lembaga dapat merekrut akademisi sebagai mediator dan arbiter yang akan melengkapi komposisi mediator dan arbiter tetap LAPS SJK yang terdiri dari praktisi keuangan senior dan hakim agung. Dengan komposisi ini, diharapkan Lembaga akan dapat mengeluarkan putusan arbitrase yang berkualitas. Ruang lingkup kerja sama yang disepakati adalah dengan peningkatan penyelenggaraan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama ini dibangun utamanya untuk mendukung pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Courtesy Visit SMC, SIAC, dan FIDReC

Program ini menjadi studi banding pertama LAPS SJK kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang berada di negara lain. Pada *courtesy visit* kali ini diwakili oleh Direktur Layanan Sengketa LAPS SJK, Tri Legono dan Direktur Operasional & Keuangan LAPS SJK, Listianto E. Lunarko. Program studi banding ini berlangsung pada tanggal 21-23 Agustus 2022 di Singapura.

Penandatanganan Kerjasama dengan Perkumpulan Mediator dan Arbiter Industri Keuangan Indonesia (Medarfin)

LAPS SJK secara resmi melakukan penandatanganan kerjasama dengan Perkumpulan Mediator dan Arbiter Industri Keuangan Indonesia (Medarfin). Penandatanganan dilakukan di Kantor LAPS SJK pada acara Halal Bihalal Mediator dan Arbiter Tetap LAPS, Kamis, (19/05/2022).

Sosialisasi LAPS SJK

Selama periode 2022, LAPS SJK juga melakukan sosialisasi tentang optimalisasi LAPS SJK bersama Otoritas Jasa Keuangan, serta menjadi narasumber tentang penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang diadakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

B Webinar Mediator Talks dan Arbiter Talks

Webinar The Role of Digital Technology in the Indonesia Financial Services Landscape and the Need for Appropriate Regulations

Waktu : Kamis, 30 Juni 2022
 Narasumber : 1. Arman Wahyono Hartono – Direktur Bank BCA
 2. Adrian Gunadi – Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia
 3. Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M – Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
 Moderator : Vera Bahasuan – News Anchor

Mediator Talks: Peran Mediator & Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi yang Efektif & Efisien

Waktu : Rabu, 31 Agustus 2022
 Narasumber : 1. Suheri Lubis - Mediator LAPS SJK
 2. Fahmi Shahab - Executive Director Pusat Mediasi Nasional
 Moderator : Tri L. Yanuarachmadi - Direktur Layanan Sengketa LAPS SJK

Webinar AAUI Tentang “Mekanisme Penyelesaian Sengketa di LAPS SJK”

Waktu : Selasa, 6 September 2022 / 10.00 - 12.00 WIB
 Narasumber : Himawan Subiantoro – Ketua LAPS SJK
 Moderator : Geraldo Hilarius dari Departemen Perlindungan Konsumen AAUI

Arbitrator Talks: The Future of Arbitration for Financial Sector’s Dispute Settlement in Indonesia.

Waktu : Selasa, 4 Oktober 2022
 Narasumber : 1. Prof Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, FCBarb – Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Sriwijaya/ Arbiter Tetap LAPS SJK
 2. Agus Subroto – Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung
 Moderator : Wulan Tumbelaka – Mediator dan Arbiter Tetap LAPS SJK dan Partner ATC Law Firm

Mediator Talks: Is Mediation Becoming the best way to Resolve Future Legal Disputes in Indonesia?

Waktu : Kamis, 27 Oktober 2022
 Narasumber : 1. Prof Dr. Adi Sulistiyono – Guru Besar Universitas Sebelas Maret dan Mediator Arbiter Tetap LAPS SJK
 2. Dr. Ichsan Malik – Pakar Resolusi Konflik dan Pengajar Universitas Pertahanan RI
 Moderator : Dr. Henny Marlyna – Dosen FH UI dan Mediator Tetap LAPS SJK

C Marketing Communication: Branding Social Media Dan Media Massa

Penandatanganan Kerjasama dengan Lembaga Media Massa

Sebagai upaya meningkatkan komunikasi dan akses informasi kepada masyarakat terkait mekanisme dan alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di Indonesia, LAPS SJK secara resmi melakukan penandatanganan kerja sama dengan Hukumonline. Kerja sama tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Himawan E. Subiantoro selaku Ketua LAPS SJK dengan Jan Ramos Pandia sebagai Chief Operating Officer Hukumonline. Penandatanganan dilakukan di Kantor Hukumonline, Jakarta Selatan, Rabu (9/11/2022).

Press Release Kepada Media Massa

Sebagai lembaga yang penyedia jasa layanan, membangun citra positif di mata masyarakat adalah kewajiban yang harus dilakukan, dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, pada 11 November 2022, LAPS SJK telah menyampaikan press release kepada media massa tentang jumlah informasi pengaduan yang telah diterima dan ditangani oleh LAPS SJK.

Social Media Branding

LAPS SJK secara resmi telah meluncurkan *social media* resminya melalui Instagram dan LinkedIn sejak November 2021. Pada tahun 2022, jumlah pengikut atau *followers* LAPS SJK di Instagram telah mencapai 489 followers, sedangkan di LinkedIn telah mendapat sebanyak lebih dari 160 pengikut. Sementara itu *total user* yang mengakses *website* LAPS SJK di tahun 2022 mencapai 15.045 *users* dengan rata-rata waktu kunjungan akses di 1 menit 20 detik.



MoU UNPAD



Webinar



Rabu, 31 Agustus 2022



Selasa, 4 Oktober 2022



MoU UNAIR



Singapore Visit



MoU UNS



MoU UNPAR



Singapore Visit



Hukul Mou



MoU Unhas



MoU Unsri



MoU UPH



MoU Undip



MoU USU



MoU UKI



Tata Kelola Keberlanjutan

Sebagai lembaga quasi peradilan yang inti operasionalnya menyediakan layanan penyelesaian sengketa, Pengurus LAPS SJK berkomitmen untuk mengelola lembaga secara profesional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lembaga yang kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan penyedia jasa keuangan. Pengurus bersama Pengawas juga berkomitmen dalam pelaksanaan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan internal LAPS SJK lainnya.

Untuk menunjang tata kelola lembaga yang berkelanjutan, LAPS SJK menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT), Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA-LB), Rapat Pengurus, dan Rapat Pengawas LAPS SJK yang dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam anggaran dasar. Hal ini merupakan bentuk kepatuhan Pengurus dan Pengawas dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggaran yang ditetapkan.

Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT)



Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar, LAPS SJK telah menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) Tahun 2022 pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 secara daring (*virtual*). RUAT tersebut dihadiri oleh sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) anggota atau mewakili 60,20% (enam puluh koma dua puluh persen) dari jumlah suara anggota.

Adapun Agenda RUAT Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Tugas Pengawasan Pengawas Untuk Tahun Buku 2021 sekaligus Pembebasan Tanggung Jawab kepada Pengurus dan Pengawas;
2. Pengesahan Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2021;
3. Pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2022 yang Telah Disetujui Oleh Pengawas;
4. Penunjukan Akuntan Publik Yang Akan Mengaudit Laporan Keuangan LAPS SJK Tahun Berjalan (Tahun 2022); dan
5. Perubahan Susunan Anggota Pengawas.

Bersamaan dengan penyelenggaraan RUAT tersebut, diadakan pula webinar dengan tema “Pengembangan Mekanisme dan Infrastruktur Penyelesaian Sengketa secara Daring (*Online Dispute Resolution*) di Sektor Jasa Keuangan di Indonesia”.

Menunjuk ketentuan Pasal 15 ayat (1) POJK No.61/POJK 07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, berikut merupakan Laporan Keputusan RUAT LAPS SJK Tahun 2022:

1. Keputusan terkait Agenda Rapat I:

- Rapat dengan suara bulat menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Tugas Pengawasan Pengawas untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu)
- Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Pengurus atas tindakan kepengurusan dan kepada Pengawas atas tindakan pengawasan.

2. Keputusan terkait Agenda Rapat II:

- Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Audited LAPS SJK Tahun 2021

3. Keputusan terkait Agenda Rapat IV:

- Menunjuk kembali KAP Djoko, Sidik & Indra sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan LAPS SJK tahun berjalan (Tahun Buku 2021), dan memberikan kuasa kepada Pengurus LAPS SJK untuk melakukan negosiasi harga dengan KAP dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan LAPS SJK.

4. Keputusan terkait Agenda Rapat V:

- Menyetujui dan mengesahkan perubahan susunan Pengawas Periode 2020 - 2023 yang mewakili ADPI, Himbara Asbisindo dan Asippindo dengan masa jabatan melanjutkan sisa jabatan yang digantikan, yaitu sampai tahun 2023.

Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA-LB)

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar, LAPS SJK menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA-LB) Tahun 2022 pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 secara daring (*virtual*). RUA-LB tersebut dihadiri oleh sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) anggota atau mewakili 43,46% (empat puluh tiga koma empat puluh enam persen) dari jumlah suara.

Adapun Agenda RUA-LB Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengesahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LAPS SJK tahun 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 61/POJK.07/2020 tentang LAPS SJK
2. Perubahan Susunan Pengawas LAPS SJK.

Berikut merupakan Laporan Keputusan RUA-LB LAPS SJK Tahun 2022:

1. Keputusan Terkait Agenda Rapat I:

Hasil pemungutan suara (voting) dengan suara mayoritas menerima dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LAPS SJK Tahun 2023 dengan 312 Anggota atau 99,04% telah menyatakan setuju dan 3 Anggota atau 0,96% menyatakan *abstain*.

2. Keputusan Terkait Agenda Rapat II:

Menyetujui dan mengesahkan perubahan susunan Pengawas Periode 2020 sampai 2023 yang mewakili PT BEI dan Amvesindo dengan masa jabatan melanjutkan sisa jabatan yang digantikannya.

Rapat Pengawas

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar LAPS SJK, Pengawas berkewajiban melaksanakan rapat rutin per tiga bulan sekali atau empat kali per tahun. Hasil pembahasan rapat wajib dituangkan dalam dokumen berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua Badan Pengawas bersama salah satu anggota Badan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua.

Komposisi keanggotaan Pengawas LAPS SJK meliputi perwakilan dari asosiasi sektor jasa keuangan dan SRO. Melalui Rapat Pengawas, kinerja Pengurus LAPS SJK dapat dipantau dan dievaluasi. Sepanjang tahun 2022, Pengawas telah mengadakan rapat sebanyak empat kali dengan rincian sebagai berikut:

1. **Agenda Rapat Pengawas Triwulan I - dilaksanakan tanggal 24 Februari 2022**
 - Update Kinerja Penyelesaian Sengketa
 - Update Penyelesaian Sengketa Unit Link
 - Update Laporan Keuangan dan Iuran Keanggotaan
 - Rencana Peresmian Kantor
 - Pembahasan Literasi Keuangan melalui *Social Media*
 - Perubahan Struktur Organisasi LAPS SJK
2. **Agenda Rapat Pengawas Triwulan II - dilaksanakan tanggal 27 April 2022**
 - Update Kinerja Penyelesaian Sengketa
 - Laporan Keuangan & Update Iuran Keanggotaan
 - Usulan Pelaksanaan RUA LAPS SJK Tahun Buku 2023 & Penunjukan KAP Untuk Laporan Keuangan Tahun 2022
 - Sertifikat Keanggotaan
 - Update Penyelesaian Sengketa Unit Link
3. **Agenda Rapat Pengawas Triwulan III - dilaksanakan pada 16 Agustus 2022**
 - Penilaian Formula Kinerja LAPS SJK
 - Pembahasan dan Persetujuan Badan Pengawas terhadap RKAT LAPS SJK Tahun 2023
 - Kebijakan Sistem Keanggotaan LAPS SJK untuk PUJK yang tidak memiliki Asosiasi
 - *Update Institutional Campaign*
4. **Agenda Rapat Pengawas Triwulan IV - dilaksanakan pada 15 November 2022**
 - Update Laporan Pelaksanaan RUA LB tanggal 27 September 2022
 - Masa Jabatan Pengurus & Pengawas Periode 2023-2026
 - Laporan Realisasi vs RKAT 2022 (Prognosa)
 - Rencana Pembuatan Buku LAPS SJK
 - Rekomendasi Peraturan & Acara LAPS SJK

Rapat Pengurus

Sesuai ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar LAPS SJK, Pengurus mengadakan rapat paling sedikit sekali per bulan, atau pada waktu lain yang dianggap perlu. Rapat Pengurus dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas operasional LAPS SJK, antara lain seperti pembahasan terkait penyelesaian sengketa dan kegiatan operasional lainnya. Hasil rapat Pengurus didokumentasikan dalam risalah rapat.

Waktu dan Agenda Rapat Pengurus periode Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	AGENDA
1	17 Januari 2022	1 Penetapan Strategi Penyelesaian Sengketa
		2 Pembahasan Struktur Organisasi
		3 Lain-lain
2	11 Februari 2022	1 Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
		2 Penilaian Pegawai/Pelatihan SDM
		3 Update Kinerja Penyelesaian Sengketa
3	30 Maret 2022	1 Kinerja Penyelesaian Sengketa (Reguler dan Unit Link)
		2 Operasional Kantor Selama Bulan Ramadhan
4	8 April 2022	1 Pembahasan Penyelesaian Sengketa Unit Link
		2 Persiapan Pertemuan dengan OJK
5	13 Mei 2022	1 Update Penanganan Perkara Unit Link
6	10 Juni 2022	1 Pembahasan Aset Tetap
		2 Pembahasan Hak Cuti Pegawai
		3 Pembahasan Penanganan Sengketa Unit Link
7	8 Juli 2022	1 Job Description dan Goal Setting
8	Agustus 2022	1 -

NO	TANGGAL	NO	AGENDA
9	5 September 2022	1	Pembahasan Struktur Organisasi
10	12 Oktober 2022	1	Update Laporan Kinerja Per Divisi
11	16 November 2022	1	Update Laporan Kinerja Per Divisi
12	12 Desember 2022	1	Update Laporan Kinerja Per Divisi
		2	Pembahasan MSDM dan Strategi 2023

Peraturan dan Acara LAPS SJK

Sinkronisasi Peraturan & Prosedur (PP) Mediasi & Arbitrase LAPS SJK perlu dilakukan dan dipertajam agar sesuai dengan peraturan dan praktek yang berkembang di Indonesia maupun di luar negeri. Selain hal tersebut, untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan (*sustainability*) operasional LAPS SJK, Pengurus harus dapat menjangkau *commercial cases* (sengketa komersial) dimana penerimaan *fee* dari sengketa komersial dapat digunakan sebagai penyangga atas biaya penyelesaian sengketa kecil. Oleh karena itu, PP Mediasi & Arbitrase lembaga sedapat mungkin didesain untuk digunakan bagi kedua layanan tersebut. Apabila tidak memungkinkan, pembuatan PP secara terpisah perlu dilakukan. Berikut ini daftar Peraturan dan Acara LAPS SJK yang telah dibuat:

Peraturan dan Acara LAPS SJK	Tanggal
NO. PER-01/LAPS-SJK/I/2021 TENTANG PERATURAN DAN ACARA MEDIASI	04 - 01 - 2021
NO. PER-02/LAPS-SJK/I/2021 TENTANG PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE	04 - 01 - 2021
NO. PER-03/LAPS-SJK/I/2021 TENTANG PERATURAN DAN ACARA PENDAPAT MENGIKAT	04 - 01 - 2021
NO. PER-04/LAPS-SJK/I/2021 TENTANG MEDIATOR DAN ARBITER	04 - 01 - 2021
NO. PER-05/LAPS-SJK/I/2021 TENTANG KODE ETIK	04 - 01 - 2021
NO. PER-06/LAPS-SJK/I/2021 TENTANG BIAYA LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA	04 - 01 - 2021

Pelaporan kepada OJK

Untuk memenuhi prinsip transparansi dan responsibilitas, Pengurus senantiasa memenuhi kewajiban tindak lanjut penanganan pengaduan nasabah yang disyaratkan OJK secara tepat waktu. Laporan penanganan pengaduan nasabah tersebut dilaporkan setiap tiga bulan atau triwulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Laporan Triwulan untuk periode 1 Januari s.d 31 Maret telah dilaporkan pada tanggal 11 April 2022 melalui Surat No.: 1305/LAPS-SJK/IV/2022
- Laporan Triwulan II untuk periode 1 April s.d 30 Juni telah dilaporkan pada tanggal 11 Juli 2022 melalui Surat No.: 1596/LAPS-SJK/VII/2022
- Laporan Triwulan III untuk periode 1 Juli s.d 31 September telah dilaporkan pada tanggal 10 Oktober 2022 melalui Surat No.: 1988/LAPS-SJK/X/2022
- Laporan Triwulan IV untuk periode 1 Oktober s.d 31 Desember dilaporkan pada tanggal 10 Januari 2023 melalui Surat No.: 006/LAPS-SJK/I/2023
- Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Semester II Tahun 2022 telah dilaporkan pada tanggal 10 Januari 2023 melalui Surat No.: 007/LAPS-SJK/I/2023

Penyusunan Kebijakan Tahun 2022

Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Lembaga sebagaimana tercantum dalam POJK LAPS SJK, Kebijakan yang ditetapkan selama tahun 2022 antara lain:

1. Penerbitan Kebijakan *Rule Making Rule Policy*

Dalam rangka meningkatkan kredibilitas peraturan serta tersedianya *check & balances* dan mitigasi risiko dari kesalahan pembuatan peraturan, LAPS SJK menerbitkan Surat Keputusan LAPS SJK No.: 010/SK/LAPS-SJK/XI/2022 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan (*Rule Making Rule Policy*).

2. Penyusunan *Job Description* dan Standar Prosedur Operasional Sumber Daya Manusia

Untuk memastikan efektivitas dalam kinerja SDM di LAPS SJK, maka disusun SOP sebagai berikut:

- I. SOP Perencanaan SDM
- II. SOP Rekrutmen SDM
- III. SOP Penempatan dan Penugasan SDM
- IV. SOP Pengelolaan Kedisiplinan SDM
- V. SOP Pengelolaan Kinerja SDM

3. Penyusunan Kebijakan SLA

Untuk memberikan layanan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien serta memberikan kemudahan konsumen untuk memperoleh akses keadilan, LAPS SJK menerbitkan kebijakan untuk mengatur dan memperjelas proses penanganan pengaduan serta lamanya waktu yang dibutuhkan dalam rangka Penyelesaian Sengketa. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan LAPS SJK No.: 011/LAPS-SJK/XI/2022 tentang Standar Waktu Penanganan Pengaduan dan Layanan Mediasi Perkara *Retail & Small Claims*.

4. SOP Penunjukan Mediator untuk perkara *Small & Retail Claims*

Dalam rangka pengelolaan penyelesaian sengketa *retail & small claims* yang efektif dan efisien, perlu adanya tata cara penunjukan penunjukan Mediator dengan menetapkan kriteria tertentu. Hal ini diatur melalui SK No.:007/SK/LAPS-SJK/X/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Mediator Perkara *Retail & Small Claims*.

5. Penyusunan Indikator Penilaian/Survei Kepuasan bagi Mediator dan Arbitrer

LAPS SJK mengadakan survei kepuasan layanan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja LAPS SJK. Implementasi terhadap penggunaan survei kepuasan tersebut saat ini telah dilakukan untuk layanan mediasi sejak April 2022.

Lampiran

#1

Laporan Keuangan Audited

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
(LAPS - SJK)
LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

31 Desember 2022

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
(LAPS - SJK)**

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Pengurus	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	2 - 4
Laporan Perubahan Aset Neto	5
Laporan Arus Kas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7 - 17



Laporan No: 00035/3.0315/AU.1/11/1275-2/1/N/2023

Laporan Auditor Independen

Pengawas, Pengurus dan Pendiri
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Laporan Audit Atas Laporan Keuangan

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan** ("Lembaga"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2022, serta laporan aktivitas dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan asset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Lembaga berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Lembaga dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Lembaga atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Lembaga.

BRANCH OFFICE :

Jl. Letjen Suprpto No. 29L, RT. 008 RW. 006, Kel. Harapan Mulya, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat 10640 Indonesia
Phone : 62-21 4259570 | Fax : 62-21 4209094
Website : www.kapdsi.com | E-mail : abd.manihuruk@anm-office.com
NIUKAP : 821/KM.1/2015

HEAD OFFICE :

Graha Mandiri di Plaza Bumi Daya 17th Floor,
Jl. Imam Bonjol No. 61 Kel. Menteng, Kec. Menteng
Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone : 62-21 39836734, 39838735 | Fax : 62-21 39832081
E-mail : kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP : 959/KM.1/2014

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Lembaga.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Lembaga untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Lembaga tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan Lembaga atau aktivitas bisnis dalam Lembaga untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Lembaga. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DJOKO, SIDIK & INDRA**

 **DSI**

Abdi Nusantara Manihuruk, CA., CPA., BKP.
Nomor Ijin Akuntan Publik No AP.1275
04 Mei 2023



LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	2c, 3	6.780.225.532	6.051.774.535
Piutang iuran anggota	2e, 4	159.375.435	140.550.500
Sewa dibayar dimuka	5	188.488.320	134.112.000
Total aset lancar		7.128.089.287	6.326.437.035
Aset tidak lancar			
Aset tetap, bersih	6	1.790.307.836	1.935.377.957
Jaminan deposit	7	178.978.560	178.978.560
Total aset tidak lancar		1.969.286.396	2.114.356.517
TOTAL ASET		9.097.375.683	8.440.793.552
LIABILITAS			
Pendapatan diterima dimuka	8	886.198.245	159.800.000
Beban yang masih harus dibayar	9	755.348.100	210.000.000
Deposit komersial	10	35.000.000	-
Utang pajak	13	221.036.650	552.814.901
Dana titipan	11	-	22.551.606
Utang lain-lain	12	-	880.308.000
Total liabilitas jangka pendek		1.897.582.995	1.825.474.507
Liabilitas imbalan paska-kerja	14	450.809.453	-
Total liabilitas jangka panjang		450.809.453	-
Aset neto			
Aset neto tidak terikat	15	4.074.861.784	3.183.417.232
Aset neto terikat	15	2.674.121.451	3.431.901.813
Total aset neto		6.748.983.235	6.615.319.045
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO		9.097.375.683	8.440.793.552

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
LAPORAN AKTIVITAS DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET NETO TIDAK TERIKAT			
Penerimaan	16		
Penerimaan iuran Anggota		6.997.825.334	7.023.472.122
iuran anggota tahunan			
Pendapatan Kasus Komersial		659.545.222	-
Pendapatan perkara arbitrase komersial		35.000.000	5.000.000
Pendaftaran mediasi dan arbitrase komersial		27.823.861	7.849.072
Pendapatan perkara mediasi komersial			
Pendapatan Lain-Lain		82.015.274	-
Pendapatan Webinar		56.711.073	-
Pendapatan Lainnya			
Total Penerimaan		7.858.920.764	7.036.321.194
Pengeluaran			
Beban Sumber Daya Manusia	17		
Beban gaji, upah dan honorarium		(3.011.840.000)	(2.069.932.898)
Beban imbalan masa kerja		(450.809.453)	-
Beban pajak penghasilan pasal 21		(330.374.213)	(280.804.200)
Beban tunjangan transportasi		(258.100.000)	(142.991.000)
Beban tunjangan hari raya		(239.986.666)	(273.291.667)
Beban BPJS ketenagakerjaan		(160.573.872)	(62.696.543)
Beban BPJS kesehatan		(71.166.000)	(23.799.015)
Beban lembur		(19.105.551)	-
Subtotal		(4.541.955.755)	(2.853.515.323)
Beban Administrasi dan Umum	17		
Beban sewa kantor		(538.886.400)	-
Beban <i>marketing communication</i>		(424.040.000)	-
Beban <i>service charge and sinking fund</i>		(212.628.480)	-
Beban perjalanan dinas		(140.118.529)	-
Beban telepon, fax, internet		(95.816.338)	(3.447.319)
Beban <i>gathering</i>		(90.020.179)	-
Beban jasa konsultan		(86.025.000)	-
Beban penyusutan peralatan		(62.398.040)	(16.369.163)
Beban sosialisasi anggota dan masyarakat		(62.285.000)	-
Beban honor magang		(53.250.000)	-
Beban konsumsi		(41.250.587)	(5.418.182)
Beban alat tulis kantor		(40.489.480)	(19.897.368)
Beban ekspedisi, pos dan materai		(39.426.322)	(23.288.969)
Beban peresmian kantor		(35.966.795)	-
Beban listrik		(34.659.376)	(6.018.533)
Beban audit laporan keuangan		(33.300.000)	(30.000.000)
Beban operasional lainnya		(28.586.900)	-
Beban pemeliharaan <i>software/hardware</i>		(22.700.000)	-
Beban perlengkapan kantor		(21.039.139)	(5.207.800)
Saldo dipindahkan		(2.062.886.565)	(109.647.334)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
LAPORAN AKTIVITAS DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA (LANJUTAN)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo pindahan	(2.062.886.565)	(109.647.334)
Beban inventaris/peralatan kantor	(18.294.500)	-
Beban <i>website development</i>	(16.414.803)	(79.200.000)
Beban sewa foto copy	(12.647.257)	(41.499)
Beban penyusutan perabotan dan furniture	(12.444.346)	-
Beban <i>institutional campaign</i>	(12.005.100)	-
Beban training pegawai	(11.900.000)	-
Beban <i>daily supply</i>	(11.655.992)	-
Beban penyusutan desain interior	(11.816.646)	-
Beban penyusutan mekanik dan elektrik	(11.314.746)	-
Beban tol, parkir & transport	(10.272.611)	-
Beban seragam	(8.403.900)	-
Beban pendaftaran arbitrase ke pengadilan negeri	(7.100.000)	-
Beban laboratorium	(4.177.668)	-
Beban pajak lainnya	(2.550.000)	(179.228.000)
Beban pemeliharaan kantor	(2.235.000)	(23.050.000)
Beban pengadaan <i>software</i>	(2.079.890)	(2.026.088)
Beban penyusutan kendaraan	(1.683.281)	-
Beban seminar	(700.000)	-
Beban pajak PPh 23	(600.000)	(2.274.500)
Beban <i>e - signature</i>	(547.500)	(27.459.000)
Beban asuransi kendaraan kantor	(370.500)	-
Beban pemeliharaan kendaraan	(264.000)	-
Beban <i>entertainment</i>	(200.998)	-
Beban kesehatan rawat jalan	-	(30.396.808)
Beban lainnya	-	(12.404.694)
Subtotal	(2.222.365.303)	(465.727.923)
Beban Rapat Umum Anggota	17	
Beban rapat umum anggota	(160.749.230)	(46.681.700)
Beban ekspedisi RUA	(13.991.077)	-
Beban ATK RUA	(11.305.000)	-
Beban notaris RUA	(6.000.000)	(6.000.000)
Beban konsumsi RUA	(5.363.660)	-
Subtotal	(197.408.967)	(52.681.700)
Total Pengeluaran	(6.961.730.025)	(3.371.924.946)
Kenaikan Aset Neto Tidak Terikat	897.190.739	3.664.396.248

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
LAPORAN AKTIVITAS DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA (LANJUTAN)**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2022	2021
ASET NETO TERIKAT			
Penerimaan	16		
luran pendirian		-	1.622.651.813
Penyelesaian sengketa <i>small claims</i>		1.854.250.000	1.854.250.000
Total Penerimaan		1.854.250.000	3.476.901.813
Pengeluaran	17		
Honor mediator untuk <i>small claim</i>		(2.287.500.000)	(45.000.000)
Beban penyusutan perabotan dan furniture		(163.509.454)	-
Beban penyusutan desain interior		(107.473.654)	-
Beban penyusutan mekanik dan elektrikal		(53.547.254)	-
Total Pengeluaran		(2.612.030.362)	(45.000.000)
(Penurunan) / Kenaikan Aset Neto Terikat		(757.780.362)	3.431.901.813
Pendapatan / (Beban) lain-lain			
Pendapatan lain-lain	18	145.451.543	65.587.470
Beban lain-lain	18	(12.767.139)	(14.801.149)
Total Pendapatan / (Beban lain-lain)		132.684.404	50.786.321
Aset Neto Sebelum Pajak Penghasilan		272.094.781	7.147.084.382
Beban pajak penghasilan		(138.430.591)	(531.765.337)
Kenaikan Aset Neto Setelah Pajak Penghasilan		133.664.190	6.615.319.045
Penghasilan komprehensif lainnya		-	-
Kenaikan Aset Neto Setelah Pajak Penghasilan dan Penghasilan Komprehensif Lainnya		133.664.190	6.615.319.045

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PERUBAHAN ASET NETO		
Tidak Terikat		
Saldo aset neto tidak terikat pada awal tahun	3.183.417.232	-
Kenaikan aset neto tidak terikat tahun berjalan	<u>891.444.552</u>	<u>3.183.417.232</u>
Subtotal Aset Neto Tidak Terikat	<u>4.074.861.784</u>	<u>3.183.417.232</u>
Terikat		
Saldo aset neto terikat pada awal tahun	3.431.901.813	-
(Penurunan) / Kenaikan aset neto terikat tahun berjalan	<u>(757.780.362)</u>	<u>3.431.901.813</u>
Subtotal Aset Neto Terikat	<u>2.674.121.451</u>	<u>3.431.901.813</u>
Penghasilan komprehensif lainnya	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL ASET NETO	<u>6.748.983.235</u>	<u>6.615.319.045</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Perubahan aset neto	133.664.190	6.615.319.045
Penyesuaian untuk :		
Beban imbalan paska-kerja	450.809.453	-
Penyesuaian aset tetap	423.987.421	16.369.163
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan kewajiban operasi	<u>1.008.461.064</u>	<u>6.631.688.208</u>
Penurunan / (kenaikan) dalam aset operasi :		
Piutang iuran anggota	(18.824.935)	(140.550.500)
Sewa dibayar dimuka	(54.376.320)	(134.112.000)
Aset lain-lain	-	(178.978.560)
Penurunan / (kenaikan) dalam kewajiban operasi :		
Dana titipan	(22.551.606)	22.551.606
Deposit Komersial	35.000.000	-
Pendapatan Diterima Dimuka	726.398.245	159.800.000
Beban yang masih harus dibayar	545.348.100	210.000.000
Utang lain-lain	(880.308.000)	880.308.000
Utang pajak	(331.778.251)	552.814.901
Arus kas diperoleh dari Aktivitas Operasi	<u>(1.092.767)</u>	<u>1.371.833.447</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan aset tetap	(278.917.300)	(1.951.747.120)
Arus kas digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(278.917.300)</u>	<u>(1.951.747.120)</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	728.450.997	6.051.774.535
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>6.051.774.535</u>	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u>6.780.225.532</u>	<u>6.051.774.535</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Berdasarkan akta pendirian No. 14 pada tanggal 24 November 2020 tentang Perkumpulan Lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Notaris Kristanti Suryani, S.H., Mkn di Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011070.AH.07.TAHUN 2020 tentang Pengesahan pendirian badan hukum Lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 30 November 2020.

Berdasarkan pernyataan keputusan Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) Perkumpulan Lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan No. 32 pada tanggal 27 Juli 2021. Notaris Hadijah, S.H. di Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011070.AH.01.08.tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 25 Agustus 2021.

Anggaran tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Anggaran Biaya Pendirian (*Set Up Cost*).
 - 1 Biaya pendirian dikenakan hanya dikenakan sekali saja pada tahun pertama.
 - 2 Luas ruangan yang diperlukan +/- 300 m2 (tiga ratus meter persegi) terbagi untuk ruang kerja untuk 22 orang termasuk 3 orang pengurus ruang penerima tamu, 2 ruang sidang mediasi dan 1 ruang arbitrase.
 - 3 Inventaris kantor (furniture, komputer, peralatan kantor standar lainnya)
 - 4 Besarnya biaya pendirian senilai Rp 1.691.250.000 (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Anggaran Biaya Operasional Tahunan.
 - 1 Biaya gaji pengurus dan pegawai sebesar Rp 5.049.448.000
 - 2 Biaya penyelesaian sengketa small claims sebesar Rp 1.854.250.000
 - 3 Biaya administrasi dan umum sebesar Rp 1.687.150.000
 - 4 Biaya rapat umum sebesar Rp 250.000.000

Total anggaran dalam RKAT 2022 adalah sebesar Rp9.095.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anggaran Biaya Operasional Tahunan.
 - 1 Biaya gaji pengurus dan pegawai sebesar Rp 5.269.000.000
 - 2 Biaya penyelesaian sengketa small claims sebesar Rp 1.854.000.000
 - 3 Biaya administrasi dan umum sebesar Rp 1.722.000.000
 - 4 Biaya rapat umum sebesar Rp 250.000.000

Perkumpulan didirikan sejak tanggal ditandatanganinya Akta Pendirian ini yaitu tanggal 22 September 2020 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Kegiatan operasional baru dimulai sejak 1 Januari 2021.

Tujuan Perkumpulan

- a. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di sektor jasa keuangan yang cepat, biaya terjangkau, adil dan efisien.
- b. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama antar anggota di sektor jasa keuangan dalam penyelesaian sengketa dengan tetap memperhatikan karakteristik permasalahan dengan mengedepankan independensi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan edukasi literasi keuangan dan penyelesaian sengketa kepada masyarakat Indonesia.
- d. Memberikan kepastian hukum dalam rangka penyelesaian sengketa bagi Konsumen dan PUJK.

Kegiatan Perkumpulan

- a. Menerima permohonan dan menyelenggarakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diajukan oleh konsumen dan/atau PUJK berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan Perkumpulan melalui cara Pendapat Mengikat, Mediasi, dan Arbitrase.
- b. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada konsumen dan PUJK dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Perkumpulan antara lain dengan melakukan pertemuan/diskusi-diskusi, seminar, lokakarya pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain di sektor jasa keuangan kepada konsumen, PUJK atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu oleh pengurus.

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

Kegiatan Perkumpulan (lanjutan)

- c. Melakukan komunikasi dan mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen dan PUJK terhadap layanan perkumpulan.
- d. Melakukan kerjasama dengan badan atau lembaga terkait penyelesaian sengketa nasional maupun internasional.
- e. Menyelenggarakan kegiatan sertifikasi mediator dan arbiter.
- f. Menyelenggarakan administrasi atas kegiatan-kegiatan perkumpulan.
- g. Menjatuhkan sanksi dan/atau mencabut keanggotaan dari anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

Susunan Organisasi Perkumpulan

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>
Himawan Edhy Subiantoro, S.H., LL.M	Ketua
Tri Legono Yanuarachmadi	Sekretaris
Listianto Edhie Lunarko	Bendahara
Dr. Hastanto Sri Margi Widodo, S.Kom., MEngSc	Ketua Pengawas

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan tertentu yang diakui berdasarkan nilai wajar, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Laporan keuangan disusun menggunakan asumsi kelangsungan usaha.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan Pengurus untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

Laporan keuangan Pengurus terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah revisi, amendemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, yaitu:

- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- Amendemen PSAK 16 : Aset Tetap;
- Amendemen PSAK 55 : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran;
- Amendemen PSAK 57 : Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 60 : Instrumen Keuangan Pengungkapan;
- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan (lanjutan)

- PSAK 62 (Amendemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 15 (Amendemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Pengurus sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

b. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun yang disertakan dalam laporan keuangan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian. Seluruh angka dalam laporan keuangan dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah penuh ("Rp") kecuali dinyatakan lain.

c. Kas dan setara kas

Kas terdiri dari saldo kas di tangan dan bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijamin sebagai agunan. Kas di bank memperoleh bunga berdasarkan suku bunga simpanan di bank yang bersangkutan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang dapat dicairkan menjadi sejumlah kas yang telah diketahui jumlahnya dengan periode jatuh tempo 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehan dan mempunyai risiko perubahan nilai yang tidak signifikan serta tidak dijamin dan tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan pada saat penempatan atau yang jatuh temponya kurang dari 3 bulan namun dijamin, disajikan sebagai investasi jangka pendek dan dinyatakan sebesar nilai nominalnya.

d. Aset Neto

Aset neto adalah hak residual atas aset setelah dikurangi seluruh liabilitas yang dimiliki. Aset neto terdiri atas aset neto tidak terikat dan aset neto terikat.

Aset neto tidak terikat

Aset neto tidak terikat adalah aset neto berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

Aset neto tidak terikat diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan;
- b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
- c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat;
- d. Pengalihan aset neto terikat menjadi aset neto tidak terikat.

Aset neto terikat

Aset neto terikat adalah aset neto berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donatur. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan aset neto tersebut.

Aset neto terikat diakui pada saat:

- a. Ditetapkannya nilai kekayaan;
- b. Diterimanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat;
- c. Diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang mengikat;

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Piutang luran

Piutang luran diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

f. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

g. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan awal aset tetap meliputi biaya konstruksi atau harga pembelian dan setiap biaya diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi kerjanya dan lokasi untuk digunakan.

Pengakuan penyusutan dimulai ketika aset tersebut ada di lokasi dapat dioperasikan sebagaimana yang dimaksud oleh manajemen. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

<u>Jenis aset tetap</u>	<u>Masa Manfaat</u>
Desain interior	5 tahun
Peralatan kantor	4 tahun
Perabotan dan furnitur	5 tahun
Mekanik dan elektrikal	5 tahun
Kendaraan	8 tahun

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laporan aktivitas pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya, pengeluaran yang menambah masa manfaat aset atau menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa mendatang seperti peningkatan kapasitas dan perbaikan kualitas hasil atau standar kinerja dikapitalisasi.

h. Utang lain-lain

Utang lain-lain adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan di luar usaha normal. Utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

i. Perpajakan

Pajak penghasilan kini dihitung menggunakan tarif pajak dan undang-undang perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan. Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan.

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Perpajakan (lanjutan)

Pajak penghasilan pasal 21

Lembaga menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan tunjangan staf dan karyawan.

Pajak penghasilan pasal 23

Lembaga menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 atas transaksi yang berkaitan dengan jasa.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2

Lembaga menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas transaksi yang berkaitan dengan sewa pada pihak ketiga.

j. Penerimaan dan Beban

Iuran anggota adalah iuran yang berasal dari iuran anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Iuran anggota terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

- Iuran pendirian (Set Up Cost) Kantor LAPS SJK hanya akan dipungut 1 (satu) kali (one time contribution) pada saat persiapan operasional Perkumpulan dari seluruh PUJK yang menjadi Anggota, yang besarnya tertuang dalam RKAT tahun 2022 yang disahkan dalam RUA atau melalui Keputusan Sirkuler;
- Iuran tahunan (Annual Levy) yang akan dipungut setiap tahun dari seluruh PUJK yang menjadi Anggota, yang besarnya tertuang dalam RKAT tahun 2022 yang disahkan dalam RUA atau melalui Keputusan Sirkuler;

Mengingat karakteristik unik dari jenis dan skala ekonomi Anggota LAPS SJK, perumusan formula kedua jenis iuran Anggota tersebut didasarkan kepada 3 (tiga) prinsip sebagai berikut :

- Prinsip keadilan;
- Prinsip independensi; dan
- Prinsip kesetaraan dalam keberagaman.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut di atas, beberapa variabel yang dijadikan basis perhitungan alokasi iuran Anggota adalah sebagai berikut :

- Aset dan proporsi aset;
- Peluang kejadian sengketa (peluang);
- Tidak diperkenankan adanya dominasi absolut;
- Pemberian privilege hak suara kepada SRO Pasar Modal dan 2 (dua) kelompok sektor besar industri (Perbankan dan IKNB).

Beban untuk kegiatan, operasi, dan beban lain untuk aktivitas diakui pada laporan aktivitas pada saat terjadinya (*accrual basis*).

3. KAS DAN SETARA KAS

Merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kas Kecil		
Kas kecil	5.000.000	5.000.000
Kas kecil mediasi/arbitrase komersial	3.158.100	-
Subtotal	<u>8.158.100</u>	<u>5.000.000</u>
Bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1240010590777)	1.075.307.845	2.718.485.732
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1240011477677)	60.808.763	-
PT Bank DKI ac (70112065512)	46.224.808	-
PT Bank Central Asia Tbk (5425525210)	24.566.107	1.317.763.013
Subtotal	<u>1.206.907.523</u>	<u>4.036.248.745</u>

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2022	2021
Deposito		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1240205702559)	2.047.015.293	2.010.525.790
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1240205804561)	1.012.096.411	-
PT Bank DKI (010894)	1.000.000.000	-
PT Bank DKI (010413)	1.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1240205804553)	506.048.205	-
Subtotal	5.565.159.909	2.010.525.790
Total	6.780.225.532	6.051.774.535

4. PIUTANG IURAN ANGGOTA

Merupakan saldo piutang iuran anggota per 31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari :

	2022	2021
Sektor Pembiayaan	83.100.000	90.500.000
Sektor Perbankan	30.000.000	-
Sektor Modal Ventura	25.000.000	29.800.000
Sektor Asuransi	9.025.435	8.050.500
Sektor Pergadaian	6.250.000	7.200.000
Sektor Pasar Modal	6.000.000	5.000.000
Total	159.375.435	140.550.500

5. SEWA DIBAYAR DIMUKA

Merupakan saldo sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari :

	2022	2021
Sewa kantor	188.488.320	134.112.000
Total	188.488.320	134.112.000

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa unit kantor Menara Karya Jl. HR Rasuna Said Blok X5, Kav 01 dan 02 Jakarta Selatan. Masa sewa dari 1 Januari 2021 sampai dengan 2026.

6. ASET TETAP

Merupakan saldo aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

	2022			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	
Nilai Perolehan				
Desain Interior	593.911.000	39.333.800	-	633.244.600
Paralatan kantor	159.467.120	133.750.100	-	293.217.220
Perabotan dan furnitur	874.090.000	72.674.400	-	946.764.400
Mekanik dan elektrikal	324.279.000	10.074.200	-	334.353.200
Kendaraan	-	23.085.000	-	23.085.000
Total Nilai Perolehan	1.951.747.120	278.917.300	-	2.230.664.420
Akumulasi Penyusutan				
Kendaraan	-	1.683.281	-	1.683.281
Desain Interior	-	119.090.300	-	119.090.300
Paralatan kantor	16.369.163	62.398.040	-	78.767.203
Perabotan dan furnitur	-	175.953.800	-	175.953.800
Mekanik dan elektrikal	-	64.862.000	-	64.862.000
Total Nilai Perolehan	16.369.163	423.987.421	-	440.356.584
Nilai Buku Bersih	1.935.377.957			1.790.307.836

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. ASET TETAP (lanjutan)

	2021			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	
Nilai Perolehan				
Desain Interior	-	593.911.000	-	593.911.000
Paralatan kantor	-	159.467.120	-	159.467.120
Perabotan dan furnitur	-	874.090.000	-	874.090.000
Mekanik dan elektrikal	-	324.279.000	-	324.279.000
Total Nilai Perolehan	-	1.951.747.120	-	1.951.747.120
Akumulasi Penyusutan				
Desain Interior	-	-	-	-
Paralatan kantor	-	16.369.163	-	16.369.163
Perabotan dan furnitur	-	-	-	-
Mekanik dan elektrikal	-	-	-	-
Total Nilai Perolehan	-	16.369.163	-	16.369.163
Nilai Buku Bersih	-			1.935.377.957

Pengurus LAPS-SJK melakukan serah terima aset tetap dari vendor yang terdiri dari desain interior, perabotan dan furnitur, mekanik dan elektrikal pada tanggal 29 Desember 2021.

7. JAMINAN DEPOSIT

Merupakan saldo jaminan deposit ruang kantor per 31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari :

	2022	2021
Security deposit	178.978.560	178.978.560
Total	178.978.560	178.978.560

8. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Merupakan saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari :

	2022	2021
Arbitrase	886.198.245	159.800.000
Total	886.198.245	159.800.000

9. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Merupakan saldo beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari :

	2022	2021
Pembuatan buku	350.760.000	-
Tunjangan Hari Raya	210.855.000	175.000.000
Mediator Probono	82.500.000	-
Pembuatan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	77.700.000	-
Audit	16.650.000	30.000.000
Design interior	8.558.100	-
Jasa aktuarial	8.325.000	-
Mediasi	-	5.000.000
Total	755.348.100	210.000.000

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. DEPOSIT KOMERSIAL

Merupakan saldo deposit komersial per 31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Deposit Komersial	35.000.000	-
Total	<u>35.000.000</u>	<u>-</u>

11. DANA TITIPAN

Merupakan saldo dana titipan per 31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Dana titipan	-	22.551.606
Total	<u>-</u>	<u>22.551.606</u>

12. UTANG LAIN-LAIN

Merupakan saldo utang lain - lain per 31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Utang pembelian aset	-	880.308.000
Total	<u>-</u>	<u>880.308.000</u>

13. UTANG PAJAK

Merupakan saldo utang pajak per 31 Desember 2022 dan 2021, terdiri dari :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PPH pasal 21	69.586.713	21.049.564
PPH pasal 23	827.346	-
PPH pasal 4 ayat (2)	12.192.000	-
PPH pasal 29	138.430.591	531.765.337
Total	<u>221.036.650</u>	<u>552.814.901</u>

14. Liabilitas imbalan paska-kerja

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perhitungan imbalan pasca-kerja pada 31 Desember 2022 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Indra Catarya Situmeang dan Rekan, aktuaris independen, dengan laporannya tertanggal 10 Januari 2023.

Asumsi aktuarial dan metode yang digunakan dalam menentukan beban dan liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>
Tingkat bunga aktuarial	7,10%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%
Tingkat kematian	TMI 2019
Tingkat cacat	5% kematian
Metode valuasi aktuarial	<i>PUC Method</i>

Total Liabilitas (Aset) Neto yang diakui pada Laporan Posisi Keuangan:

	<u>2022</u>	<u>PKWT</u>	<u>PKWTT</u>	<u>Total</u>
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	387.091.034	387.091.034	63.718.419	450.809.453
Nilai wajar aset program	-	-	-	-
Defisit (Surplus)	387.091.034	387.091.034	63.718.419	450.809.453
Pengaruh batasan aset	-	-	-	-
Liabilitas (aset) neto yang diakui	<u>387.091.034</u>	<u>387.091.034</u>	<u>63.718.419</u>	<u>450.809.453</u>

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

14. Liabilitas imbalan paska-kerja (lanjutan)

Total Biaya Imbalan Kerja yang diakui pada Laporan Laba (Rugi) Komprehensif:

	PKWT	PKWTT	Total
Biaya jasa kini	177.402.123	41.660.771	219.062.894
Biaya jasa lalu	209.688.911	22.057.648	231.746.559
Total biaya	387.091.034	63.718.419	450.809.453

Rekonsiliasi yang menunjukkan mutasi nilai bersih dari Liabilitas (Aset) Neto yang diakui pada Laporan Posisi Keuangan:

	PKWT	PKWTT	Total
Saldo liabilitas (aset) awal tahun	-	-	-
Beban yang diakui pada laba/rugi	387.091.034	63.718.419	450.809.453
Jumlah yang diakui pada OCI	-	-	-
Pembayaran manfaat	-	-	-
Saldo liabilitas (aset) akhir tahun	387.091.034	63.718.419	450.809.453

15. ASET NETO

Merupakan aset neto untuk tahun 2022 dan 2021, terdiri dari :

	2022	2021
Aset neto tidak terikat	4.074.861.784	3.183.417.232
Aset neto terikat	2.674.121.451	3.431.901.813
Total	6.748.983.235	6.615.319.045

16. PENERIMAAN

Merupakan penerimaan untuk tahun 2022 dan 2021, terdiri dari :

	2022	2021
Penerimaan Iuran Anggota		
Tidak terikat	7.858.920.764	7.036.321.194
Terikat	1.854.250.000	3.476.901.813
Total	9.713.170.764	10.513.223.007

17. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Merupakan pengeluaran selama tahun 2022 dan 2021, terdiri dari :

	2022	2021
Tidak Terikat		
Beban Sumber Daya Manusia		
Beban gaji, upah dan honorarium	3.011.840.000	2.069.932.898
Beban imbalan paska-kerja	450.809.453	-
Beban pajak penghasilan pasal 21	330.374.213	280.804.200
Beban tunjangan transportasi	258.100.000	142.991.000
Beban tunjangan Hari Raya	239.986.666	273.291.667
Beban BPJS ketenagakerjaan	160.573.872	62.696.543
Beban BPJS kesehatan	71.166.000	23.799.015
Beban lembur	19.105.551	-
Subtotal	4.541.955.755	2.853.515.323

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

Merupakan pengeluaran selama tahun 2022 dan 2021, terdiri dari :

	2022	2021
Beban Umum dan Administrasi		
Beban sewa kantor	538.886.400	-
Beban <i>marketing communication</i>	424.040.000	-
Beban <i>service charge and sinking fund</i>	212.628.480	-
Beban perjalanan dinas	140.118.529	-
Beban telepon, fax, internet	95.816.338	3.447.319
Beban <i>gathering</i>	90.020.179	-
Beban jasa konsultan	86.025.000	-
Beban penyusutan peralatan	62.398.040	16.369.163
Beban sosialisasi anggota & masyarakat	62.285.000	-
Beban honor magang	53.250.000	-
Beban konsumsi	41.250.587	5.418.182
Beban alat tulis kantor	40.489.480	19.897.368
Beban ekspedisi, pos dan materai	39.426.322	23.288.969
Beban peresmian kantor	35.966.795	-
Beban listrik	34.659.376	6.018.533
Beban audit laporan keuangan	33.300.000	30.000.000
Beban operasional lainnya	28.586.900	-
Beban pemeliharaan Software/Hardware	22.700.000	-
Beban perlengkapan kantor	21.039.139	5.207.800
Beban inventaris/peralatan kantor	18.294.500	-
Beban <i>website development</i>	16.414.803	79.200.000
Beban sewa foto copy	12.647.257	41.500
Beban penyusutan perabotan dan furnitur	12.444.346	-
Beban <i>institutional campaign</i>	12.005.100	-
Beban training pegawai	11.900.000	-
Beban daily supply	11.655.992	-
Beban penyusutan desain interior	11.616.646	-
Beban penyusutan mekanik dan elektrikal	11.314.746	-
Beban tol, parkir dan bahan bakar	10.272.611	-
Beban seragam	8.403.900	-
Beban pendaftaran arbitrase ke pengadilan negeri	7.100.000	-
Beban laboratorium	4.177.668	-
Beban pajak lainnya	2.550.000	179.228.000
Beban pemeliharaan kantor	2.235.000	23.050.000
Beban pengadaan software	2.079.890	2.026.088
Beban penyusutan kendaraan	1.683.281	-
Beban seminar	700.000	-
Beban Pajak PPh 23	600.000	2.274.500
Beban <i>e - Signature</i>	547.500	27.459.000
Beban asuransi kendaraan kantor	370.500	-
Beban pemeliharaan kendaraan	264.000	-
Beban <i>entertainment</i>	200.998	-
Beban kesehatan rawat jalan	-	30.396.808
Lainnya	-	12.404.694
Subtotal	2.222.365.303	465.727.924
Beban Rapat Umum Anggota		
Beban rapat umum anggota	160.749.230	46.681.700
Beban ekspedisi RUA	13.991.077	-
Beban ATK RUA	11.305.000	-
Beban notaris RUA	6.000.000	6.000.000
Beban konsumsi RUA	5.363.660	-
Subtotal	197.408.967	52.681.700

**LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Terikat		
Honor mediator untuk <i>small claim</i>	2.287.500.000	45.000.000
Beban penyusutan perabotan dan furnitur	163.509.454	-
Beban penyusutan desain interior	107.473.654	-
Beban penyusutan mekanik dan elektrikal	53.547.254	-
Subtotal	<u>2.612.030.362</u>	<u>45.000.000</u>
Total	<u>9.573.760.387</u>	<u>3.416.924.947</u>

18. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN

Merupakan pendapatan/(beban) lain - lain selama tahun 2022 dan 2021, terdiri dari :

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pendapatan lain - lain		
Jasa giro	41.092.239	55.061.680
Bunga deposito	104.359.304	10.525.790
Subtotal	<u>145.451.543</u>	<u>65.587.470</u>
Beban lain- lain		
Pajak jasa giro	(8.025.937)	(11.011.149)
Administrasi bank	(4.741.202)	(3.790.000)
Subtotal	<u>(12.767.139)</u>	<u>(14.801.149)</u>
Total	<u>132.684.404</u>	<u>50.786.321</u>

19. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 4 Mei 2023

Lampiran

#2

Daftar Anggota

Daftar Anggota LAPS SJK

Sektor Perbankan

01

No.	Anggota
	Nama PUJK
HIMBARA	
1	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK
2	PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK
3	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
4	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
PERBANAS	
5	PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk
6	PT BANK PAN INDONESIA, Tbk
7	PT BANK CIMB NIAGA, Tbk
8	PT BANK PERMATA, Tbk
9	PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
10	PT BANK OCBC NISP, Tbk
11	PT BANK BTPN, Tbk
12	PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk
13	PT BANK SYARIAH INDONESIA (Persero), Tbk
14	PT BANK HSBC INDONESIA
15	PT BANK MEGA, Tbk
16	PT BANK UOB INDONESIA
17	MUFG BANK
18	PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk
19	PT BANK BJB, Tbk
20	PT BANK KEB HANA INDONESIA
21	PT BANK DKI
22	PT BANK DBS INDONESIA
23	PT BANK ANZ INDONESIA
24	PT BPD JAWA TIMUR
25	PT BANK JATENG
26	PT BANK MIZUHO INDONESIA

No.	Anggota
	Nama PUJK
27	STANDARD CHARTERED BANK
28	PT BANK BNP PARIBAS
29	CITIBANK
30	PT BANK ICBC INDONESIA
31	PT BANK KB BUKOPIN, Tbk
32	PT BANK SINARMAS, Tbk
33	PT BANK BTPN SYARIAH, Tbk
34	PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk
35	BANGKOK BANK
36	BANK OF CHINA
37	DEUTCHE BANK
38	JP MORGAN CHASE BANK
39	PT BANK ACEH SYARIAH
40	PT BANK AMAR INDONESIA
41	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk
42	PT BANK BCA SYARIAH
43	PT BANK BUMI ARTA, Tbk
44	PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk
45	PT BANK CCB INDONESIA, Tbk
46	PT BANK COMMONWEALTH
47	PT BANK CTBC INDONESIA
48	PT BANK GANESHA, Tbk
49	PT BANK IBK INDONESIA, Tbk
50	PT BANK INA PERDANA, Tbk
51	PT BANK INDEX SELINDO
52	PT BANK J TRUST INDONESIA, Tbk
53	PT BANK JASA JAKARTA
54	PT BANK KALIMANTAN TENGAH
55	PT BANK MANDIRI TASPEN

No.	Anggota
	Nama PUJK
56	PT BANK MASPION INDONESIA, Tbk
57	PT BANK MAYORA
58	PT BANK MEGA SYARIAH
59	PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk
60	PT BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk
61	PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
62	PT BANK MULTI ARTA SENTOSA
63	PT BANK NAGARI (BPD Sumatera Barat)
64	PT BANK NATIONALNOBU, Tbk
65	BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION
66	PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk
67	PT BANK OKE INDONESIA
68	PT BANK QNB INDONESIA, Tbk
69	PT BANK RAYA INDONESIA, Tbk (a/n BRIAGRO)
70	PT BANK RESONA PERDANIA
71	PT BANK SAHABAT SAMPOERNA
72	PT BANK SBI INDONESIA
73	PT BANK SHINHAN INDONESIA
74	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk
ASBANDA	
75	PT BPD BALI
76	PT BPD DIY
77	PT BPD JAMBI
78	PT BPD KALIMANTAN BARAT
79	PT BPD KALIMANTAN SELATAN
80	PT BPD KALTIMTARA
81	PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA
82	PT BPD NTB SYARIAH
83	PT BPD NTT
84	PT BPD PAPUA
85	PT BPD RIAU KEPRI
86	PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO
87	PT BPD SULSELBAR
88	PT BPD SUMATERA UTARA
89	PT BPD SUMSEL BABEL

No.	Anggota
	Nama PUJK
90	PT PANIN DUBAI SYARIAH BANK, Tbk
91	PT BANK JAGO, Tbk
92	PT ALLOBANK INDONESIA, Tbk (HARDA)
93	PT BANK ALADIN (MAYBANK/NET SYARIAH INDONESIA)
94	PT BANK BISNIS INTERNASIONAL
95	PT BANK BJB SYARIAH
96	PT BANK DIGITAL BCA (BANK ROYAL INDONESIA)
97	PT BANK FAMA INTERNASIONAL
98	PT BANK NEO COMMERCE, Tbk (YUDHA BHAKTI)
99	PT BANK PRIMA MASTER
100	PT BANK SEABANK INDONESIA (BKE)
101	PT BANK SYARIAH BUKOPIN
102	PT BANK VICTORIA SYARIAH
103	PT BPD BANTEN (BANK PUNDI INDONESIA), Tbk
104	PT BPD BENGKULU
105	PT BPD LAMPUNG
106	PT BPD SULAWESI TENGGARA
107	PT BPD SULTENG
PERBARINDO	
105	DPP PERBARINDO (PUSAT)
106	DPD PERBARINDO JAWA TIMUR
107	DPD PERBARINDO BALI
108	DPD PERBARINDO JAWA TENGAH
108	DPD PERBARINDO D.I.YOGYAKARTA
109	DPD PERBARINDO DKI & Sekitarnya
110	DPD PERBARINDO JAWA BARAT
111	DPD PERBARINDO N T B
112	DPD PERBARINDO LAMPUNG
113	DPD PERBARINDO SUMATERA SELATAN
114	DPD PERBARINDO SUMATERA UTARA
115	DPD PERBARINDO KALIMANTAN SELATAN
116	DPD PERBARINDO KALIMANTAN BARAT
117	DPD PERBARINDO SUMATERA BARAT
118	DPD PERBARINDO PAPUA - MALUKU
119	DPD PERBARINDO SULUT - GORONTALO

No.	Anggota
	Nama PUJK
120	DPD PERBARINDO SULAWESI SELATAN
121	DPD PERBARINDO RIAU
122	DPD PERBARINDO ACEH (NAD)
123	DPD PERBARINDO JAMBI
124	DPD PERBARINDO SULAWESI TENGGARA
125	DPD PERBARINDO KALIMANTAN TIMUR
126	DPD PERBARINDO KEPULAUAN RIAU

No.	Anggota
	Nama PUJK
127	DPD PERBARINDO SULAWESI TENGAH
128	DPD PERBARINDO NUSA TENGGARA TIMUR
129	DPD PERBARINDO KALIMANTAN TIMUR
130	DPD PERBARINDO KEPULAUAN RIAU
131	DPD PERBARINDO SULAWESI TENGAH
132	DPD PERBARINDO NUSA TENGGARA TIMUR

Sektor Asuransi

02

No.	Anggota
	Nama PUJK
A A U I	
1	PT AIG INSURANCE INDONESIA
2	PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA
3	PT ASURANSI ARTARINDO
4	PT ARTHAGRAHA GENERAL INS
5	PT ASURANSI ASEI INDONESIA
6	PT ASURANSI ASTRA BUANA
7	PT AVRIST GENERAL INSURANCE
8	PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA
9	PT BERDIKARI INSURANCE
10	PT ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA
11	PT ASURANSI BINA DANA ARTA TBK
12	PT ASURANSI BINA GRIYA UPAKARA
13	PT ASURANSI BINTANG TBK
14	PT ASURANSI BOSOWA PERISKOPE
15	PT BRI INSURANCE
16	PT ASURANSI BUANA INDEPENDENT
17	PT ASURANSI BUMIPUTERAMUDA 1967
18	PT ASURANSI CAKRAWALA PROTEKSI
19	PT ASURANSI CANDI UTAMA

No.	Anggota
	Nama PUJK
20	PT ASURANSI CENTRAL ASIA
21	PT CHINA TAIPING INSURANCE IND
22	PT CHUBB GENERAL INSURANCE
23	PT ASURANSI CITRA INTL UNDERWRITERS
24	PT ASURANSI DAYIN MITRA TBK
25	PT ASURANSI EKA LLOYD JAYA
26	PT ASURANSI ETIQA INTERNATIONAL
27	PT ASURANSI FPG INDONESIA
28	PT GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE
29	PT HARTA AMAN PRATAMA TBK
30	PT ASURANSI INTRA ASIA
31	PT ASURANSI JASA INDONESIA PERSERO
32	PT ASURANSI JASA TANIA TBK
33	PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA
34	PT KOOKMIN BEST INSURANCE
35	PT ASURANSI KREDIT INDONESIA PERSERO
36	PT KSK INSURANCE INDONESIA
37	PT LIPPO GENERAL INSURANCE TBK
38	PT MALACCA TRUST WUWUNGAN INS
39	PT MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE

No.	Anggota
	Nama PUJK
40	PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA
41	PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA TBK
42	PT ASURANSI MEGA PRATAMA
43	PT ASURANSI MERITZ KORINDO
44	PT ASURANSI MITRA PELINDUNG MUSTIKA
45	PT MNC ASURANSI INDONESIA
46	PT ASURANSI MSIG INDONESIA
47	PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA TBK
48	PT PAN PACIFIC INSURANCE
49	PT PLN INSURANCE
50	PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA
51	PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA
52	PT ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA
53	PT ASURANSI RAMAYANA TBK
54	PT REASURANSI INDONESIA UTAMA
55	PT REASURANSI MAIPARK
56	PT REASURANSI NUSANTARA MAKMUR
57	PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA
58	PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA
59	PT ASURANSI SAHABAT ARTA PROTEKSI
60	PT ASURANSI SAMSUNG TUGU
61	PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA
62	PT SIMAS INSURTECH
63	PT ASURANSI SINAR MAS
64	PT SOMPO INSURANCE INDONESIA
65	PT ASURANSI STACO MANDIRI
66	PT ASURANSI SUMIT OTO
67	PT ASURANSI TOKIO MARINE IND
68	PT ASURANSI TOTAL BERSAMA
69	PT ASURANSI TRI PAKARTA
70	PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA
71	PT TUGU REASURANSI INDONESIA
72	PT ASURANSI UMUM BCA
73	PT ASURANSI UMUM MEGA

No.	Anggota
	Nama PUJK
74	PT ASURANSI UMUM VIDEI
75	PT VICTORIA INSURANCE
76	PT ASURANSI WAHANA TATA
77	PT ZURICH ASURANSI INDONESIA
A A J I	
78	PT ASURANSI JIWA ADISARANA WANAARTHA
79	PT ASURANSI JIWA SEAINSURE (D/H PT ASURANSI JIWA ADVISTA)
80	PT AIA FINANCIAL
81	PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA
82	PT ASURANSI JIWA ASTRA
83	PT AVRIST ASSURANCE
84	PT AXA FINANCIAL INDONESIA
85	PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES
86	PT ASURANSI JIWA BCA
87	PT BNI LIFE INSURANCE
88	PT ASURANSI BRI LIFE
89	AJB BUMIPUTERA 1912
90	PT BHINNEKA LIFE INDONESIA
91	PT CAPITAL LIFE INDONESIA
92	PT CENTRAL ASIA FINANCIAL
93	PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA
94	PT CHINA LIFE INSURANCE INDONESIA
95	PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA
96	PT ASURANSI CIGNA
97	PT ASURANSI CIPUTRA INDONESIA
98	PT FWD INSURANCE INDONESIA
99	PT EQUITY LIFE INDONESIA
100	PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA
101	PT GREAT EASTERN LIFE INDONESIA
102	PT HANWHA LIFE INSURANCE INDONESIA
103	PT HEKSA SOLUTION INSURANCE
104	PT INDOLIFE PENSIONTAMA
105	PT ASURANSI JIWA INDOSURYA SUKSES

No.	Anggota
	Nama PUJK
106	PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA
107	PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO)
108	PT ASURANSI JIWA KRESNA
109	PT LIPPO LIFE ASSURANCE
110	PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
111	PT MNC LIFE ASSURANCE
112	PT ASURANSI JIWA NASIONAL
113	PT PACIFIC LIFE INSURANCE
114	PT PFI MEGA LIFE INSURANCE
115	PT PANIN DAI-ICHI LIFE
116	PT PASARAYA LIFE INSURANCE
117	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
118	PT ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA
119	PT ASURANSI JIWA SEQUIS FINANCIAL
120	PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE
121	PT ASURANSI SIMAS JIWA
122	PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK
123	PT ASURANSI JIWA STARINVESTAMA
124	PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA
125	PT ASURANSI JIWA TASPEN
126	PT TOKIO MARINE LIFE INSURANCE INDONESIA
127	PT PERTA LIFE INSURANCE (D/H PT ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI)
128	PT VICTORIA ALIFE INDONESIA
129	PT ZURICH TOPAS LIFE
130	PT ASURANSI JIWA IFG
A A S I	
131	PT CAPITAL LIFE SYARIAH
132	PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
133	PT ASURANSI JIWA SYARIAH JASA MITRA ABADI (JMA SYARIAH)
134	PT ASURANSI JIWA SYARIAH AL AMIN
135	PT ASURANSI SYARIAH KELUARGA INDONESIA
136	PT ASURANSI JIWA SYARIAH AMANAH JIWA GIRI ARTHA

No.	Anggota
	Nama PUJK
137	PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA
138	PT ASURANSI ASKRIDA SYARIAH
139	PT ASURANSI JASINDO SYARIAH
140	PT ASURANSI SONWELIS TAKAFUL
141	PT ASURANSI TAKAFUL UMUM
142	PT ASURANSI CHUBB SYARIAH INDONESIA
143	PT ZURICH GENERAL TAKAFUL INDONESIA
144	PT REASURANSI SYARIAH INDONESIA
APPARINDO	
144	PT AA PIALANG ASURANSI
145	PT ADI ANTARA ASIA
146	PT ADIKARA MITRA SAMPURNA
147	PT ADONAI PIALANG ASURANSI
148	PT ADVIS TERAPAN PROTEKSINDO
149	PT AIGRA INSURANCE BROKERS
150	PT ALIH RISIKO MAKNA SEJAHTERA
151	PT ANDIKA MITRA SEJATI
152	PT ANTARA INTERMEDIARY INDONESIA
153	PT ANUGRAH ATMA ADIGUNA
154	PT ANUGRAH MEDAL BROKER
155	PT ARTHA BINA BHAYANGKARA
156	PT ARTHA RAHARJA
157	PT ASIA FINANCE RISK
158	PT ASIA INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS
159	PT FINS INSURANCE BROKERS
160	PT ASTA KANTI
161	PT ASYKI SARANA SEJAHTERA
162	PT AXLE ASIA
163	PT BAHTERA MITRA JASA
164	PT BAHTERA WAHANA TRITATA
165	PT BARRON PANDU ABADI
166	PT BASTAMA MITRA PERSADA
167	PT BEST PROTEKSI INDONESIA

No.	Anggota
	Nama PUJK
168	PT BGIB INSURANCE BROKER
169	PT BHINEKA CIPTA LESTARI
170	PT BINA DANA SEJAHTERA
171	PT BINA KRIDATAMA NUSANTARA
172	PT BINASENTRA PURNA
173	PT BINTANG JASA SELARAS INSURANCE BROKERS
174	PT BIRAMA INTER GLOBAL BROKER ASURANSI
175	PT BRILLIANT INSURANCE BROKERS
176	PT BRINGIN SEJAHTERA MAKMUR
177	PT BROCADE INSURANCE BROKER
178	PT BUANA JASA PRATAMA
179	PT BUMI INSURANCE BROKERS
180	PT CAHAYA MITRA SATYA BERSAMA PIALANG ASURANSI
181	PT CAKRABUANA INSURANCE BROKERS
182	PT CARAKA MULIA
183	PT CENTRAL ANTAR JASA
184	PT CIPTA INTEGRA DUTA
185	PT DINAMIKA PRIMA SERVITAMA
186	PT DINDA PRADANA INSURANCE BROKER
187	PT DRITAMA BROKERINDO
188	PT DUTA INTI VARIA
189	PT DUTA SEMESTA RAYA
190	PT ERBE BROKER ASURANSI INDONESIA
191	PT ESTIKA JASATAMA
192	PT EXPERTA PIALANG ASURANSI NUSANTARA
193	PT MNC INSURANCE BROKERS
194	PT FISTLIGHT INDONESIA INSURANCE BROKERS
195	PT FOKUS SOLUSI PROTEKSI
196	PT FRED MARIUS SABINI INSURANCE BROKER
197	PT FRESNEL PERDANA MANDIRI
198	PT PASAR POLIS INSURANCE BROKER

No.	Anggota
	Nama PUJK
199	PT GLOBAL INSURANCE BROKER
200	PT GLOBAL RISK MANAGEMENT
201	PT TRASMI PIALANG ASURANSI D/H PT GRASIA MEDIA UTAMA
202	PT SINERGI DUTA INSURANCE BROKERS
203	PT HAGATI BROKERINDO
204	PT IBS INSURANCE BROKING SERVICE
205	PT INDEPENDEN PIALANG ASURANSI
206	PT INDOMOBIL INSURANCE CONSULTANT
207	PT INDONESIA INSURANCE BROKERS
208	PT INDOSURANCE BROKER UTAMA
209	PT SOLUSIUTAMA TEKNO BROKER ASURANSI
210	PT INTERCOASTAL INDONESIA
211	PT INTERJASA KREASI BROKERINDO
212	PT ISTPRO INTI NUSA
213	PT JAKARTA INTI BERSAMA
214	PT JASA ADVISINDO SEJAHTERA
215	PT JAYA PROTEKSINDO SAKTI
216	PT JETS INDONESIA
217	PT JUPITER INSURANCE BROKER AND CONSULTANT
218	PT KALI BESAR RAYA UTAMA
219	PT KANTATA MITRA JAMINDO
220	PT KRIDA UPAYA TUNGGAL
221	PT LEAD INSURANCE BROKERS
222	PT LEGOWO
223	PT LIBERTY & GENERAL RISK SERVICE
224	PT LIDEAN PIALANG ASURANSI
225	PT LUMBUNG SARI
226	PT MAGNUS MITRA SEJAHTERA
227	PT MAJU ANUGERAH PROTEKSI
228	PT MANGGALA ARTHA SEJAHTERA
229	PT MANUNGGAL BHAKTI SUCI
230	PT MEGAH PUTRA MANUNGGAL

No.	Anggota
	Nama PUJK
231	PT MITRA CIPTA PROTEKSINDO
232	PT MITRA DHANA ATMHARAKSHA
233	PT MITRA HARMONI INSURANCE BROKER
234	PT MITRA IBISNIS TERAPAN
235	PT MITRA ISWARA & RORIMPANDEY
236	PT MITRA JASA PRATAMA
237	PT MITRA PROTEKSI MADANI
238	PT MITRA SENTOSA PARAMAABADI
239	PT MITRA MANDIRI PIALANG ASURANSI
240	PT MULTI ASIH PRATAMA
241	PT MULTINIAGA INTERMEDIA PROTEKSI
242	PT MUNICH LLOYD INTERNATIONAL BROKERS
243	PT NATIONAL INSURANCE BROKERS
244	PT NUGRAHA PERKASA MANDIRI
245	PT DAIDAN UTAMA PIALANG ASURANSI
246	PT NUSANTARA INSURANCE BROKER & CONSULTANT
247	PT PACIFIC INDONESIA BERJAYA
248	PT PANDAI INDONESIA PIALANG ASURANSI
249	PT PASOPATI INS BROKER
250	PT PAIB INDONESIA
251	PT PARTNERINDO INTI CIPTA
252	PT PEGASUS INSURINDO
253	PT PERDANA WAHANA SENTOSA
254	PT PERISAI BHAKTI RAHARDJO
255	PT PIALANG ASURANSI PROVIS MITRA SINERGI
256	PT PIALANG ASURANSI NEKSUS
257	PT PIALANG ASURANSI NASIONAL INDONESIA JAYA
258	PT PILAR MITRA PROTEKSI
259	PT PIALANG ASURANSI INDOTEKNO
260	PT PREMIER INVESTAMA BERSAMA
261	PT PRIORITAS PIALANG ASURANSI
262	PT PROASIA BROKER ASURANSI

No.	Anggota
	Nama PUJK
263	PT PROTEKSI ANTAR NUSA
264	PT RAYSOLUSI PIALANG ASURANSI
265	PT PROTEKSI JAYA MANDIRI
266	PT PROTEKSI PRADANA
267	PT PROTEKSINDO BROKER ASURANSI
268	PT RAHMAT PIALANG ASURANSI
269	PT RAJAWALI INSURANCE BROKERS
270	PT RIA PRATAMA MEGA SEJAHTERA
271	PT RIMAS PROTEKSINDO UTAMA
272	PT SAFE INSURANCE BROKERS
273	PT SAKSAMA ARTA
274	PT SALVUS INTI
275	PT SARANA JANESIA UTAMA
276	PT SATHYA WAHANA INDONESIA
277	PT SEDANA PASIFIK SERVISTAMA
278	PT SENTANA MITRA KUALITA
279	PT SHINTA INSERVE
280	PT SINERGI ADI UTAMA / SINERGI ADI UTAMA INSURANCE BROKERS
281	PT SINERGI MITRATAMA PROTEKSI
282	PT SINO INSURANCE BROKERS
283	PT SUKSES UTAMA SEJAHTERA
284	PT SUN MAJU PIALANG ASURANSI
285	PT HONDA INSURANCE BROKER
286	PT TAAWUN INDONESIA SEJAHTERA
287	PT TALISMAN INSURANCE BROKERS
288	PT TIGARA MITRA SEJAHTERA
289	PT TRI DHARMA PROTEKSI
290	PT TUGU INSURANCE BROKERS
291	PT WEB PROTEKSI SOLUSINDO
292	PT AON INDONESIA
293	PT FUTUREADY INSURANCE BROKER
294	PT HOWDEN INSURANCE BROKERS INDONESIA
295	PT MARSH INDONESIA

No.	Anggota
	Nama PUJK
296	PT PANASONIC INSURANCE SERVICE INDONESIA
297	PT TOYOTA TSUSHO INSURANCE BROKER INDONESIA
298	PT WILLIS INDONESIA/WILLIS TOWERS WATSON INSURANCE BROKER INDONESIA
299	PT LESTARI CIPTA HOKINDO
300	PT ADHI LINTAS TANASE
301	PT ADONAI PIALANG REASURANSI
302	PT AON REINSURANCE BROKERS INDONESIA
303	PT ARTHA DANA MANDIRI
304	PT ASIA REINSURANCE BROKERS INDONESIA
305	PT ASIARE BINAJASA
306	PT ASRINDA ARTHASANGGA
307	PT ATLASRE GLOBAL INTERNASIONAL
308	PT BEST ONE ASIA REINSURANCE BROKERS
309	PT CBDANH PIALANG REASURANSI
310	PT CHARTERED REINSURANCE BROKERS
311	PT CIPTA COLEMONT ASIA REINSURANCE BROKER
312	PT DHARMAPALA PIALANG REASURANSI
313	PT ENERGI MANDIRI INTERNASIONAL
314	PT ESA BINA SEJATI
315	PT FREED DINAMIKA INDONESIA
316	PT GARUDA JASA PRATAMA
317	PT HANOFER INDONESIA
318	PT IBS REINSURANCE BROKERS

No.	Anggota
	Nama PUJK
319	PT IBU REISURANCE BROKER UTAMA
320	PT IGNA ASIA
321	PT INARE PROTEKSI INTERNASIONAL
322	PT JAKARTA RAYA PIALANG REASURANSI
323	PT JASA CIPTA REMBAKA
324	PT JAYA PROTEKSINDO SAKTI REINSURANCE
325	PT JBBODA VIVA INDONESIA REINSURANCE BROKERS
326	PT KMDASTUR INDONESIA REINSURANCE BROKERS
327	PT LINTAS INSAN KARYA SEJAHTERA PIALANG REASURANSI
328	PT MARSH REINSURANCE BROKERS INDONESIA
329	PT MEGA JASA REINSURANCE BROKERS
330	PT MITRA UTAMA REASURANSI
331	PT PARAGON REINSURANCE BROKERS
332	PT PARARE INTERNATIONAL
333	PT PIALANG REASURANSI DEKAI INDONESIA
334	PT PWS REINSURANCE BROKER
335	PT SEDANA PROTEKSI SINERGI PIALANG REASURANSI
336	PT SIMAS REINSURANCE BROKERS
337	PT SMARTINDO PIALANG REASURANSI
338	PT TALA RE INTERNATIONAL
339	PT TRINITY REINSURANCE BROKER
340	PT WILLIS REINSURANCE BROKERS INDONESIA

Sektor Pasar Modal

03

No.	Anggota
	Nama PUJK
A P E I	
1	PT AJAIB SEKURITAS INDONESIA
2	PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA
3	PT AMANTARA SEKURITAS INDONESIA
4	PT ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA
5	PT ARTHA SEKURITAS INDONESIA
6	PT BAHANA SEKURITAS
7	PT BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS
8	PT BCA SEKURITAS
9	PT BINAARTHA SEKURITAS
10	PT BNC SEKURITAS INDONESIA
11	PT BNI SEKURITAS
12	PT BRI DANAREKSA SEKURITAS
13	PT BUANA CAPITAL SEKURITAS
14	PT BUMIPUTERA SEKURITAS
15	PT CAPITAL BRIDGE SEKURITAS
16	PT CARMEL SEKURITAS NUSANTARA
17	PT CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA
18	PT CIPTADANA SEKURITAS ASIA
19	PT CITIGROUP SEKURITAS INDONESIA
20	PT CLSA SEKURITAS INDONESIA
21	PT CORPUS SEKURITAS INDONESIA
22	PT CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA
23	PT DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA
24	PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS
25	PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA
26	PT DEUTSCHE SEKURITAS INDONESIA
27	PT DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA
28	PT DWIDANA SAKTI SEKURITAS
29	PT EKOKAPITAL SEKURITAS
30	PT EKUATOR SWARNA SEKURITAS

No.	Anggota
	Nama PUJK
31	PT ELIT SUKSES SEKURITAS
32	PT EQUITY SEKURITAS INDONESIA
33	PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS
34	PT EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA
35	PT FAC SEKURITAS INDONESIA
36	PT FORTE GLOBAL SEKURITAS
37	PT GARUDA NUSANTARA SEKURITAS
38	PT HARITA KENCANA SEKURITAS
39	PT HENAN PUTIHRAI
40	PT HSBC SEKURITAS INDONESIA
41	PT INDO CAPITAL SEKURITAS
42	PT INDO MITRA SEKURITAS
43	PT INDO PREMIER SEKURITAS
44	PT INDONESIA MAKMUR GROUP SEKURITAS
45	PT YUGEN BERTUMBUH SEKURITAS
46	PT INTI FIKASA SEKURITAS
47	PT INTI TELADAN SEKURITAS
48	PT INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS
49	PT JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS
50	PT JP MORGAN SEKURITAS INDONESIA
51	PT KAF SEKURITAS INDONESIA
52	PT KGI SEKURITAS INDONESIA
53	PT KIWOOM SEKURITAS INDONESIA
54	PT KOPEDANA MITRA SEKURITAS
55	PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA
56	PT KRESNA SEKURITAS
57	PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS
58	PT MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA
59	PT MAGENTA KAPITAL SEKURITAS INDONESIA
60	PT MAHAKARYA ARTHA SEKURITAS

No.	Anggota
	Nama PUJK
61	PT MAHAISTRA ANDALAN SEKURITAS
62	PT MAKINDO SEKURITAS
63	PT MANDIRI SEKURITAS
64	PT MASINDO ARTHA SECURITAS
65	PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA
66	PT MEGA CAPITAL SEKURITAS
67	PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK
68	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA
69	PT MITRA ANDALAN SEKURITAS
70	PT MNC SEKURITAS
71	PT MORGAN STANLEY SEKURITAS INDONESIA
72	PT NET SEKURITAS
73	PT NIKKO SEKURITAS INDONESIA
74	PT NILAI INTI SEKURITAS
75	PT NOMURA SEKURITAS INDONESIA
76	PT NONGHYUP KORINDO SEKURITAS INDONESIA
77	PT OCBC SEKURITAS INDONESIA
78	PT OSO SEKURITAS INDONESIA
79	PT PACIFIC 2000 SEKURITAS
80	PT PACIFIC SEKURITAS INDONESIA
81	PT PANCA GLOBAL SEKURITAS
82	PT PANIN SEKURITAS, TBK
83	PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS
84	PT PEAK SEKURITAS INDONESIA
85	PT PHILLIP SEKURITAS INDONESIA
86	PT PHINTRACO SEKURITAS
87	PT PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS
88	PT POOL ADVISTA SEKURITAS
89	PT PRATAMA CAPITAL SEKURITAS
90	PT PROFINDO SEKURITAS INDONESIA
91	PT REKSA DEPOK SEKURITAS
92	PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK
93	PT RHB SEKURITAS INDONESIA

No.	Anggota
	Nama PUJK
94	PT ROYAL INVESTIUM SEKURITAS
95	PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA
96	PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS
97	PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA
98	PT SINARMAS SEKURITAS
99	PT STAR REKSA SEKURITAS
100	PT SUCOR SEKURITAS
101	PT SUPRA SEKURITAS INDONESIA
102	PT SURYA FAJAR SEKURITAS
103	PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
104	PT TRUST SEKURITAS
105	PT UBS SEKURITAS INDONESIA
106	PT UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS
107	PT UOB KAY HIAN SEKURITAS
108	PT VALBURY SEKURITAS INDONESIA
109	PT VERDHANA SEKURITAS INDONESIA
110	PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA
111	PT WANTEG SEKURITAS
112	PT WATERFRONT SEKURITAS INDONESIA
113	PT YUANTA SEKURITAS INDONESIA
114	PT YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK
A M I I	
115	PT ANARGYA ASET MANAJEMEN
116	PT ANUGERAH SENTRA INVESTAMA
117	PT ARCHITAS ASSET MANAGEMENT INDONESIA
118	PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA
119	PT ASIA RAYA KAPITAL
120	PT AURORA ASSET MANAGEMENT
121	PT AVRIST ASSET MANAGEMENT
122	PT AYERS ASIA ASSET MANAGEMENT
123	PT ASANUSA ASSET MANAGEMENT
124	PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT

No.	Anggota
	Nama PUJK
125	PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN
126	PT BERDIKARI MANAJER INVESTASI
127	PT BERLIAN ASET MANAJEMEN
128	PT BNI ASSET MANAGEMENT
129	PT BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
130	PT BOWSPRIT ASSET MANAGEMENT
131	PT BUMIPUTERA MANAJEMEN INVESTASI
132	PT CAPITAL ASSET MANAGEMENT
133	PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT
134	PT CORFINA CAPITAL
135	PT CORPUS KAPITAL MANAJEMEN
136	PT DANAKITA INVESTAMA
137	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT
138	PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA
139	PT EKUATOR SWARNA INVESTAMA
140	PT EMCO ASSET MANAGEMENT
141	PT EQUITY SEKURITAS INDONESIA
142	PT FOSTER ASSET MANAGEMENT
143	PT FWD ASSET MANAGEMENT
144	PT GEMILANG INDONESIA MANAJER INVESTASI
145	PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT
146	PT INDOASIA ASET MANAJEMEN
147	PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT
148	PT INDOSTERLING ASSET MANAGEMENT
149	PT INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT
150	PT INTRU NUSANTARA
151	PT DELAPAN SEMBILAN ASSET MANAGEMENT
152	PT JASA CAPITAL ASSET MANAGEMENT
153	PT JARVIS ASET MANAJEMEN
154	PT KISI ASSET MANAGEMENT
155	PT KIWOOM INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA

No.	Anggota
	Nama PUJK
156	PT KRESNA ASSET MANAGEMENT
157	PT LAUTANDHANA INVESTMENT MANAGEMENT
158	PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT
159	PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI INDONESIA
160	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA
161	PT MAYBANK ASSET MANAGEMENT
162	PT MEGA ASSET MANAGEMENT
163	PT MEGA CAPITAL INVESTAMA
164	PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN
165	PT MNC ASSET MANAGEMENT
166	PT MILLENIUM CAPITAL MANAGEMENT
167	PT NET ASSETS MANAGEMENT
168	PT NIKKO SECURITIES INDONESIA
169	PT NUSADANA INVESTAMA INDONESIA
170	PT NUSANTARA SENTRA KAPITAL
171	PT NARADA KAPITAL INDONESIA
172	PT OSO MANAJEMEN INVESTASI
173	PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
174	PT PAN ARCADIA CAPITAL
175	PT PANIN ASSET MANAGEMENT
176	PT PARAMITRA ALFA SEKURITAS
177	PT PHILLIP ASSET MANAGEMENT
178	PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA
179	PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT
180	PT POST ASSET MANAGEMENT
181	PT PRATAMA CAPITAL ASSETS MANAGEMENT
182	PT PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT
183	PT PROSPERA ASET MANAGEMENT
184	PT PAYTREN ASET MANAJEMEN
185	PT POOL ADVISTA ASET MANAJEMEN
186	PT RAHA ASET MANAJEMEN
187	PT RECAPITAL ASSET MANAGEMENT

No.	Anggota
	Nama PUJK
188	PT RELIANCE MANAJER INVESTASI
189	PT RHB ASSET MANAGEMENT INDONESIA
190	PT SAMUEL ASET MANAJEMEN
191	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA
192	PT SEMESTA ASET MANAJEMEN
193	PT SEQUIS ASET MANAJEMEN
194	PT SETIABUDI INVESTMENT MANAGEMENT
195	PT SHINHAN ASSET MANAGEMENT
196	PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT
197	PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT

No.	Anggota
	Nama PUJK
198	PT SURYA TIMUR ALAM RAYA
199	PT SYAILENDRA CAPITAL
200	PT SHINOKEN ASSET MANAGEMENT INDONESIA
201	PT UOB ASSET MANAGEMENT INDONESIA
202	PT TREASURE FUND INVESTAMA
203	PT TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT
204	PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT
205	PT VICTORIA MANAJEMEN INVESTASI
206	PT WANTEG ASSET MANAGEMENT
207	PT YUANTA ASSET MANAGEMENT

Sektor Pembiayaan

04

No.	Anggota
	Nama PUJK
1	PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
2	PT ANDALAN FINANCE INDONESIA
3	PT ARTHAASIA FINANCE
4	PT ASTRA AUTO FINANCE
5	PT ASTRA SEDAYA FINANCE
6	PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE
7	PT BCA FINANCE
8	PT BCA MULTIFINANCE
9	PT BFI FINANCE INDONESIA
10	PT BNI MULTIFINANCE
11	PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA
12	PT BUANA FINANCE
13	PT BUMIPUTERA - BOT FINANCE
14	PT BUSSAN AUTO FINANCE
15	PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA

No.	Anggota
	Nama PUJK
16	PT CENTRAL JAVA POWER
17	PT CHAILEASE FINANCE INDONESIA
18	PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING
19	PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
20	PT CLIPAN FINANCE INDONESIA
21	PT COMMERCE FINANCE
22	PT DIPO STAR FINANCE
23	PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
24	PT HASJRAT MULTIFINANCE
25	PT HINO FINANCE INDONESIA
26	PT HOME CREDIT INDONESIA
27	PT INDOMOBIL FINANCE INDONESIA
28	PT SARANA MAJUKAN EKONOMI FINANCE INDONESIA
29	PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA
30	PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

No.	Anggota
	Nama PUJK
31	PT KDB TIFA FINANCE
32	PT KOEXIM MANDIRI FINANCE
33	PT KOMATSU ASTRA FINANCE
34	PT MANDALA MULTIFINANCE
35	PT MANDIRI TUNAS FINANCE
36	PT MANDIRI UTAMA FINANCE
37	PT MAYBANK INDONESIA FINANCE
38	PT MEGA CENTRAL FINANCE
39	PT MITSUBISHI HC CAPITAL AND FINANCE INDONESIA
40	PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA
41	PT MNC FINANCE
42	PT MULTINDO AUTO FINANCE
43	PT NUSA SURYA CIPTADANA
44	PT ORICO BALIMOR FINANCE
45	PT ORIX INDONESIA FINANCE
46	PT OTO MULTIARTHA
47	PT PPA FINANCE
48	PT SGMW MULTIFINANCE INDONESIA
49	PT SHINHAN INDO FINANCE
50	PT SINAR MAS MULTIFINANCE
51	PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE
52	PT SMFL LEASING INDONESIA
53	PT SUMMIT OTO FINANCE
54	PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE
55	PT SUZUKI FINANCE INDONESIA
56	PT TAKARI KOKOH SEJAHTERA
57	PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
58	PT TRANSPACIFIC FINANCE
59	PT TRIHAMAS FINANCE
60	PT VERENA MULTI FINANCE
61	PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA
62	PT AB SINAR MAS MULTIFINANCE
63	PT AEON CREDIT SERVICE INDONESIA
64	PT AKULAKU FINANCE INDONESIA

No.	Anggota
	Nama PUJK
65	PT ARMADA FINANCE
66	PT ARTHA PRIMA FINANCE
67	PT ASTRA MULTI FINANCE
68	PT CAPELLA MULTIDANA
69	PT CENTURY TOKYO LEASING INDONESIA
70	PT CIPTADANA MULTIFINANCE
71	PT CLEMONT FINANCE INDONESIA
72	PT DANAREKSA FINANCE
73	PT EQUITY FINANCE INDONESIA
74	PT HEXA FINANCE INDONESIA
75	PT INTAN BARUPRANA FINANCE
76	PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE
77	PT KARUNIA MULTIFINANCE
78	PT KARYA TEKNIK MULTIFINANCE
79	PT MEGA AUTO FINANCE
80	PT MEGA FINANCE
81	PT MNC GUNA USAHA INDONESIA
82	PT PT NFSI Financial Services
83	PT PACIFIC MULTI FINANCE
84	PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM
85	PT PARAMITRA MULTIFINANCE
86	PT PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE
87	PT RADANA BHASKARA FINANCE
88	PT REKSA FINANCE
89	PT SINARMAS HANA FINANCE
90	PT SMART MULTI FINANCE
91	PT SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE
92	PT ADITAMA FINANCE
93	PT AL IJARAH FINANCE INDONESIA
94	PT ANADANA GLOBAL MULTIFINANCE
95	PT ANUGERAH BUANA CENTRAL MULTIFINANCE
96	PT ANUGERAH UTAMA MULTIFINANCE
97	PT ASIA MULTIDANA
98	PT ASIATIC SEJAHTERA FINANCE

No.	Anggota
	Nama PUJK
99	PT ASTRIDO PACIFIC FINANCE
100	PT ATOME FINANCE INDONESIA
101	PT BATARA INTERNASIONAL FINANSINDO
102	PT BENTARA SINERGIES MULTIFINANCE
103	PT BETA INTI MULTIFINANCE
104	PT BHUMINDO SENTOSA ABADI FINANCE
105	PT BIMA MULTI FINANCE
106	PT BINTANG MANDIRI FINANCE
107	PT BOSOWA MULTI FINANCE
108	PT PT MODALKU FINANSIAL INDONESIA
109	PT CAKRAWALA CITRAMEGA MULTIFINANCE
110	PT CATURNUSA SEJAHTERA FINANCE
111	PT CITIFIN MULTIFINANCE SYARIAH
112	PT DAINDO INTERNASIONAL FINANCE
113	PT DANA UNICO FINANCE
114	PT DANASUPRA ERAPACIFIC
115	PT EMPEROR FINANCE INDONESIA
116	PT FINACCEL FINANCE INDONESIA
117	PT FORTUNA MULTI FINANCE
118	PT FUJI FINANCE INDONESIA
119	PT GLOBALINDO MULTI FINANCE
120	PT HEWLETT-PACKARD FINANCE INDONESIA
121	PT IFS CAPITAL INDONESIA
122	PT INDONESIA INTERNATIONAL FINANCE
123	PT INTERNUSA TRIBUANA CITRA MULTI FINANCE
124	PT ITC AUTO MULTI FINANCE
125	PT KB BUKOPIN FINANCE
126	PT KRESNA REKSA FINANCE

No.	Anggota
	Nama PUJK
127	PT LOTTE CAPITAL INDONESIA
128	PT MITRA ADIPRATAMA SEJATI FINANCE
129	PT MITRA DANA TOP FINANCE
130	PT MUTIARA MULTI FINANCE
131	PT PERMATA FINANCE INDONESIA
132	PT POOL ADVISTA FINANCE
133	PT PRATAMA INTERDANA FINANCE
134	PT PROLINE FINANCE INDONESIA
135	PT RABANA INVESTINDO
136	PT RAMA MULTI FINANCE
137	PT RESONA INDONESIA FINANCE
138	PT RINDANG SEJAHTERA FINANCE
139	PT SAHABAT FINANSIAL KELUARGA
140	PT SAISON MODERN FINANCE
141	PT SARANA GLOBAL FINANCE INDONESIA
142	PT SATYADHIKA BAKTI MULTI FINANCE
143	PT SEMBRANI FINANCE INDONESIA
144	PT SHAKTI TOP FINANCE
145	PT SHARIA MULTIFINANCE ASTRA
146	PT SUNINDO KOOKMIN BEST FINANCE
147	PT TEMPO UTAMA FINANCE
148	PT TEZ CAPITAL AND FINANCE
149	PT TOPAS MULTI FINANCE
150	PT TRIHAMAS FINANCE SYARIAH
151	PT TRIPRIMA MULTIFINANCE
152	PT TRUST FINANCE INDONESIA
153	PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA
154	PT VARIA INTRA FINANCE
155	PT WOKA INTERNATIONAL

Sektor Pergadaian

05

No.	Anggota
	Nama PUJK
1	PT ASLI GADAI SEJAHTERA
2	PT AMANAH TERIMA GADAI
3	PT AWI GADAI JOGJA
4	PT BERKAT GADAI SUMATERA
5	PT BIRU GADAI INDO
6	PT BUDI GADAI INDONESIA
7	PT CIPTA DANA GADAI
8	PT DOTRI GADAI JAYA
9	PT DPM GADAI SEJAHTERA
10	PT DWITUNGGAL PRIMA PEGADAI
11	PT DWITUNGGAL PUTRA PEGADAI
12	PT GADAI ARTHATAMA NIAGA SEJAHTERA SYARIAH
13	PT GADAI CAHAYA ABADI MULIA
14	PT GADAI CAHAYA DANA ABADI
15	PT GADAI CAHAYA TERANG ABADI
16	PT GADAI CIPTA PELUANG
17	PT GADAI DIGITAL MODERN
18	PT GADAI DWIJAYA UTAMA
19	PT GADAI ELEKTRONIK JAKARTA
20	PT GADAI EMAS KRESNO ANDALAN
21	PT GADAI JADI BERKAH
22	PT GADAI LAKSANA JAYA
23	PT GADAI LANCAR JAYA
24	PT GADAI LANGGENG JAYA
25	PT GADAI LESTARI JAYA
26	PT GADAI MANDIRI AGUNG
27	PT GADAI MAS BALI
28	PT GADAI MAS DKI
29	PT GADAI MAS KALTIM
30	PT GADAI MAS NTB
31	PT GADAI MAS SULSEL

No.	Anggota
	Nama PUJK
32	PT GADAI MITRA RAKYAT
33	PT GADAI MULIA KEPRI
34	PT GADAI MURAH JOGJA
35	PT GADAI MURNI ARTHA
36	PT GADAI OGAN BARU
37	PT GADAI PINJAM INDONESIA
38	PT GADAI PRIMA NUSANTARA
39	PT GADAI SAKTI NUSANTARA
40	PT GADAI SENYUM SUKA CITA
41	PT GADAI SOLUSI BERSAMA
42	PT GADAI SUKSES ANEKA MULIA JABAR
43	PT GADAI TERANG ABADI MULIA
44	PT GADAI TOP JAYA
45	PT GADAI VALUEMAX INDONESIA
46	PT GDC SOLUSI GADAI
47	PT GRAHA SANTIKA GADAI
48	PT GRIYA GADAI INDONESIA
49	PT IJAB GADAI INDONESIA
50	PT INDOGOLD SOLUSI GADAI
51	PT INDONESIA GADAI OKE
52	PT INDOPROF GADAI SEJATI
53	PT JADIDUIT GADAI MAKMUR
54	PT JASA GADAI SYARIAH
55	PT JAWA BARAT GADAI
56	PT LAKSANA GADAI INDONESIA
57	PT LESCA GADAI PREMIER
58	PT MAJESTY GADAI PRIMA
59	PT MARI GADAI SEJAHTERA
60	PT MEGA GADAI INDONESIA
61	PT MEGA MAS GADAI
62	PT MITRA GADAI ABADI

No.	Anggota
	Nama PUJK
63	PT NIMFA GADAI SEJAHTERA
64	PT NUSA GADAI MANDIRI
65	PT PEGADAIAN
66	PT PERGADAIAN DANA SENTOSA
67	PT PERGADAIAN MITRA BERSAMA
68	PT PRAHA GADAI INDONESIA
69	PT PRIMA GADAI SEJAHTERA
70	PT PUSAT GADAI BAROKAH
71	PT PUSAT GADAI ELMYRAH
72	PT PUSAT GADAI INDONESIA
73	PT RAJA GADAI INDONESIA
74	PT RUMAH GADAI BANDUNG
75	PT RUMAH GADAI BANTEN
76	PT RUMAH GADAI JABAR
77	PT RUMAH GADAI JAKARTA
78	PT RUMAH GADAI NIAS

No.	Anggota
	Nama PUJK
79	PT SAHABAT GADAI JAWA BARAT
80	PT SAHABAT GADAI SEJATI
81	PT SARANA GADAI PRIORITAS
82	PT SEMANGAT INDO PERGADAIAN
83	PT SENTRA GADAI PERSADA
84	PT SENTRAL GADAI KENCANA
85	PT SEMAR GADAI SETIA
86	PT SILI GADAI NUSANTARA
87	PT SINAR GADAI PRATAMA
88	PT SOLUSI GADAI INDONESIA
89	PT SOLUSI GADAI MANDIRI
90	PT STARTECH GADAI HASTADHARANA
91	PT STARTECH GADAI JANAURAGA
92	PT SUKSES GADAI SEJAHTERA

RUMAH GADAI BANTEN

Sektor Modal Ventura

06

No.	Anggota
	Nama PUJK
1	PT SARANA BALI VENTURA
2	PT MANDIRI CAPITAL INDONESIA
3	PT.SELAPARANG FINANSIAL
4	PT. SARANA SULTRA VENTURA
5	PT MODAL VENTURA YCAB
6	PT. SARANA KALBAR VENTURA
7	PT. SARANA KALTIM VENTURA
8	PT. SARANA NTB VENTURA
9	PT CAPITAL GLOBAL VENTURA
10	PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA
11	PT SINAR MAS VENTURA

No.	Anggota
	Nama PUJK
12	PT PNM VENTURE CAPITAL
13	PT LOLC VENTURA INDONESIA
14	PT SARANA LAMPUNG VENTURA
15	PT. ASIA PACIFIC VENTURA
16	PT. BINA ARTHA VENTURA
17	PT. CORPUS PRIMA VENTURA
18	PT. LIMA VENTURA
19	PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA
20	PT SARANA JABAR VENTURA
21	PT SARANA JAKARTA VENTURA

No.	Anggota
	Nama PUJK
22	PT SARANA JAMBI VENTURA
23	PT SARANA JATENG VENTURA
24	PT SARANA JATIM VENTURA
25	PT SARANA KALSEL VENTURA
26	PT SARANA PAPUA VENTURA
27	PT SARANA RIAU VENTURA
28	PT SARANA SULSEL VENTURA
29	PT SARANA SULTENG VENTURA
30	PT SARANA SULUT VENTURA

No.	Anggota
	Nama PUJK
31	PT SARANA SURAKARTA VENTURA
32	PTSARANA YOGYA VENTURA
33	PT VENTURA GIANT ASIA
34	PT TEZ VETURA
35	PT RELIANCE MODAL VENTURA
36	PT INVESTAMA VENTURE SYARIAH
37	PT PNM VENTURE SYARIAH
38	PT ASTRA MITRA VENTURA

Sektor Dana Pensiun

07

No.	Anggota
	Nama PUJK
A D P I	
1	DPLK GENERALI INDONESIA
2	DPLK BUMIPUTERA
3	DPLK INDOLIFE PENSIONTAMA
4	DPLK SINARMAS MSIG
5	DPLK AIA FINANCIAL
6	DPLK PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN
7	DPLK BANK RAKYAT INDONESIA
8	DPLK JIWASRAYA
9	DPLK ASURANSI JIWA TUGU MANDIRI
10	DPLK PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
11	DPLK ASTRA
12	DPLK PT BPD JAWA TENGAH
13	DPLK MANULIFE INDONESIA
14	DPLK CENTRAL ASIA RAYA
15	DPLK EQUITY LIFE INDONESIA
16	DPLK AVRIST (DH. AIA INDONESIA)
17	DPLK ALLIANZ INDONESIA

No.	Anggota
	Nama PUJK
18	DPLK TOKIO MARINE LIFE INDONESIA
19	DPLK SIMAS JIWA
20	DPLK KRESNA
21	DPLK CAPITAL LIFE INDONESIA
22	DPLK AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES
23	DPLK ADISARANA WANAARTHA
24	DPLK BCA LIFE
25	DPLK PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
26	PT BANK MUAMALAT INDONESIA, DPLK
27	DANA PENSIUN OTORITAS JASA KEUANGAN
28	DANA PENSIUN GPIB
29	DANA PENSIUN PT. SEPATU BATA
30	DANA PENSIUN PEGAWAI UII
31	DANA PENSIUN KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
32	DANA PENSIUN WYETH INDONESIA
33	DANA PENSIUN PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR
34	DANA PENSIUN PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO)

No.	Anggota
	Nama PUJK
35	DANA PENSIUN UNIVERSITAS SURABAYA
36	DANA PENSIUN ANTAM
37	DANA PENSIUN INTI
38	DANA PENSIUN PERHUTANI
39	DANA PENSIUN TELKOM
40	DANA PENSIUN PEGAWAI PERUM PERURI
41	DANA PENSIUN ASDP
42	DANA PENSIUN JASA TIRTA II
43	DANA PENSIUN PERTAMINA
44	DANA PENSIUN GREJA KRISTEN JAWI WETAN
45	DANA PENSIUN PELNI
46	DANA PENSIUN PUSRI
47	DANA PENSIUN LEN INDUSTRI
48	DANA PENSIUN NINDYA KARYA
49	DANA PENSIUN BANK CIMB NIAGA
50	DANA PENSIUN PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN
51	DANA PENSIUN GEREJA GEREJA KRISTEN JAWA
52	DANA PENSIUN CARDIG GROUP
53	DANA PENSIUN UNIVERSITAS TRISAKTI
54	DANA PENSIUN LKBN ANTARA
55	DANA PENSIUN BANK MANDIRI SATU
56	DANA PENSIUN LIA
57	DANA PENSIUN RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA
58	DANA PENSIUN SINT CAROLUS
59	DANA PENSIUN BANK SUMSEL BABEL
60	DANA PENSIUN PT. BANK ACEH
61	DANA PENSIUN ASKRIDA
62	DANA PENSIUN PEGAWAI PT. BPD JAWA TIMUR
63	DANA PENSIUN BANK RAKYAT INDONESIA
64	DANA PENSIUN BANK MANDIRI TIGA
65	DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA
66	DANA PENSIUN KALBE FARMA

No.	Anggota
	Nama PUJK
67	DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI UTARA GORONTALO
68	DANA PENSIUN DELTA DJAKARTA
69	DANA PENSIUN PT. BPD JAMBI
70	DANA PENSIUN TOYOTA ASTRA
71	DANA PENSIUN BANK NEGARA INDONESIA
72	DANA PENSIUN HKBP
73	DANA PENSIUN PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
74	DANA PENSIUN WIJAYA KARYA
75	DANA PENSIUN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
76	DANA PENSIUN HOTEL INDONESIA INTERNASIONAL
77	DANA PENSIUN SEMEN GRESIK
78	DANA PENSIUN KARYAWAN PT COCA-COLA INDONESIA
79	DANA PENSIUN KARYAWAN PANIN BANK
80	DANA PENSIUN ANGKASA PURA II
81	DANA PENSIUN ANGKASA PURA I
82	DANA PENSIUN KARYAWAN SEMEN BATURAJA
83	DANA PENSIUN SEMEN TONASA
84	DANA PENSIUN KIMIA FARMA
85	DANA PENSIUN SEMEN PADANG
86	DANA PENSIUN GOODYEAR INDONESIA
87	DANA PENSIUN BANK INDONESIA
88	DANA PENSIUN KOMPAS GRAMEDIA
89	DANA PENSIUN SAMUDERA INDONESIA
90	DANA PENSIUN BTN
91	DANA PENSIUN BANK MANDIRI DUA
92	DANA PENSIUN PT. BPD RIAU KEPRI
93	DANA PENSIUN GEREJA KRISTEN INDONESIA
94	DANA PENSIUN BANK MANDIRI EMPAT
95	DANA PENSIUN DANAREKSA
96	DANA PENSIUN PT. ASURANSI JASA INDONESIA
97	DANA PENSIUN KONIMEX

No.	Anggota
	Nama PUJK
98	DANA PENSIUN PT. TRAKINDO UTAMA
99	DANA PENSIUN JASA RAHARJA
100	DANA PENSIUN BANK DKI
101	DANA PENSIUN BPD BALI
102	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA JIWASRAYA
103	DANA PENSIUN PROCTER GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA
104	DANA PENSIUN PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
105	DANA PENSIUN BAKRIE
106	DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN
107	DANA PENSIUN SOLUSI BANGUN INDONESIA
108	DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI TENGGARA
109	DANA PENSIUN ASTRA SATU
110	DANA PENSIUN BANK KALBAR
111	DANA PENSIUN PT. BPD BENGKULU
112	DANA PENSIUN PT. BPD KALIMANTAN TENGAH
113	DANA PENSIUN BASF INDONESIA
114	DANA PENSIUN MANDOM INDONESIA
115	DANA PENSIUN PT OTSUKA INDONESIA
116	DANA PENSIUN JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS
117	DANA PENSIUN UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
118	DANA PENSIUN MANFAAT PASTI BOGASARI
119	DANA PENSIUN KALTIM PRIMA COAL
120	DANA PENSIUN KRAMA YUDHA RATU MOTOR
121	DANA PENSIUN PEGAWAI PT. BANK SUMUT
122	DANA PENSIUN PERUSAHAAN PELABUHAN DAN Pengerukan
123	DANA PENSIUN PEGADAIAN
124	DANA PENSIUN PT. BRANTAS ABIPRAYA
125	DANA PENSIUN LUX INDONESIA
126	DANA PENSIUN SIDO MUNCUL

No.	Anggota
	Nama PUJK
127	DANA PENSIUN PEGAWAI PT BPR JATIM
128	DANA PENSIUN PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
129	DANA PENSIUN TIRTA NUSANTARA
130	DANA PENSIUN KARYAWAN STAF PT KEBON AGUNG
131	DANA PENSIUN EVEREADY INDONESIA
132	DANA PENSIUN NATOUR
133	DANA PENSIUN SEKOLAH KRISTEN
134	DANA PENSIUN PT. BPD SUMATERA BARAT
135	DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA
136	DANA PENSIUN BANK WINDU
137	DANA PENSIUN FREEPORT INDONESIA
138	DANA PENSIUN MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING
139	DANA PENSIUN UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
140	DANA PENSIUN UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
141	DANA PENSIUN BUKIT ASAM
142	DANA PENSIUN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN
143	DANA PENSIUN MECOSIN INDONESIA
144	DANA PENSIUN PLN
145	DANA PENSIUN JASA MARGA
146	DANA PENSIUN PT. BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA
147	DANA PENSIUN PERKEBUNAN
148	DANA PENSIUN INFOMEDIA NUSANTARA
149	DANA PENSIUN PT. BPD LAMPUNG
150	DANA PENSIUN PEMBERI KERJA UKHUWAH UMI
151	DANA PENSIUN PT. BANK NTB
152	DANA PENSIUN PT BPD JAWA TENGAH
153	DANA PENSIUN AEROWISATA
154	DANA PENSIUN PERTANI
155	DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI TENGAH
156	DANA PENSIUN PT. BPD KALIMANTAN SELATAN

No.	Anggota
	Nama PUJK
157	DANA PENSIUN BANK PAPUA
158	DANA PENSIUN PT. BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
159	DANA PENSIUN MANFAAT PASTI UNILEVER INDONESIA
160	DANA PENSIUN TIGARAKSA SATRIA
161	DANA PENSIUN DAI NIPPON PRINTING INDONESIA
162	DANA PENSIUN PT. BPD DIY
163	DANA PENSIUN BAPTIS INDONESIA
164	DANA PENSIUN KARYAWAN TASPEN
165	DANA PENSIUN MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA
166	DANA PENSIUN KARYAWAN PT. KRAKATAU STEEL
167	DANA PENSIUN HUTAMA KARYA
168	DANA PENSIUN SARI HUSADA
169	DANA PENSIUN ARTHA GRAHA (DH. INTER PACIFIC)
170	DANA PENSIUN PPPK PETRA
171	DANA PENSIUN DANAPER (DH. BIMANTARA)
172	DANA PENSIUN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA
173	DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG
174	DANA PENSIUN KARYAWAN PT. PAL INDONESIA
175	DANA PENSIUN KARYAWAN PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
176	DANA PENSIUN SWADHARMA INDOTAMA FINANCE
177	DANA PENSIUN IURAN PASTI BOGASARI
178	DANA PENSIUN MITRA KRAKATAU
179	DANA PENSIUN BPK PENABUR
180	DANA PENSIUN KARYAWAN PT. PINDAD
181	DANA PENSIUN GARUDA INDONESIA
182	DANA PENSIUN APAC INTI CORPORA
183	DANA PENSIUN LEMBAGA KATOLIK YADAPEN
184	DANA PENSIUN PEGAWAI PEMBANGUNAN JAYA

No.	Anggota
	Nama PUJK
185	DANA PENSIUN PGI
186	DANA PENSIUN PROGRAM IURAN PASTI KRAMA YUDHA RATU MOTOR
187	DANA PENSIUN ASTRA DUA
188	DANA PENSIUN TRIPUTRA
189	DANA PENSIUN WIKA PPIP
190	DANA PENSIUN INDOMOBIL GROUP
191	DANA PENSIUN YAKKUM
192	DANA PENSIUN BANK CENTRAL ASIA
193	DANA PENSIUN UMSU
194	DANA PENSIUN PUPUK KALTIM GROUP
195	DANA PENSIUN PPIP-PUSRI
196	DANA PENSIUN RSUD AL IHSAN
197	DANA PENSIUN KARYAWAN BEESKA
198	DANA PENSIUN PEGAWAI PT.PERSERO BATAM
199	DANA PENSIUN SMART
200	DANA PENSIUN BANK KB BUKOPIN
201	DANA PENSIUN HARAPAN SEJAHTERA
202	DANA PENSIUN PERUMNAS
203	DANA PENSIUN BANK MANDIRI
204	DANA PENSIUN DUTA WACANA
205	DANA PENSIUN PUPUK KALIMANTAN TIMUR
206	DANA PENSIUN PELINDO PURNAKARYA
207	DANA PENSIUN IURAN PASTI UNILEVER INDONESIA
208	DANA PENSIUN SAMUDERA INDONESIA UTAMA
209	DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI
210	MUHAMMADIYAH
211	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
212	RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA
213	DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

Sektor Penjaminan

08

No.	Anggota
	Nama PUJK
1	PT JAMKRINDO
2	PT JAMKRIDA JATIM
3	PT JAMKRIDA BALI MANDARA (PERSERODA)
4	PT JAMKRIDA RIAU
5	PT JAMKRIDA NTB BERSAING
6	PT JAMKRIDA JABAR
7	PT JAMKRIDA SUMBAR
8	PT JAMKRIDA KALSEL
9	PT JAMKRIDA SUMSEL (PERSERODA)
10	PT JAMKRIDA KALTENG
11	PT JAMKRIDA BABEL

No.	Anggota
	Nama PUJK
12	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
13	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
14	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
15	PT JAMINAN KREDIT DAERAH PAPUA
16	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TENGAH
17	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAKARTA
18	PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT
19	PT JAMKRIDA SULSEL
20	PT SINARMAS PENJAMINAN KREDIT
21	PT ASKRINDO SYARIAH
22	PT JAMKRINDO SYARIAH

Sektor Fintech

09

No.	Anggota
	Nama PUJK
1	PT INOVASI TERDEPAN NUSANTARA
2	PT SOLID FINTEK INDONESIA
3	PT PEMBIAYAAN DIGITAL INDONESIA
4	PT INFO TEKNO SIAGA
5	PT AKSELERAN KEUANGAN INKLUSIF INDONESIA
6	PT AKTIVAKU INVESTAMA TEKNOLOGI
7	PT ALAMI FINTEK SHARIA
8	PT AMARTHA MIKRO FINTEK
9	PT AMMANA FINTEK SYARIAH
10	PT PINTAR INOVASI DIGITAL

No.	Anggota
	Nama PUJK
11	PT GRHA DANA BERSAMA
12	PT SIMPLEFI TEKNOLOGI INDONESIA
13	PT SMARTEC TEKNOLOGI INDONESIA
14	PT BERDAYAKAN USAHA INDONESIA
15	PT IDANA SOLUSI SEJAHTERA
16	PT ARTHA PERMATA MAKMUR
17	PT CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI
18	PT CROWDE MEMBANGUN BANGSA
19	PT MEDIATOR KOMUNITAS INDONESIA
20	PT DANA BAGUS INDONESIA

No.	Anggota
	Nama PUJK
21	PT DANA KINI INDONESIA
22	PT INTEKNO RAYA
23	PT DANA SYARIAH INDONESIA
24	PT DIGITAL MICRO INDONESIA
25	PT INCLUSIVE FINANCE GROUP
26	PT DANAFIX ONLINE INDONESIA
27	PT ADIWISISTA FINANSIAL TEKNOLOGI
28	PT MULIA INOVASI DIGITAL
29	PT PASAR DANA PINJAMAN
30	PT LAYANAN KEUANGAN BERBAGI
31	PT SEMANGAT GOTONG ROYONG
32	PT DOEKU PEDULI INDONESIA
33	PT INDO FIN TEK
34	PT DUHA MADANI SYARIAH
35	PT FIDAC INOVASI TEKNOLOGI
36	PT INDONESIA FINTOPIA TECHNOLOGY
37	PT FINTECH BINA BANGSA
38	PT ESTA KAPITAL FINTEK
39	PT ETHIS FINTEK INDONESIA
40	PT MAPAN GLOBAL REKSA
41	PT ORIENTE MAS SEJAHTERA
42	PT REZEKI BERSAMA TEKNOLOGI
43	PT FINTEGRA HOMIDO INDONESIA
44	PT KREASI ANAK INDONESIA
45	PT GRADANA TEKNORUCI INDONESIA
46	PT IGROW RESOURCES INDONESIA
47	PT IKI KARUNIA INDONESIA
48	PT ARTHA DANA TEKNOLOGI
49	PT BURSA AKSELERASI INDONESIA
50	PT SENS TEKNOLOGI INDONESIA
51	PT INVESTREE RADHIKA JAYA

No.	Anggota
	Nama PUJK
52	PT SOL MITRA FINTEC
53	PT FINANSIA AIRA TEKNOLOGI
54	PT AKUR DANA ABADI
55	PT JULO TEKNOLOGI FINANSIAL
56	PT KAWAN CICIL TEKNOLOGI UTAMA
57	PT CREATIVE MOBILE ADVENTURE
58	PT HARAPAN FINTECH INDONESIA
59	PT AMAN CERMAT CEPAT
60	PT KLIKCAIR MAGGA JAYA
61	PT PINJAMAN KEMAKMURAN RAKYAT
62	PT LUNARIA ANNUA TEKNOLOGI
63	PT KOMUNAL FINANSIAL INDONESIA
64	PT FINACCEL DIGITAL INDONESIA
65	PT KREDITKU TEKNOLOGI INDONESIA
66	PT KREDIT PINTAR INDONESIA
67	PT FINTEK DIGITAL INDONESIA
68	PT TRI DIGI FIN
69	PT PENDANAAN TEKNOLOGI NUSA
70	PT LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI
71	PT LUMBUNG DANA INDONESIA
72	PT ASTRA WELAB DIGITAL ARTA
73	PT MEKAR INVESTAMA SAMPOERNA
74	PT SOLUSI TEKNOLOGI FINANSIAL
75	PT MODAL RAKYAT INDONESIA
76	PT MITRAUSAHA INDONESIA GRUP
77	PT PIRANTI ALPHABET PERKASA
78	PT KREDIT PLUS TEKNOLOGI
79	PT FINANSIAL INTEGRASI TEKNOLOGI
80	PT KUAIKUAI TECH INDONESIA
81	PT DANA PINJAMAN INKLUSIF
82	PT STANFORD TEKNOLOGI INDONESIA

No.	Anggota
	Nama PUJK
83	PT PROGO PUNCAK GROUP
84	PT PINDUIT TEKNOLOGI INDONESIA
85	PT POHON DANA INDONESIA
86	PT QAZWA MITRA HASANAH
87	PT CERITA TEKNOLOGI INDONESIA
88	PT RINGAN TEKNOLOGI INDONESIA
89	PT KREDIT UTAMA FINTECH INDONESIA
90	PT SEJAHTERA SAMA KITA
91	PT SAHABAT MIKRO FINTEK
92	PT SATUSTOP FINANSIAL SOLUSI

No.	Anggota
	Nama PUJK
93	PT LENTERA DANA NUSANTARA
94	PT ABADI SEJAHTERA FINANSINDO
95	PT ANUGERAH DIGITAL INDONESIA
96	PT TANI FUND MADANI INDONESIA
97	PT INDONUSA BARA SEJAHTERA
98	PT TOKO MODAL MITRA USAHA
99	PT TRUST TEKNOLOGI FINANSIAL
100	PT UANGME FINTEK INDONESIA
101	PT PLUS ULTRA ABADI
102	PT TEKNOLOGI MERLIN SEJAHTERA

2022

LAPORAN
TAHUNAN



LAPS SJK
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan

Karya Tower, Lantai 25, Jl. HR Rasuna Said,
Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

Telepon. 021 2527 700

Email. info@lapssjk.id

www.lapssjk.id

